

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat





**LAPORAN
PEREKONOMIAN
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**NOVEMBER
2025**

Visi

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging market* untuk Indonesia Maju.

Misi

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta pelindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya buku “Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) edisi November 2025” dapat dipublikasikan. Buku ini menyajikan asesmen perkembangan perekonomian Provinsi NTB pada triwulan III 2025 serta prospek perekonomian di tahun 2025. Asesmen mencakup: perkembangan ekonomi makro daerah; keuangan pemerintah; inflasi; stabilitas keuangan daerah, pengembangan akses keuangan dan UMKM; penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah; ketenagakerjaan dan kesejahteraan; serta prospek perekonomian daerah.

Secara ringkas, Perekonomian NTB pada triwulan III 2025 mengalami perbaikan, yaitu 2,82% (yoY) setelah terkontraksi pada periode sebelumnya. Dari sisi permintaan, ditopang oleh akselerasi konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, serta investasi tetap tumbuh positif. Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi didorong akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan, khususnya sub-LU Industri Logam Dasar seiring dimulainya produksi emas granula dan peningkatan kapasitas produksi smelter.

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan III 2025 mengalami inflasi sebesar 2,69% (yoY), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (2,51%; yoY). Inflasi tahunan utamanya bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,28% (yoY) dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami inflasi sebesar 12,54% (yoY). Disisi lain, kenaikan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh Kelompok Transportasi yang mengalami deflasi sebesar -0,29% (yoY).

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi positif atas terbitnya publikasi ini, yaitu BPS, DJPB, BPKAD, OPD Tingkat Provinsi dan Kab/Kota, BUMN, Perbankan, serta asosiasi dan pelaku usaha. Kami berharap Laporan Perekonomian Provinsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan, pemerhati ekonomi, dan masyarakat yang membutuhkan. Masukan dan saran konstruktif kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Mataram, November 2025
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hario K. Pamungkas
Kepala Perwakilan

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Tabel	vi
Tabel Indikator	x
Ringkasan Eksekutif	xii

01

Perkembangan Ekonomi Daerah

1.1 Kondisi Umum	2
1.2 PDRB Sisi Permitaan	3
1.2.1 Konsumsi	3
1.2.2 Investasi	4
1.2.3 Ekspor-Impor	4
1.3 PDRB Sisi Penawaran	6
1.3.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6
1.3.2 Pertambangan dan Penggalian	7
1.3.3 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7
1.3.4 Industri Pengolahan	8
Boks 1: Hilirisasi Sektor Perikanan NTB	9

02

Perkembangan Keuangan Daerah

2.1 Gambaran Umum Perkembangan Keuangan Pemerintah	12
2.2 APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	12
2.2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	12
2.2.2 Belanja Daerah APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	13
2.3 APBD Gabungan 10 Kabupaten/kota Nusa Tenggara Barat	15
2.3.1 Pendapatan Daerah APBD Gabungan Kabupaten/Kota	15
2.3.2 Belanja Daerah APBD Gabungan Kabupaten/Kota	17
2.4 APBN di Nusa Tenggara Barat	19
2.4.1 Anggaran Belanja APBN	19

03

Perkembangan Inflasi Daerah

3.1 Perkembangan Inflasi IHK Gabungan Kota di Provinsi NTB Triwulan III 2025	24
3.1.1 Inflasi Berdasarkan Kelompok	25
3.2 Inflasi Kota Pantauan di Provinsi Nusa Tenggara Barat	27
3.2.1 Disagregasi Inflasi Kota Mataram	28
3.2.2 Disagregasi Inflasi Kabupaten Sumbawa	28
3.2.3 Disagregasi Inflasi Kota Bima	29
3.3 Tracking dan Proyeksi Inflasi	30
3.3.1 Tracking Inflasi Triwulan IV 2025	30
3.3.2 Proyeksi Inflasi Keseluruhan Tahun 2025	30
3.4 Program Pengendalian Inflasi Daerah	30
BOKS 2: HBKN Maulid Nabi: Pengaruhnya Terhadap Tingkat Inflasi NTB	31

04

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

4.1 Perkembangan Kinerja Perbankan Di Provinsi NTB	34
4.1.1 Perkembangan Penyaluran Kredit	34
4.1.2 Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)	36
4.1.3 Perkembangan Penyaluran Kredit Secara Spasial	37
4.1.4 Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)	38
4.2 Perkembangan Sektor Korporasi Provinsi NTB	38
4.2.1 Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Korporasi	38
4.2.2 Perkembangan Kredit Korporasi di Provinsi NTB	39
4.2.3 Perkembangan DPK Korporasi di Provinsi NTB	39
4.3 Perkembangan Sektor Rumah Tangga Provinsi NTB	40
4.3.1 Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga	40
4.3.2 Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Provinsi NTB	41
4.3.3 Perkembangan DPK Rumah Tangga di Provinsi NTB	42
4.4 Perkembangan Pembiayaan Umkm Provinsi NTB	42
4.4.1 Penyaluran Kredit UMKM di Provinsi NTB	42
4.4.2 Penyaluran Kredit UMKM Secara Spasial	44

05

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1	Transaksi Pembayaran Tunai	48
5.2	Transaksi Pembayaran Nontunai	50
5.2.1	Transaksi <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS)	50
5.2.2	Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) & BI-FAST	50
5.2.3	Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	51
5.2.4	Perkembangan Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif	53
5.3	Transaksi KUPVA BB dan PJPLR	55

06

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

6.1	Ketenagakerjaan	60
6.1.1	Perkembangan Ketenagakerjaan	60
6.1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	62
6.2	Kesejahteraan	62
6.2.1	Tingkat Kemiskinan	62
6.2.2	Pemerataan Kesejahteraan Penduduk	63
6.2.3	Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan	64
6.2.4	Indeks Pembangunan Manusia	64

07

Prospek Perekonomian

7.1.	Prospek Makroekonomi	52
7.2.	Prospek Inflasi	54
7.3.	Rekomendasi Kebijakan	54

Daftar Grafik

01

Grafik 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Secara Triwulanan	2
Grafik 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Balinusra dan Nasional	2
Grafik 1.3	Perkembangan Outflow, Kliring, dan Perekonomian	2
Grafik 1.4	Perkembangan Kinerja Kredit dan Perekonomian	2
Grafik 1.5	Indeks Keyakinan Konsumen	3
Grafik 1.6	Perkembangan Kredit Rumah Tangga	4
Grafik 1.7	Perkembangan Kredit Investasi	4
Grafik 1.8	Perkembangan Penanaman Modal	4
Grafik 1.9	Perkembangan Ekspor Komoditas Hasil Olahan Smelter	5
Grafik 1.10	Perkembangan Ekspor Tambang dan Ekspor Nontambang	5
Grafik 1.11	Perkembangan Komponen Impor	5
Grafik 1.12	Produksi Gabah Giling Kering (GKG)	6
Grafik 1.13	Produksi Komoditas Hortikultura Utama (Aneka Cabai dan Bawang Merah)	6
Grafik 1.14	Perkembangan Kredit Pertanian	6
Grafik 1.15	Nilai Tukar Petani dan Komponennya	6
Grafik 1.16	Perkembangan Kredit Pertambangan	7
Grafik 1.17	Perkembangan Listrik Sektor Bisnis	7
Grafik 1.18	Indeks Pembelian Barang Tahan Lama	8
Grafik 1.19	Perkembangan Penjualan Kendaraan Bermotor	8
Grafik 1.20	Perkembangan Kredit Perdagangan	8
Grafik 1.21	Perkembangan Kredit Industri Pengolahan	8

02

Grafik 2.1	Proporsi Pagu Belanja	12
Grafik 2.2	Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah di Provinsi NTB s.d. Triwulan III 2025	12
Grafik 2.3	Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal APBD Provinsi NTB	13
Grafik 2.4	Proporsi Komponen Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di NTB	15
Grafik 2.5	Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di NTB (berdasarkan anggaran)	15
Grafik 2.6	Proporsi Anggaran Pendapatan Daerah Spasial Kabupaten/Kota di NTB	15
Grafik 2.7	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di NTB sampai dengan Triwulan III 2025	15
Grafik 2.8	Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota di NTB	17
Grafik 2.9	Rasio Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di NTB	17
Grafik 2.10	Proporsi Anggaran Belanja Daerah Spasial Kabupaten/Kota di NTB	17
Grafik 2.11	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di NTB sampai dengan Triwulan III 2025	17
Grafik 2.12	Perkembangan APBD Kabupaten/Kota di NTB	18

03

Grafik 3.1	Inflasi Tahunan Provinsi NTB dan Nasional	24
Grafik 3.2	Andil Inflasi Kelompok Mamin Tembakau Per Subkelompok	26
Grafik 3.3	Andil Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Subkelompok Perawatan Pribadi Lainnya	26
Grafik 3.4	Andil Inflasi Kelompok Transportasi Per Subkelompok	27
Grafik 3.5	Perkembangan Inflasi Tahunan Kab/Kota Pantauan di Provinsi NTB	27
Grafik 3.6	Inflasi Tahunan Triwulan III 2025 Kab/Kota Pantauan di Provinsi NTB	27

04

Grafik 4.1	Perkembangan Indikator Perbankan Provinsi NTB	34
Grafik 4.2	Pangsa Penyaluran Kredit di Wilayah Balinusra	34
Grafik 4.3	Pangsa Penghimpunan DPK di Wilayah Balinusra	34
Grafik 4.4	Pangsa Kredit Perbankan Provinsi NTB Berdasarkan Jenis Penggunaan	35
Grafik 4.5	Pertumbuhan Kredit Perbankan Provinsi NTB Berdasarkan Jenis Penggunaan	35
Grafik 4.6	Pangsa Kredit Perbankan Provinsi NTB Berdasarkan Sektor Ekonomi	35
Grafik 4.7	Pertumbuhan Kredit Perbankan Provinsi NTB Berdasarkan Sektor Ekonomi	35
Grafik 4.8	Perkembangan DPK Perbankan Provinsi NTB Per Jenis Instrumen	36
Grafik 4.9	Perkembangan DPK Perbankan Provinsi NTB Per Nasabah	36
Grafik 4.10	Perkembangan Deposito Perbankan Provinsi NTB Per Jangka Waktu	36
Grafik 4.11	Perkembangan Giro Perbankan Provinsi NTB Per Kelompok Nilai	36
Grafik 4.12	Perkembangan Tabungan Perbankan Provinsi NTB Per Kelompok Nilai	37
Grafik 4.13	Perkembangan Penyaluran Kredit Kab/Kota di Provinsi NTB	37
Grafik 4.14	Pangsa Penyaluran Kredit Kab/Kota di Provinsi NTB Tw-III 2025	37
Grafik 4.15	Perkembangan Penghimpunan DPK per Kab/Kota di Provinsi NTB	38
Grafik 4.16	Pangsa Penghimpunan DPK Kab/Kota di Provinsi NTB Tw-III 2025	38
Grafik 4.17	Perkembangan PMI Negara Mitra Dagang Utama	38
Grafik 4.18	Perkembangan Ekspor Tambang NTB	38
Grafik 4.19	Perkembangan Likuiditas dan Rentabilitas Korporasi	39
Grafik 4.20	Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor	39
Grafik 4.21	Pangsa Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor	39
Grafik 4.22	Perkembangan DPK Korporasi Berdasarkan Instrumen	40
Grafik 4.23	Pertumbuhan DPK Korporasi Berdasarkan Golongan Korporasi	40
Grafik 4.24	Perkembangan Likuiditas Korporasi	40
Grafik 4.25	Indeks Penghasilan & Ketersediaan Tenaga Kerja Saat Ini	40
Grafik 4.26	Likert Scale Tingkat Upah	40
Grafik 4.27	Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi NTB	41
Grafik 4.28	Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Provinsi NTB	41

Grafik 4.29	Pangsa Kredit Rumah Tangga Menurut Penggunaan	41
Grafik 4.30	Perkembangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	42
Grafik 4.31	Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)	42
Grafik 4.32	Perkembangan DPK Perseorangan & Non Perseorangan Provinsi NTB	42
Grafik 4.33	Perkembangan DPK Perseorangan Berdasarkan Instrumen	42
Grafik 4.34	Pertumbuhan Kredit UMKM di Provinsi NTB	43
Grafik 4.35	Pangsa Kredit UMKM Terhadap Total Kredit	43
Grafik 4.36	Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Sektoral	43
Grafik 4.37	Pertumbuhan Kredit UMKM Secara Sektoral	43
Grafik 4.38	Perkembangan NPL Kredit UMKM	44
Grafik 4.39	Perkembangan Suku Bunga Kredit UMKM	44
Grafik 4.40	Pangsa Penyaluran Kredit UMKM Per Kab/Kota di Provinsi NTB	44
Grafik 4.41	Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM di Kab/Kota Utama	44

05

Grafik 5.1	Perkembangan Nominal <i>Inflow</i> , <i>Outflow</i> , dan <i>Net Outflow</i> Uang Kartal	48
Grafik 5.2	Perkembangan pertumbuhan <i>Outflow</i> , <i>Inflow</i> Uang Kartal	48
Grafik 5.3	Perkembangan pemusnahan dan rasio terhadap <i>inflow</i> dalam nominal	48
Grafik 5.4	Pangsa Pemusnahan UTLE, prosentase dalam bilyet	48
Grafik 5.5	Prosentase rasio pemusnahan uang UPB dan UPK	48
Grafik 5.6	Kegiatan kas keliling	49
Grafik 5.7	Perkembangan <i>net flow</i> di wilayah Kas Titipan Bima dan Sumbawa (minus menunjukkan <i>outflow</i>)	49
Grafik 5.8	Data Perkembangan penyerapan UTLE di wilayah kerja Kas Titipan	49
Grafik 5.9	Pangsa <i>outflow</i> berdasarkan wilayah layanan kas	49
Grafik 5.10	Pangsa <i>inflow</i> berdasarkan wilayah layanan kas	49
Grafik 5.11	Temuan uang palsu	50
Grafik 5.12	Sumber laporan uang palsu	50
Grafik 5.13	Perkembangan Transaksi RTGS	50
Grafik 5.14	Perkembangan Transaksi SKNBI	51
Grafik 5.15	Perkembangan Transaksi BI-FAST	51
Grafik 5.16	Jumlah Kartu Kredit	51
Grafik 5.17	Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit	51
Grafik 5.18	Perkembangan Nominal Transaksi Menggunakan Kartu Kredit	52
Grafik 5.19	Jumlah Kartu kredit	52
Grafik 5.20	Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit	52
Grafik 5.21	Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit	52
Grafik 5.22	Jumlah Akun UE	53
Grafik 5.23	Perkembangan Volume UE	53
Grafik 5.24	Perkembangan Nominal Transaksi UE	53
Grafik 5.25	Perkembangan Jumlah Merchant QRIS	54
Grafik 5.26	Perkembangan Transaksi QRIS di Provinsi NTB	54
Grafik 5.27	Perkembangan Transaksi KUPVA BB	55
Grafik 5.28	Pangsa Transaksi Beli KUPVA BB	56
Grafik 5.29	Pangsa Transaksi Jual KUPVA BB	56
Grafik 5.30	Perkembangan Transaksi PJPLR	56

06

Grafik 6.1	Indeks Kondisi Ekonomi	62
Grafik 6.2	Indeks Ekspektasi Ekonomi	62
Grafik 6.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin NTB	63
Grafik 6.4	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota dan Desa NTB	63
Grafik 6.5	Perkembangan Koefisien Gini NTB dan Nasional	64
Grafik 6.6	Perbandingan Ketimpangan NTB dan Nasional Berdasarkan Daerah	64
Grafik 6.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB dan Indonesia	66
Grafik 6.8	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi NTB pada Tahun 2025	66

07

Grafik 7.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTB	71
Grafik 7.2	Indeks Keyakinan Konsumen	71
Grafik 7.3	Realisasi Pengadaan Semen	72
Grafik 7.4	Produksi Konsentrat Tembaga	72
Grafik 7.5	Proyeksi Inflasi Provinsi NTB	74
Grafik 7.6	Harga Emas Global	74

Daftar Tabel

01

Tabel 1.1	Pertumbuhan PDRB NTB - Sisi Permintaan (% , yoy)	3
Tabel 1.2	Pertumbuhan PDRB NTB - Sisi Penawaran (% , yoy)	6
Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Pemprov NTB	13
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Pemprov NTB	14
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB	16
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB	18
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di NTB	19
Tabel 3.1	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan	24
Tabel 3.2	Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan	24
Tabel 3.3	Inflasi Tahunan Kab/Kota di Provinsi NTB	24
Tabel 3.4	Inflasi Tahunan Provinsi NTB Berdasarkan Kelompok	25
Tabel 3.5	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Mamin Tembakau	26
Tabel 3.6	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	26
Tabel 3.7	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Pendidikan	27
Tabel 3.8	Inflasi Tahunan Kota Mataram Berdasarkan Kelompok	28
Tabel 3.9	Inflasi Tahunan Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Kelompok	29
Tabel 3.10	Inflasi Tahunan Kota Bima Berdasarkan Kelompok	29
Tabel 4.1	Pengelompokan Kredit Berdasarkan Nilai Tw-III 2025	35
Tabel 6.1	Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi NTB (ribu orang)	60
Tabel 6.2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (ribu orang)	61
Tabel 6.3	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (ribu orang)	61
Tabel 6.4	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (ribu orang)	62
Tabel 6.5	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (ribu orang)	62
Tabel 6.6	Garis Kemiskinan NTB	63
Tabel 6.7	Nilai Tukar Petani NTB dan Komponen Penyusunnya	64
Tabel 6.8	Nilai Tukar Petani NTB per Subsektor	64
Tabel 6.9	Indeks yang Diterima Petani berdasarkan Subsektor	65
Tabel 6.10	Indeks yang Dibayar Petani berdasarkan Subsektor	65
Tabel 6.11	Perkembangan Komponen IPM berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB	65
Tabel 7.1	Pertumbuhan PDB Dunia	70
Tabel 7.2	Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan	72
Tabel 7.3	Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	73



Tabel Indikator Ekonomi Ekonomi & Moneter

Provinsi Nusa Tenggara Barat

INDIKATOR	2024			2025		
	II	III	IV	I	II	III
EKONOMI DAERAH						
PDRB - Harga konstan (Rp Miliar)	28.061,06	28.126,79	26.729,55	26.118,03	27.832,32	28.920,86
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.163,94	6.215,28	5.235,14	5.930,41	6.392,91	6.435,22
- Pertambangan dan Penggalian	5.433,13	4.926,60	4.620,81	3.746,04	3.807,24	3.865,72
- Industri Pengolahan	1.065,46	1.495,04	1.256,50	1.286,00	1.770,64	2.491,52
- Pengadaan Listrik, Gas	34,16	32,75	32,96	33,03	34,18	34,30
- Pengadaan Air	19,97	19,94	21,18	20,44	20,62	21,01
- Konstruksi	2.556,13	2.766,53	2.853,43	2.667,69	2.698,59	2.921,18
- Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.010,33	3.989,25	3.903,49	3.894,00	4.127,02	4.158,39
- Transportasi dan Pergudangan	1.560,66	1.571,81	1.525,63	1.460,20	1.623,63	1.611,21
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	432,76	449,35	419,42	396,95	467,74	480,62
- Informasi dan Komunikasi	774,82	800,73	799,76	796,81	807,50	814,54
- Jasa Keuangan	1.023,40	1.030,47	968,98	1.022,73	1.037,41	1.099,52
- Real Estate	843,94	859,27	863,80	854,47	873,69	890,14
- Jasa Perusahaan	51,35	51,52	52,42	53,29	53,51	53,15
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.487,57	1.309,71	1.498,92	1.369,54	1.457,23	1.396,35
- Jasa Pendidikan	1.311,24	1.331,97	1.344,26	1.306,23	1.322,94	1.342,05
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	628,78	631,11	656,27	639,48	637,99	640,29
- Jasa lainnya	663,43	645,45	676,58	640,72	699,48	665,66
Pertumbuhan PDRB (yoy %)	11,06	6,22	(0,50)	(1,43)	(0,82)	2,82
Pertumbuhan PDRB tanpa Sektor Pertambangan (yoy %)	5,02	4,00	3,77	5,85	6,17	3,28
FISKAL DAERAH (Provinsi + Kab/Kota)						
Realisasi Penerimaan Daerah (Rp Milliar)	11.912,88	18.703,70	25.625,99	4.425,69	11.301,87	19.634,20
Realisasi Belanja Daerah (Rp Milliar)	4.724,04	15.435,81	24.516,15	3.666,24	9.020,29	15.411,88
- Belanja Pegawai	4.724,04	6.924,49	9.813,61	2.063,74	4.904,23	7.426,17
- Belanja Barang	2.334,97	4.492,17	7.716,95	917,39	2.281,43	4.369,69
- Belanja Modal	418,09	1.181,88	2.952,19	110,78	384,38	1.085,06
- Belanja Bantuan Sosial	6,77	34,26	62,97	3,01	6,82	20,82
INFLASI						
Indeks Harga Konsumen	106,08	105,87	107,04	107,97	108,74	108,72
- Kota Mataram	111,46	105,97	107,00	107,92	108,58	109,16
- Kota Bima	107,00	106,46	107,23	106,94	108,11	108,35
- Kabupaten Sumbawa	104,26	105,55	107,01	108,37	109,16	108,28
Laju Inflasi Tahunan (yoy %)	2,12	1,77	1,28	1,15	2,51	2,69
- Kota Mataram	2,93	1,97	1,92	1,51	2,14	3,01
- Kota Bima	2,39	2,49	2,33	1,13	2,43	1,78
- Kabupaten Sumbawa	0,95	1,27	0,08	0,68	3,02	2,58

INDIKATOR	2024			2025		
	II	III	IV	I	II	III
STABILITAS SISTEM KEUANGAN						
Total Aset (Rp Miliar)	78.362,18	81.125,51	82.867,13	85.318,63	88.367,48	91.111,38
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	46.848,56	47.683,78	44.430,50	45.258,56	48.326,67	48.966,42
- Giro (Rp Miliar)	12.592,52	12.979,85	8.672,42	10.407,07	11.331,76	10.666,70
- Tabungan (Rp Miliar)	23.042,69	23.217,45	24.212,10	23.567,19	24.769,56	25.313,19
- Deposito (Rp Miliar)	11.213,35	11.486,47	11.545,98	11.284,29	12.225,34	12.986,53
Kredit (Rp Miliar) - berdasarkan lokasi proyek	93.048,36	93.203,57	98.491,04	105.415,00	108.833,00	117.319,56
- Modal Kerja	37.193,60	37.596,84	44.673,74	47.284,00	47.907,00	53.434,79
- Investasi	25.106,72	23.876,67	21.453,24	25.376,00	27.799,00	29.331,69
- Konsumsi	30.748,04	31.730,06	32.364,06	32.754,00	33.127,00	34.553,09
Total Kredit UMKM (Rp Miliar)	21.928,11	22.559,93	22.581,00	22.655,47	22.579,93	22.565,07
Loan to Deposit Ratio (%)	137,99	140,42	155,09	157,92	152,35	153,29
NPL (%)	1,72	1,85	2,01	2,25	2,35	2,52
SISTEM PEMBAYARAN						
Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar)	9.108,33	9.434,28	8.874,22	7.206,25	5.892,85	7.970,88
Volume Transaksi RTGS (lembar)	3.809,00	4.546,00	4.526,00	4.063,00	3.712,00	4.422,00
Rata-rata Harian Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar)	168,67	174,71	164,34	133,45	109,13	147,61
Rata-rata Harian Volume Transaksi RTGS (ribu lembar)	70,54	84,19	83,81	75,24	68,74	81,89
Nominal Kliring (Rp miliar)	2.897,17	3.275,50	3.424,33	2.564,00	2.549,68	3.142,76
Volume Kliring (ribu lembar)	53,24	56,34	64,07	46,12	34,50	54,70
Rata-rata Harian Nominal Kliring (Rp miliar)	53,65	60,66	63,41	47,48	47,22	58,20
Rata-rata Harian Volume Kliring (lembar)	0,99	1,04	1,19	0,85	0,64	1,01
KESEJAHTERAAN						
Nilai Tukar Petani	119,81	119,36	123,31	124,99	124,13	125,52
Tingkat Pengangguran Terbuka (%, Feb'25)	3,30	2,73	2,73	3,22	3,22	3,06
Tingkat Kemiskinan (%, Sept - Mei'25)	12,91	12,91	11,91	11,78	11,78	11,78
Gini Rasio (%, Sept - Mei'25)	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Ringkasan Eksekutif

November 2025



Perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB) Barat pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 2,82% (yoY)

Perkembangan Ekonomi Daerah

Perekonomian NTB pada triwulan III 2025 tumbuh positif 2,82% (yoY) setelah terkontraksi pada tiga triwulan sebelumnya. Perbaikan ekonomi NTB pada triwulan III 2025 ditopang oleh akselerasi konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, serta investasi tetap tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga tercatat meningkat yang didorong oleh kebijakan lima paket stimulus masyarakat dan momentum bulan Maulid, serta konsumsi pemerintah yang tumbuh positif.

Dari sisi penawaran, ekonomi NTB pada triwulan III 2025 didorong oleh akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan, khususnya sub-LU Industri Logam Dasar seiring dimulainya produksi emas granula dan peningkatan kapasitas produksi smelter. LU Perdagangan tercatat mengalami peningkatan seiring perhelatan event nasional dan internasional.

Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan pemerintah di Provinsi NTB mengalami penurunan pada triwulan III 2025 yang tercermin dari persentase realisasi pendapatan APBN, APBD Provinsi NTB dan APBD Kabupaten/Kota masing-masing sebesar 70,92%, 74,44% dan 74,17%.

Secara nominal, realisasi pendapatan gabungan Pemerintah Pusat (APBN) dan Provinsi NTB (APBD) triwulan III 2025 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun persentase realisasi pendapatan terhadap pagu anggaran tahun 2025 untuk APBN, APBD Provinsi NTB, dan APBD Kabupaten/Kota masing-masing sebesar 70,92%, 74,44% dan 74,17%. Sementara secara spasial, realisasi pendapatan Kabupaten/Kota terhadap pagu anggaran tahun 2025 tertinggi adalah Kabupaten Sumbawa Barat (103,55%) dan terendah Kabupaten Bima (62,76%). Di sisi lain, realisasi belanja gabungan Pemerintah Pusat dan Provinsi NTB (termasuk kabupaten/kota) pada triwulan III 2025 tercatat mengalami sedikit peningkatan, dengan realisasi sebesar Rp35.018,70 miliar atau 63,98% dari target. Secara spasial, persentase realisasi penyerapan belanja tertinggi adalah Kabupaten Lombok Timur (66,32%), sedangkan terendah yaitu Kabupaten Sumbawa Barat (40,09%).

Perkembangan Inflasi Daerah

Gabungan kota perhitungan inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan III 2025 mengalami inflasi sebesar 2,69% (yoY). Inflasi tahunan utamanya bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,28% (yoY). Di sisi lain, kenaikan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh Kelompok Transportasi yang mengalami deflasi sebesar -0,29% (yoY).

Pada triwulan IV 2025, tekanan inflasi diperkirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring dengan masuknya periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru. Lebih lanjut, untuk keseluruhan tahun 2025, inflasi diperkirakan tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$.

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan III 2025 mengalami inflasi sebesar 2,69% (yoY), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (2,51%; yoY). Kenaikan tekanan inflasi utamanya bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

Kinerja sistem keuangan Provinsi NTB pada triwulan III 2025 masih tetap kuat, didorong pertumbuhan kredit investasi yang terakselerasi sebesar 108,52%. Perkembangan positif tersebut turut didukung oleh risiko yang terjaga, tercermin dari NPL yang masih berada pada threshold <5%. Penyaluran kredit perbankan di Provinsi NTB mencapai Rp75,06 triliun pada triwulan III 2025, atau tumbuh 12,10% (yoY), tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 12,10% (yoY).

Stabilitas keuangan daerah Provinsi NTB pada triwulan III 2025 terpantau tetap kuat, tercermin dari kinerja penyaluran kredit yang tumbuh serta NPL yang masih terjaga.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Aliran uang kartal di Provinsi NTB pada triwulan III 2025 tercatat net outflow Rp0,74 triliun. Transaksi melalui sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) di Provinsi NTB tercatat sebesar Rp7,97 triliun dengan capaian volume sebesar 4.422 transaksi pada triwulan III 2025.

Sejalan dengan peningkatan kondisi perekonomian di Provinsi NTB pada triwulan II 2025, volume transaksi non-tunai dan QRIS mengalami kenaikan.

Sementara itu, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada periode laporan nilai transaksi hanya mencapai Rp3,14 triliun mengindikasikan transaksi yang bersifat kecil (low value) ditengah tingginya frekuensi transaksi. Di sisi lain, QRIS mencatat lonjakan signifikan, dengan pertumbuhan merchant lebih dari dua kali lipat dan transaksi mencapai Rp1,26 triliun, menegaskan bahwa pembayaran digital semakin menjadi preferensi utama masyarakat NTB dan mendorong percepatan inklusi serta ekonomi digital di daerah.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh positif pada rentang 1,96% - 2,76% (yoy) lebih rendah dibandingkan tahun 2024

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkat dari 2,73% pada Agustus 2024 menjadi 3,06% pada Agustus 2025 yang dikontribusikan oleh peningkatan TPT Perkotaan sebesar 0,46% (ptp). Di sisi lain, tingkat kemiskinan di Provinsi NTB mengalami penurunan yang dikontribusi oleh penurunan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan. Tingkat kemiskinan di Provinsi NTB mengalami penurunan dari 12,91% pada Maret 2024 menjadi 11,78% pada Maret 2025.

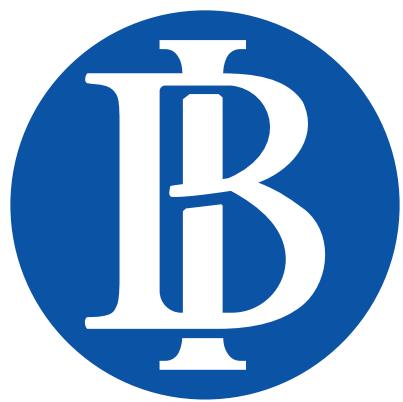
Nilai Tukar Petani pada September 2025 meningkat 1,39% (ptp) dibandingkan Juni 2025, didorong oleh peningkatan indeks yang diterima petani dan indeks yang dibayar petani. Secara sektoral, peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan sektor tanaman bahan pangan dan perikanan masing-masing sebesar 7,13% (ptp) dan 2,45% (ptp).

Prospek Perekonomian Daerah

Tekanan inflasi Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 namun tetap terkendali.

Ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh positif pada rentang 1,96% - 2,76% (yoy). Lebih lanjut, ekonomi tanpa tambang diperkirakan tumbuh 6,80% - 7,60%. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB didorong oleh mulai beroperasinya smelter yang mendorong industri pengolahan di Provinsi NTB. Sejalan dengan hal tersebut, masih tetap tumbuhnya konsumsi RT turut mendorong kinerja perekonomian provinsi NTB sejalan dengan kenaikan tingkat upah, aktivitas perekonomian yang terus membaik serta tingkat inflasi yang terkendali.

Lebih lanjut, tekanan inflasi Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, namun tetap terkendali. Meningkatnya tekanan inflasi terutama didorong oleh penyesuaian harga komoditas dibandingkan tahun sebelumnya (cth. Gabah, jagung, & harga jual eceran rokok) serta potensi peningkatan permintaan pangan utama. Volatilitas harga komoditas global turut mendorong tingkat inflasi lebih tinggi di tahun 2025. Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan sinergi dan koordinasi intensif, serta mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi NTB.





01

Perkembangan Ekonomi Makro Regional

Perekonomian NTB pada triwulan III 2025 tumbuh positif 2,82% (yoY) setelah terkontraksi pada tiga triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi nontambang juga terakselerasi dari 6,08% (yoY) pada triwulan II 2025 menjadi 7,86% (yoY) pada triwulan III 2025.

Perbaikan ekonomi NTB pada triwulan III 2025 ditopang oleh akselerasi konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, serta investasi tetap tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga tercatat meningkat yang didorong oleh kebijakan lima paket stimulus masyarakat dan momentum bulan Maulid, serta konsumsi pemerintah yang tumbuh positif seiring percepatan realisasi belanja pemerintah menjelang akhir tahun anggaran.

Dari sisi penawaran, ekonomi NTB pada triwulan III 2025 didorong oleh akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan, khususnya sub-LU Industri Logam Dasar seiring dimulainya produksi emas granula dan peningkatan kapasitas produksi smelter. LU Perdagangan tercatat mengalami peningkatan seiring perhelatan event nasional dan internasional. Adapun LU Pertanian tetap tumbuh positif seiring masuknya panen padi subround II. Sementara itu, kinerja LU Pertambangan juga mengalami perbaikan, walaupun masih mengalami kontraksi seiring masih berlangsungnya fase peralihan tambang Batu Hijau di Kab. Sumbawa Barat.

1.1 KONDISI UMUM

Kinerja ekonomi NTB pada triwulan III 2025 kembali tumbuh positif setelah terkontraksi tiga triwulan sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB pada triwulan III 2025 tumbuh positif 2,82% (yo), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -0,82% (yo) (Grafik 1. 1). Kinerja tersebut lebih rendah dibandingkan kinerja ekonomi Wilayah Balinusra (4,71%, yo) dan Nasional (5,04%, yo) (Grafik 1. 2). Namun demikian, kinerja ekonomi NTB nontambang tercatat melanjutkan tren peningkatan dan merupakan kinerja tertinggi sejak 2018. Ekonomi nontambang NTB tercatat tumbuh 7,86% (yo) pada triwulan III 2025, ditopang oleh peningkatan kinerja perdagangan dan konstruksi, serta pertanian yang tetap tumbuh kuat.

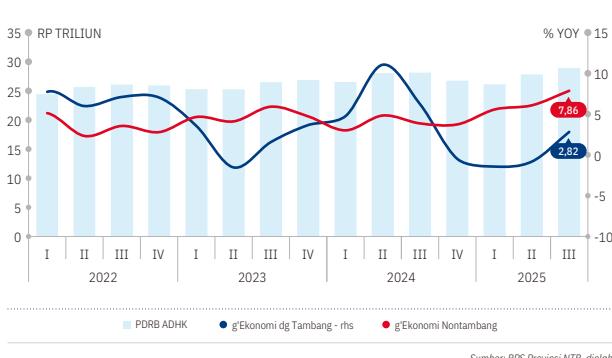
Perbaikan ekonomi NTB pada triwulan III 2025 ditopang oleh akselerasi konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, serta investasi tetap tumbuh positif (Tabel 1. 1). Konsumsi rumah tangga tercatat meningkat yang didorong oleh seiring kebijakan lima paket stimulus masyarakat dan momentum bulan Maulid, serta konsumsi pemerintah yang tumbuh positif seiring percepatan realisasi belanja pemerintah menjelang akhir tahun anggaran. Sementara itu, kinerja investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencatatkan pertumbuhan positif seiring berlanjutnya investasi di KEK Mandalika dan akselerasi investasi di sektor

pertambangan guna mendukung produksi konsentrat tembaga.

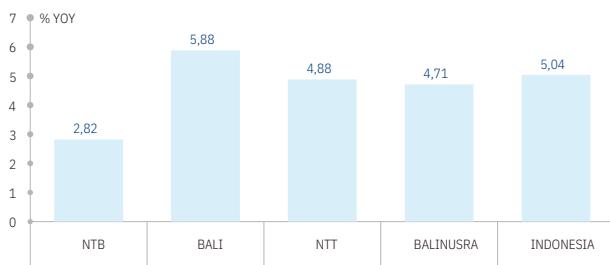
Secara sektoral, ekonomi NTB pada triwulan III 2025 ditopang oleh akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan, khususnya sub-LU Industri Logam Dasar seiring dimulainya produksi emas granula dan peningkatan kapasitas produksi smelter. LU Perdagangan tercatat mengalami peningkatan seiring perhelatan event nasional dan internasional. Adapun LU Pertanian tetap tumbuh positif seiring masuknya panen padi subround II. Sementara itu, kinerja LU Pertambangan juga mengalami perbaikan, walaupun masih mengalami kontraksi seiring masih berlangsungnya fase peralihan tambang Batu Hijau.

Sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian, penyaluran kredit di Provinsi NTB tumbuh meningkat. Berdasarkan lokasi proyek, penyaluran kredit perbankan mengalami peningkatan dari tumbuh 16,96% (yo) pada triwulan II 2025 menjadi 25,87% (yo) pada triwulan III 2025 (Grafik 1. 3). Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan kinerja kredit modal kerja dan kredit investasi, khususnya di sektor pertambangan. Namun demikian, pertumbuhan kredit tersebut disertai dengan peningkatan risiko kredit, tercermin dari rasio NPL yang naik dari 1,71% pada triwulan II 2025 menjadi 1,76% pada triwulan III 2025.

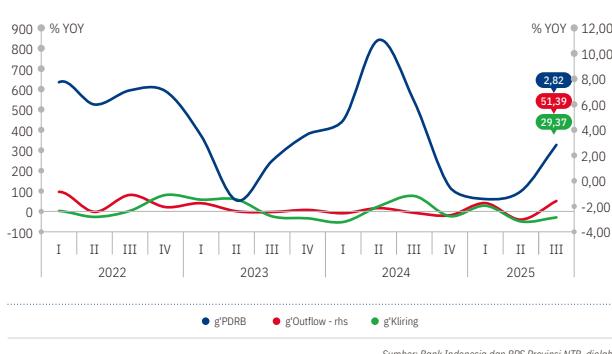
Grafik 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Secara Triwulanan



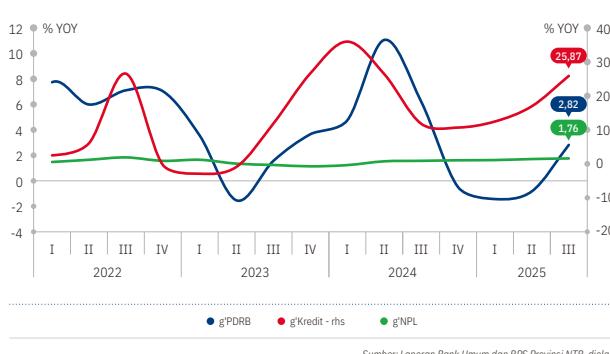
Grafik 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Balinusra dan Nasional



Grafik 1. 4 Perkembangan Outflow, Kliring, dan Perekonomian



Grafik 1. 3 Perkembangan Kinerja Kredit dan Perekonomian



Tabel 1.1. Pertumbuhan PDRB NTB - Sisi Permintaan (%, yoy)

Komponen	2024				2024	2025			
	I	II	III	IV		I	II	III	
Konsumsi Rumah Tangga	5,14	5,05	4,41	3,25	4,45	4,18	4,06	4,51	▲
Konsumsi LNPRT	18,79	13,69	12,84	1,03	11,26	-1,09	1,77	1,12	▼
Konsumsi Pemerintah	13,21	2,94	1,08	4,43	5,17	4,15	-0,88	5,89	▲
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,79	2,32	-0,11	2,78	3,11	-1,67	3,59	3,31	▼
Ekspor Barang dan Jasa	1,14	92,20	14,26	-41,43	5,77	-41,05	-40,02	-26,61	▲
Impor Barang dan Jasa	8,03	24,43	15,54	-23,56	3,87	-22,43	-27,68	-18,94	▼
PDRB Provinsi NTB	4,75	11,06	6,22	-0,50	5,30	-1,47	-0,82	2,82	▲

▲ Lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ▼ Lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ▶ Sama dengan triwulan sebelumnya

Sumber: BPS Provinsi NTB

Lebih lanjut, perhelatan berbagai event nasional dan internasional serta momentum bulan Maulid turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini tercermin dari kinerja outflow uang yang tumbuh 51,39% (yoy) pada triwulan III 2025, berbalik dari kontraksi 40,20% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.4). Kinerja nominal transaksi kliring perbankan juga membaik, dari kontraksi -49,12% (yoy) pada triwulan II 2025 menjadi -29,37% (yoy) pada triwulan III 2025, seiring meningkatnya transaksi pembayaran antarbank dan pemulihan aktivitas perdagangan menjelang akhir tahun.

1.2 PDRB SISI PERMINTAAN

Perekonomian NTB pada triwulan III 2025 mengalami perbaikan yang dikontribusikan oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan pemerintah, serta investasi yang tetap tumbuh positif. Kinerja eksport juga tercatat mengalami perbaikan seiring dimulainya eksport emas granula serta peningkatan eksport katoda tembaga.

1.2.1 Konsumsi

Pada triwulan III 2025, kinerja konsumsi tumbuh positif dan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Konsumsi tercatat tumbuh 4,66% (yoy) pada triwulan III 2025, meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,17% (yoy). Pertumbuhan positif tersebut utamanya didorong oleh konsumsi rumah tangga seiring kebijakan lima paket stimulus masyarakat dan momentum bulan Maulid, serta konsumsi pemerintah yang tumbuh positif seiring percepatan realisasi belanja pemerintah menjelang akhir tahun anggaran. Lebih lanjut, konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT) tetap tumbuh positif pada triwulan III 2025, meskipun melandai dibandingkan triwulan sebelumnya.

1.2.1.1 Konsumsi Swasta [Rumah Tangga & LNPRT]

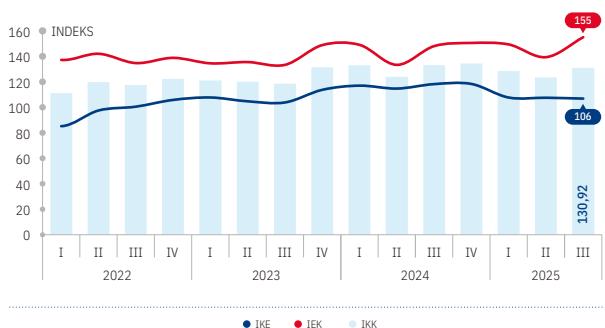
Konsumsi swasta tercatat meningkat pada triwulan III 2025. Berdasarkan data BPS, konsumsi swasta tumbuh 4,42% (yoy) pada triwulan III 2025, relatif meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,00% (yoy).

Kinerja tersebut ditopang pertumbuhan peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT yang tetap tumbuh positif.

Pada triwulan III 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,51% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan 4,06% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Tabel 1.1). Peningkatan kinerja tersebut didorong momentum bulan maulid serta kebijakan lima paket stimulus masyarakat pada periode Juni-Juli 2025. Paket stimulus tersebut terdiri atas diskon transportasi selama periode libur sekolah, diskon tarif tol, bantuan sosial dan bantuan pangan, bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, serta perpanjangan program diskon iuran JKK bagi pekerja di sektor padat karya.

Seiring dengan implementasi kebijakan tersebut, Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Pada triwulan III 2025, IKK tetap berada pada level optimis (>100) dan tercatat sebesar 130,92, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 123,42 (Grafik 1.5). Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) seiring peningkatan ekspektasi kondisi kegiatan lapangan usaha dan ketersediaan lapangan kerja ke depan. Meski demikian, optimisme yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan indeks penghasilan yang mendorong penurunan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dari 107,50 pada triwulan II 2025 menjadi 106,83 pada triwulan III 2025.

Grafik 1.5 Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga juga tercermin pada peningkatan kinerja kredit sektor rumah tangga, terutama Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Pada triwulan III 2025, penyaluran KPR tumbuh 12,44% (yoY), lebih tinggi dari pertumbuhan 10,67% (yoY) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.6) seiring implementasi program Tiga Juta Rumah, yang mendorong permintaan pembiayaan perumahan oleh masyarakat. Lebih lanjut, penyaluran KPA juga menunjukkan perbaikan signifikan, berbalik dari kontraksi -17,53% (yoY) pada triwulan II 2025 menjadi tumbuh 31,07% (yoY) pada triwulan III 2025. Di sisi lain, kinerja penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor mengalami penurunan akibat implementasi opsene pajak kendaraan yang meningkatkan beban biaya kepemilikan dan menahan minat pembelian kendaraan baru di masyarakat.

Sementara itu, kinerja konsumsi LNPRT tetap tumbuh positif meskipun melandai. Pada triwulan III 2025, konsumsi LNPRT tumbuh 1,12% (yoY), relatif melandai dibandingkan pertumbuhan 1,77% (yoY) pada triwulan sebelumnya (Tabel 1.1). Kinerja yang melandai tersebut dipengaruhi dinamika kegiatan organisasi kemasyarakatan, termasuk aktivitas sosial-keagamaan, serta peningkatan aktivitas *meeting, incentive, convention, and exhibition* (MICE).

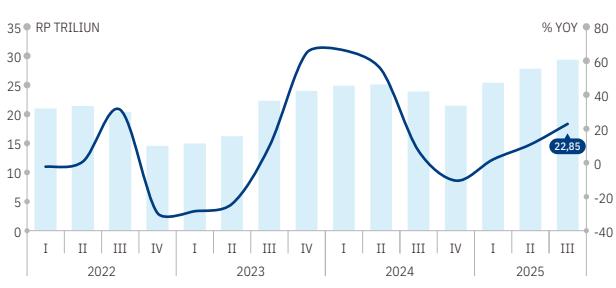
1.2.1.2 Konsumsi Pemerintah

Sejalan dengan konsumsi swasta, konsumsi pemerintah mengalami peningkatan pada Triwulan III 2025. Berdasarkan data BPS, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 5,89% (yoY) pada triwulan III 2025, berbalik arah setelah terkontraksi -0,88% (yoY) pada triwulan sebelumnya (Tabel 1.1). Peningkatan kinerja tersebut sejalan dengan kebijakan percepatan realisasi belanja pemerintah menjelang akhir tahun anggaran.

1.2.2 Investasi

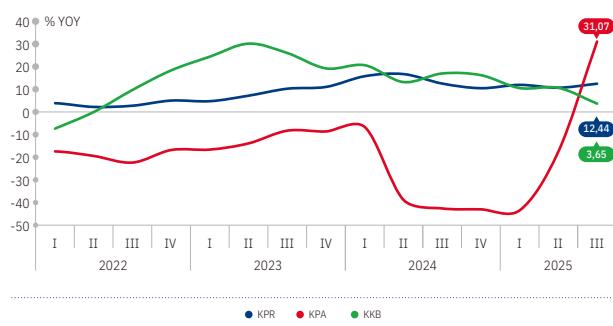
Kinerja pembentukan modal tetap atau investasi tetap tumbuh positif triwulan III 2025. Investasi tercatat tumbuh 3,31% (yoY) pada triwulan III 2025, relatif melambat dibandingkan pertumbuhan 3,59% (yoY) pada triwulan sebelumnya (Tabel 1.1). Kinerja positif investasi di NTB tercermin dari kredit investasi yang tumbuh kuat 22,85% (yoY) pada triwulan III 2025,

Grafik 1.7 Perkembangan Kredit Investasi



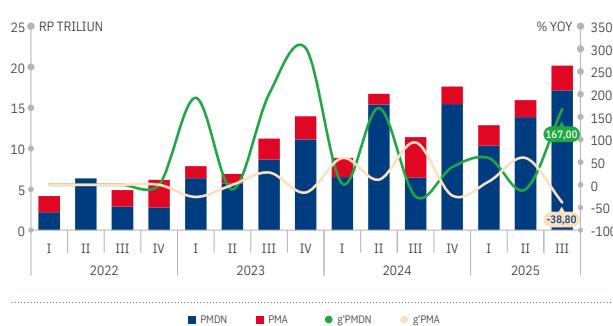
Sumber: Laporan Bank Umum (Lokasi Proyek)

Grafik 1.6 Perkembangan Kredit Rumah Tangga



Sumber: Laporan Bank Umum (Lokasi Proyek)

Grafik 1.8 Perkembangan Penanaman Modal



Sumber: DPMPTSP Provinsi NTB

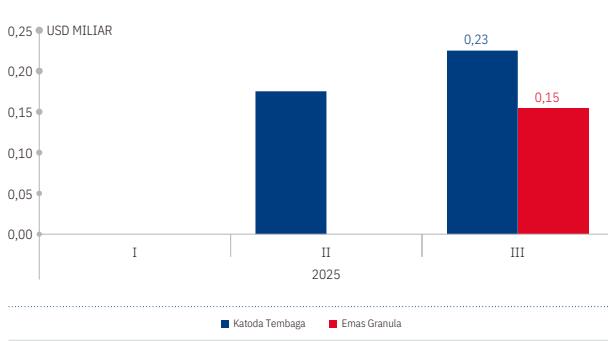
meningkat dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya yang sebesar 10,72% (yoY) (Grafik 1.7). Kredit investasi tersebut utamanya disalurkan ke sektor pertambangan di Kab. Sumbawa Barat.

Lebih lanjut, data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Provinsi NTB) menunjukkan penanaman modal di NTB mengalami peningkatan, utamanya dari dalam negeri. Pada triwulan III 2025, penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat tumbuh 167,00% (yoY) yang didorong oleh investasi pada sektor energi dan sumber daya mineral, seperti tambang dan pembangkit listrik. Dengan perkembangan tersebut, penanaman modal di NTB tumbuh mencapai 76,99% (yoY) pada triwulan III 2025, meningkat setelah terkontraksi -4,50% (yoY) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.8).

1.2.3 Ekspor-Impor

Neraca perdagangan NTB pada triwulan III 2025 mengalami defisit Rp1,44 triliun, menurun dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya yang sebesar Rp1,90 triliun. Sejalan dengan itu, kinerja net ekspor tumbuh 64,39% (yoY) pada triwulan III 2025, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 107,64% (yoY). Kinerja neraca perdagangan ini terutama ditopang oleh peningkatan ekspor barang dan jasa seiring peningkatan ekspor konsentrat tembaga dan dimulainya komersialisasi produk emas granula. Sementara itu, impor barang dan jasa tercatat mengalami perbaikan seiring peningkatan impor peralatan tambang dan smelter.

Grafik 1.9 Perkembangan Ekspor Komoditas Hasil Olahan Smelter



Grafik 1.10 Perkembangan Ekspor Tambang dan Ekspor Nontambang



1.2.3.1 Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa NTB pada triwulan III 2025 menunjukkan perbaikan meskipun masih mengalami kontraksi. Pada periode laporan, ekspor mengalami kontraksi sebesar -26,61% (yoY), lebih baik dibandingkan kontraksi -40,02% (yoY) pada triwulan sebelumnya (Tabel 1.1). Perbaikan kinerja ekspor didorong oleh dimulainya komersialisasi komoditas emas granula mesin *precious metals refinery* (PMR) pada Juli 2025 yang merupakan produk olahan lanjutan dari proses *smelting* tembaga, serta peningkatan ekspor katoda tembaga. Berdasarkan data BPS, ekspor emas granula mencapai USD 0,15 miliar pada triwulan III 2025 (Grafik 1.9). Adapun ekspor katoda mengalami peningkatan dari USD 0,18 miliar pada triwulan II 2025 menjadi USD 0,23 miliar pada triwulan III 2025. Lebih lanjut, perbaikan tersebut turut didorong oleh peningkatan kinerja ekspor nontambang dari 11,74% (yoY) pada triwulan II 2025 menjadi 16,16% (yoY) pada triwulan III 2025 seiring peningkatan produksi dan ekspor komoditas mutiara (Grafik 1.10).

1.2.3.2 Impor Barang dan Jasa

Sejalan dengan ekspor, impor barang dan jasa mengalami kontraksi yang lebih baik pada triwulan III 2025. Impor barang dan jasa tercatat terkontraksi -18,94% (yoY), lebih baik dibandingkan kontraksi -26,61% (yoY) pada triwulan II 2025 (Tabel 1.1). Perbaikan kinerja impor didorong oleh perbaikan

Grafik 1.11 Perkembangan Komponen Impor



kinerja semua komponen, utamanya barang konsumsi. Pada triwulan III 2025, impor barang konsumsi tercatat tumbuh 58,22% (yoY), berbalik arah dari kontraksi -84,98% (yoY) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.11) seiring dengan peningkatan impor komoditas kain ditenun berlapis dari Singapura. Di sisi lain, impor bahan baku dan barang modal mencatatkan perbaikan meskipun masih terkontraksi. Impor bahan baku dan barang modal masing-masing terkontraksi sebesar -44,72% (yoY) dan -80,97% (yoY), lebih baik dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya (Grafik 1.11). Perbaikan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan impor mesin dan peralatan tambang guna mendukung produksi konsentrat dan *smelting* tembaga.

1.3 PDRB SISI PENAWARAN

Dari sisi penawaran, perbaikan kinerja perekonomian NTB pada triwulan III 2025 dikontribusikan oleh akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan, khususnya sub-LU Industri Logam Dasar seiring peningkatan produksi katoda tembaga dan dimulainya produksi emas granula. LU Perdagangan tercatat mengalami peningkatan seiring perhelatan *event* nasional dan internasional. Adapun LU Pertanian tetap tumbuh positif seiring masuknya panen padi subround II. Sementara itu, kinerja LU Pertambangan juga mengalami perbaikan, walaupun masih mengalami kontraksi.

1.3.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap tumbuh kuat dan kembali menjadi sektor dengan pangsa paling besar yakni 22,92% terhadap ekonomi NTB pada triwulan III 2025. Kinerja LU Pertanian tercatat tumbuh sebesar 3,54% (yoY) pada triwulan III 2025, seiring berlangsungnya masa panen padi subround-II. Hal tersebut tecermin dari produksi gabah kering giling yang tumbuh 35,28% (yoY) pada triwulan III 2025 (Gambar 1.12). Lebih lanjut, kinerja positif LU Pertanian pada triwulan laporan juga didorong oleh peningkatan kinerja sub-LU hortikultura seiring berlangsungnya masa panen aneka cabai dan bawang merah (Gambar 1.13).

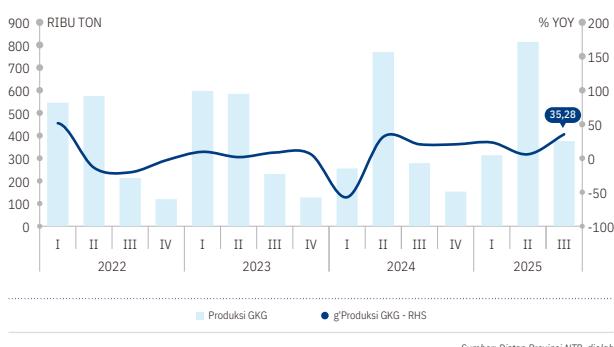
Tabel 1.2. Pertumbuhan PDRB NTB - Sisi Penawaran (%) , yoy)

Komponen	2024				2024	2025			
	I	II	III	IV		I	II	III	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-4,13	5,17	2,28	2,75	1,54	10,28	3,71	3,54	▼
Pertambangan dan Penggalian	12,48	46,00	18,05	-16,84	11,66	-30,14	-29,93	-21,53	▲
Industri Pengolahan	2,44	9,88	3,03	2,49	4,19	25,81	66,19	66,65	▲
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	6,50	4,76	9,37	16,29	9,08	11,66	0,05	4,72	▲
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,47	1,49	-3,20	0,61	0,77	2,54	3,25	5,34	▲
Konstruksi	9,46	0,12	-0,35	2,96	2,93	-1,52	5,57	5,59	▲
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,79	4,83	8,53	6,31	5,87	5,24	2,91	4,24	▲
Transportasi dan Pergudangan	4,63	4,40	4,57	3,27	4,21	1,96	4,03	2,51	▼
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,97	10,17	11,74	7,26	8,37	3,17	8,08	6,96	▼
Informasi dan Komunikasi	8,16	1,75	4,52	3,21	4,34	3,41	4,22	1,72	▼
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,34	18,64	10,82	-8,91	5,71	0,84	1,37	6,70	▲
Real Estate	3,89	3,12	3,56	5,50	4,02	2,73	3,53	3,59	▲
Jasa Perusahaan	4,95	5,45	5,61	4,98	5,24	4,84	4,20	3,15	▼
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,71	6,07	2,05	9,44	6,56	6,96	-2,04	6,62	▲
Jasa Pendidikan	4,16	1,95	2,98	4,81	3,47	2,94	0,89	0,76	▼
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,37	6,78	6,89	4,82	6,19	2,39	1,46	1,45	▼
Jasa lainnya	5,21	5,61	2,51	5,92	4,81	3,54	5,43	3,13	▼
PDRB Provinsi NTB	4,75	11,06	6,22	-0,50	5,30	-1,43	-0,82	2,82	▲

▲ Lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ▼ Lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ▶ Sama dengan triwulan sebelumnya

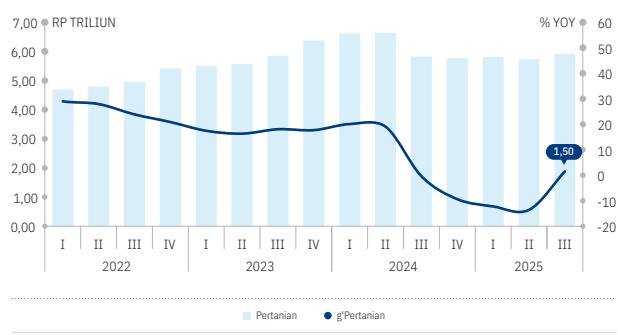
Sumber: BPS Provinsi NTB

Grafik 1.12 Produksi Gabah Giling Kering (GKG)



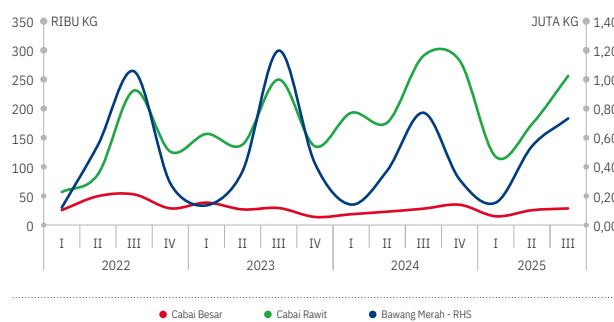
Sumber: Distan Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.14 Perkembangan Kredit Pertanian



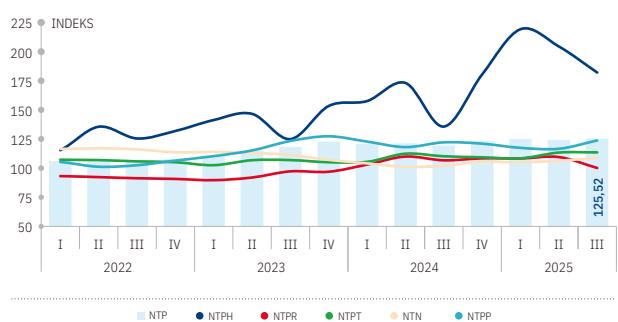
Sumber: Laporan Bank Umum (Lokasi Proyek)

Grafik 1.13 Produksi Komoditas Hortikultura Utama (Aneka Cabai dan Bawang Merah)



Sumber: Distan Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.15 Nilai Tukar Petani dan Komponennya



Sumber: BPS Provinsi NTB

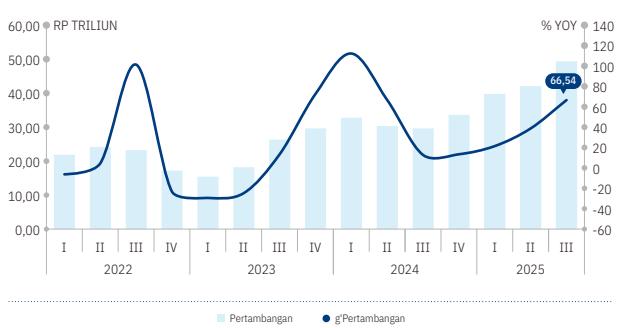
Lebih lanjut, kinerja positif LU Pertanian tercermin dari pertumbuhan kredit pertanian yang kembali positif 1,50% (yoy), setelah terkontraksi empat triwulan sebelumnya (Grafik 1.14). Sejalan dengan itu, nilai tukar petani (NTP) tercatat meningkat dari 116,62 pada triwulan II 2025 menjadi 123,75 pada triwulan III 2025 (Grafik 1.15). Peningkatan tersebut didorong oleh nilai tukar petani pangan (NTPP) seiring masuknya masa panen padi, serta peningkatan nilai tukar nelayan (NTN) seiring berlangsungnya masa panen garam. Meski demikian, peningkatan NTP yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan nilai tukar petani hortikultura (NTPH) akibat penurunan harga komoditas hortikultura seiring masuknya masa panen yang menyebabkan indeks yang diterima petani hortikultura menurun. Lebih lanjut, peningkatan nilai tukar pertani perkebunan rakyat (NTPR) mengalami penurunan akibat curah hujan yang lebih tinggi menyebabkan penurunan hasil panen tembakau.

1.3.2 Pertambangan dan Penggalian

LU Pertambangan dan Penggalian mengalami perbaikan, meskipun masih terkontraksi. Pada triwulan III 2025, LU Pertambangan mengalami kontraksi sebesar -21,53% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -29,93% (yoy) (Tabel 1.2). Perbaikan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya produksi konsentrat tembaga seiring pendalaman penambangan pada Fase 8, yang menghasilkan bijih dengan kadar konsentrat lebih tinggi. Selain itu, kenaikan produksi katoda tembaga serta dimulainya produksi emas granula turut memperkuat intensifikasi produksi konsentrat sebagai bahan baku utama proses hilirisasi.

Perbaikan kinerja LU Pertambangan tercermin pada kinerja kredit sektor tersebut. Pada triwulan III 2025, kredit pertambangan tumbuh 66,54% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 38,70% (yoy) (Grafik 1.16). Akselerasi ini terutama didorong oleh peningkatan kegiatan investasi serta pemeliharaan aset pertambangan seiring meningkatnya aktivitas operasional dan optimisme prospek kinerja ke depan.

Grafik 1.16 Perkembangan Kredit Pertambangan



Sumber: Laporan Bank Umum (Lokasi Proyek)

1.3.3 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

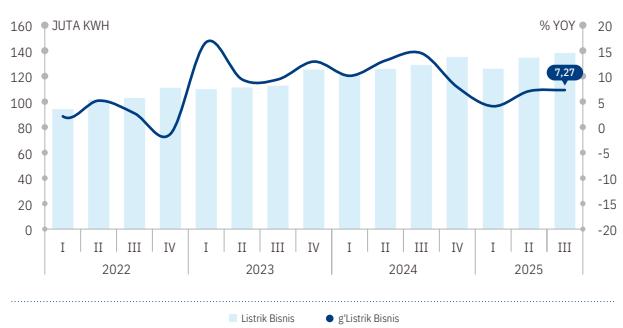
LU Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh positif dan meningkat pada triwulan III 2025. Berdasarkan data BPS, LU Perdagangan tercatat tumbuh sebesar 4,24% (yoy) pada triwulan III 2025, meningkat dibandingkan pertumbuhan 2,91% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Tabel 1.2). Kinerja positif LU Perdagangan ditopang oleh peningkatan event nasional dan internasional (seperti FORNAS dan MotoGP), serta momentum bulan Maulid yang mendorong kenaikan permintaan barang konsumsi, perlengkapan rekreasi, serta produk penunjang pariwisata.

Kinerja positif LU Perdagangan terkonfirmasi dari peningkatan kinerja penggunaan listrik sektor bisnis tumbuh dari 7,06% (yoy) pada triwulan II 2025 menjadi 7,27% (yoy) pada triwulan III 2025 (Grafik 1.17). Sejalan dengan itu, Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama menunjukkan peningkatan meskipun belum kembali ke level optimis (di atas 100). Pada triwulan III 2025, Indeks Pembelian Barang Tahan Lama tercatat sebesar 95,00, lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 94,50 (Grafik 1.18).

Lebih lanjut, kinerja penjualan kendaraan bermotor juga menunjukkan perbaikan, terutama pada kendaraan roda dua. Pada triwulan III 2025, penjualan roda dua meningkat dari 0,30% (yoy) pada triwulan II 2025 menjadi 2,83% (yoy) (Grafik 1.19). Sementara itu, penjualan kendaraan roda empat membaik dari kontraksi -11,64% (yoy) pada triwulan II 2025 menjadi -1,43% (yoy) pada triwulan III 2025.

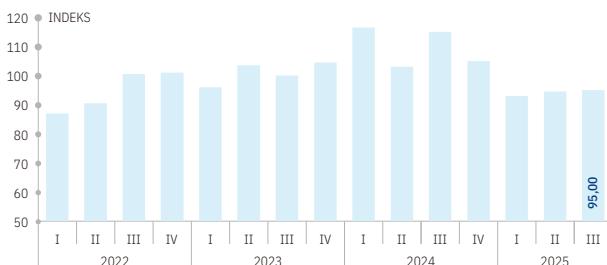
Meski demikian, pertumbuhan LU Perdagangan yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja kredit perdagangan yang terkontraksi. Berdasarkan Laporan Bank Umum, kredit perdagangan mengalami kontraksi -3,40% (yoy) pada triwulan III 2025, setelah sebelumnya tumbuh 1,20% (yoy) (Grafik 1.20). Hal ini mengindikasikan bahwa geliat konsumsi dan perdagangan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pembiayaan, mencerminkan kehati-hatian perbankan serta belum kuatnya permintaan pembiayaan dari pelaku usaha.

Grafik 1.17 Perkembangan Listrik Sektor Bisnis



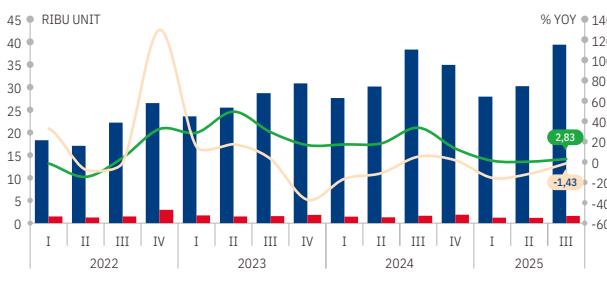
Sumber: PLN

Grafik 1.18 Indeks Pembelian Barang Tahan Lama



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.19 Perkembangan Penjualan Kendaraan Bermotor

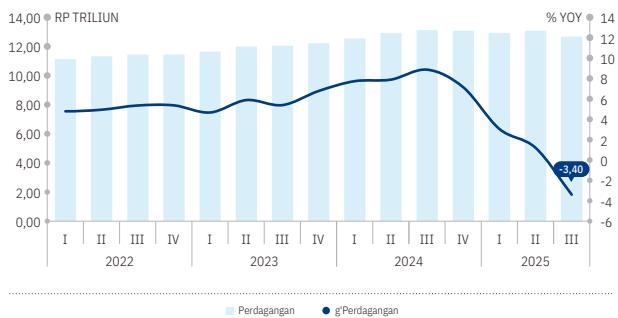


Sumber: Bappenda NTB (diolah)

1.3.4 Industri Pengolahan

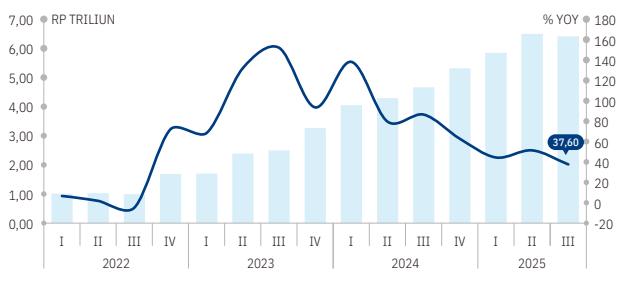
LU Industri Pengolahan menjadi kontributor utama perbaikan ekonomi NTB pada triwulan III 2025, dengan sumbangan 3,54 poin persen terhadap pertumbuhan ekonomi. LU ini juga mencatatkan pertumbuhan tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya, yakni 66,65% (yo) (Tabel 1.2). Akselerasi tersebut terutama ditopang oleh peningkatan produksi katoda tembaga serta dimulainya produksi emas granula melalui mesin precious metals refinery (PMR), yang merupakan produk olahan lanjutan dari proses smelting tembaga. Berdasarkan data BPS, ekspor katoda tembaga pada triwulan III 2025

Grafik 1.20 Perkembangan Kredit Perdagangan



Sumber: Laporan Bank Umum (Lokasi Proyek)

Grafik 1.21 Perkembangan Kredit Industri Pengolahan



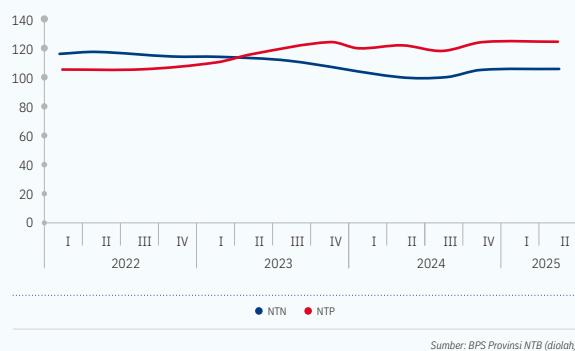
Sumber: Laporan Bank Umum (Lokasi Proyek)

senilai USD0,23 miliar, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar USD0,18 miliar (Grafik 1.9). Adapun ekspor komoditas emas memiliki nilai sebesar USD0,15 miliar yang dikirim ke negara Swis.

Di sisi lain, kinerja LU Industri Pengolahan yang lebih tinggi masih tertahan oleh kendala pada mesin smelter sehingga fasilitas belum dapat beroperasi secara penuh. Kondisi ini tercermin pada perlambatan kinerja kredit industri, yang melambat dari pertumbuhan 51,37% (yo) pada triwulan II 2025 menjadi 37,60% (yo) pada triwulan III 2025 (Grafik 1.21).

BOKS 1: Hilirisasi Sektor Perikanan NTB

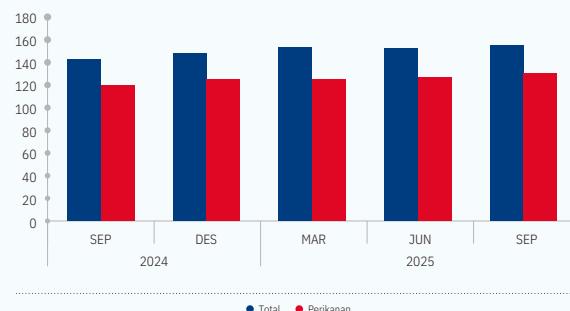
Grafik 1.1 Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)



Sektor perikanan merupakan sektor yang penting bagi Propinsi NTB karena merupakan sektor penopang ekspor, ketahanan pangan, dan lapangan kerja utama masyarakat terutama pesisir. Meskipun dengan adanya stabilitas nilai konsumsi sektor perikanan di Provinsi NTB, porsi ekspor komoditas perikanan NTB masih terbatas. Data ekspor September 2025 menunjukkan ikan dan udang hanya berkontribusi 2,85% terhadap total ekspor NTB. Komoditas unggulan seperti tuna dan udang telah memiliki pasar ekspor yang kuat sehingga perlu difokuskan pada peningkatan volume dan diversifikasi produk hilir. Penerapan hilirisasi makanan olahan hasil sektor perikanan dapat memperluas akses pasar ekspor dan memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB NTB.

Pdrb sektor pertanian dan perikanan --> sambungkan dengan NTP
Kinerja sektor perikanan yang relatif baik pada September 2025 berdasarkan data DJPB NTB. Hal ini sedikit berbeda dengan perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) yang turun dari 124,99 pada Triwulan-I menjadi 124,13 pada Triwulan-II 2025. Namun demikian, Nilai Tukar Nelayan (NTN) justru mencatat kenaikan tipis di angka 104,96 di Triwulan I menjadi 106,33 di Triwulan-II, menandakan perbaikan nilai tukar bagi nelayan. Dengan posisi NTP dan NTN yang masih berada di atas rata-rata nasional, kondisi pasar perikanan di NTB tetap terjaga.

Grafik 1.2 Indeks total yang diterima petani dan Indeks yang diterima petani sektor perikanan



Secara umum, sektor agrikultur NTB juga tumbuh signifikan dan memberikan efek rambatan positif ke sektor perikanan melalui penguatan rantai pasok. Sektor pertanian-perikanan perlu mendapat perhatian khusus mengingat perannya sebagai penopang ekonomi terbesar kedua setelah pertambangan, serta menyerap sekitar 35% tenaga kerja provinsi. Stabilitas sektor ini menjadi faktor penting bagi ketahanan ekonomi daerah.

Membaca indeks yang diterima petani dari grafik 1.x diatas secara total yang termasuk: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan (yoY) terus menunjukkan peningkatan yang menandakan kinerja sektor pertanian secara keseluruhan lebih stabil dan produktif. Sejalan dengan indeks yang diterima petani di sektor perikanan yang juga terus meningkat dari 118.83 ke 129.49 (yoY). Kondisi tersebut mengindikasikan kondisi pasar yang lebih menguntungkan bagi nelayan dan penguatan kinerja subsektor perikanan.

Memasuki Triwulan-III 2025, kondisi cuaca umumnya mendukung aktivitas penangkapan, meskipun potensi peningkatan gelombang di beberapa wilayah tetap perlu diantisipasi. Mengingat kontribusi nyata sektor perikanan terhadap lapangan kerja, produksi, dan perekonomian regional, terdapat ruang besar untuk meningkatkan nilai tambah melalui perluasan pasar ekspor dan percepatan hilirisasi yang sejalan dengan prioritas pemerintah daerah.



02

Keuangan Pemerintah

Secara nominal, realisasi pendapatan gabungan Pemerintah Pusat (APBN) dan Provinsi NTB (APBD) triwulan III 2025 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun persentase realisasi pendapatan terhadap pagu anggaran tahun 2025 untuk APBN, APBD Provinsi NTB, dan APBD Kabupaten/Kota masing-masing sebesar 70,92%, 74,44% dan 74,17%. Sementara secara spasial, realisasi pendapatan Kabupaten/Kota terhadap pagu anggaran tahun 2025 tertinggi adalah Kabupaten Sumbawa Barat (103,55%) dan terendah Kabupaten Bima (62,76%). Di sisi lain, realisasi belanja gabungan Pemerintah Pusat dan Provinsi NTB (termasuk kabupaten/kota) pada triwulan III 2025 tercatat mengalami sedikit peningkatan, dengan realisasi sebesar Rp35.018,70 miliar atau 63,98% dari target. Secara spasial, persentase realisasi penyerapan belanja tertinggi adalah Kabupaten Lombok Timur (66,32%), sedangkan terendah yaitu Kabupaten Sumbawa Barat (40,09%).

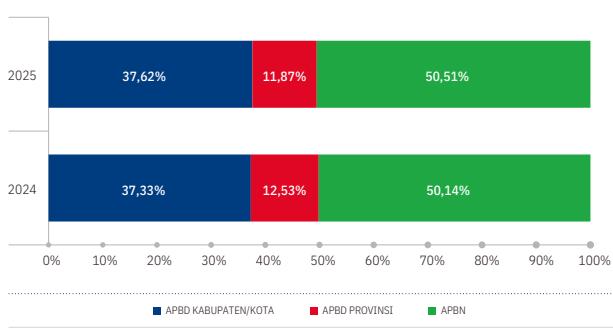
2.1 GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH

Pada tahun 2025, anggaran belanja Pemerintah secara agregat di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kenaikan. Anggaran belanja Pemerintah tercatat sebesar Rp54.732,21 miliar, tumbuh 1,16% (yoY) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp54.106,71 miliar. Berdasarkan Grafik 2.1, komposisi anggaran belanja Pemerintah didominasi oleh anggaran Pemerintah Pusat sebesar Rp27.644,54 miliar (pangsa 50,51%), kemudian diikuti oleh anggaran gabungan 10 Kabupaten/Kota di NTB (APBD Kabupaten/Kota) sebesar Rp20.591,01 miliar (pangsa 37,62%) dan anggaran Pemerintah Provinsi NTB (APBD Provinsi) sebesar Rp6.489,79 miliar (pangsa 11,87%).

Lebih lanjut, kinerja realisasi belanja Pemerintah di wilayah NTB tercatat mengalami peningkatan relatif kecil. Sampai dengan triwulan III 2025, realisasi total belanja Pemerintah di NTB mencapai Rp35.018,70 miliar atau tumbuh 0,08% (yoY) dibandingkan triwulan III 2024 yang sebesar Rp34.992,44 miliar. Hal tersebut didorong oleh realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota, dan belanja APBN yang masing-masing tumbuh sebesar 3,66 (yoY) dan 0,26% (yoY).

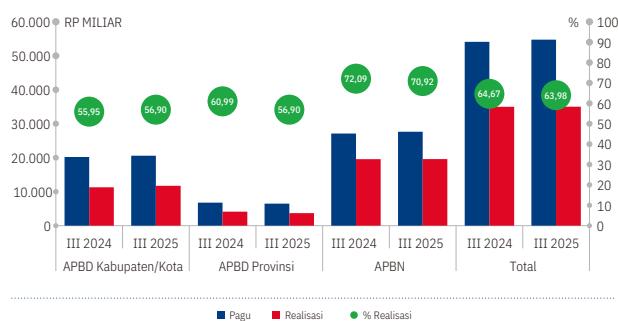
Realisasi belanja pemerintah secara nominal menunjukkan peningkatan, meskipun persentase realisasi terhadap pagu pada triwulan III 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya (Grafik 2.2). Persentase realisasi anggaran belanja hingga triwulan III 2025 mencapai 63,98%, atau sedikit di bawah capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 64,67%. Penurunan persentase tersebut terutama dipengaruhi oleh perlambatan realisasi belanja pada APBD Provinsi dan APBN Provinsi NTB. Pada level provinsi, realisasi belanja APBD tercatat sebesar 56,90%, menurun dibandingkan triwulan III 2024 yang sebesar 60,99%. Sementara itu, realisasi belanja APBN di wilayah NTB mencapai 70,92%, sedikit lebih rendah dari realisasi sebesar 72,09% triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, kabupaten/kota menunjukkan kinerja yang lebih baik, dengan persentase realisasi APBD yang meningkat dari 55,95% pada triwulan III tahun sebelumnya menjadi 56,90% pada triwulan III 2025, sehingga turut memberikan dorongan positif terhadap kinerja belanja daerah secara keseluruhan.

Grafik 2.1 Proporsi Pagu Belanja



Sumber: DJPb dan BPKAD Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.2 Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah di Provinsi NTB s.d. Triwulan III 2025



Sumber: DJPb dan BPKAD Provinsi NTB, diolah

2.2 APBD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada tahun 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun 2024. APBD Pemprov NTB terdiri dari anggaran pendapatan daerah sebesar Rp6.489,79 miliar atau turun -3,68% (yoY), serta anggaran belanja sebesar Rp6.496,66 miliar yang juga terpantau turun -4,16% (yoY). Secara keseluruhan tahun 2025 APBD Pemprov NTB diprakirakan mengalami defisit sebesar Rp6,88 miliar. Penetapan pagu APBD yang defisit tersebut diimbangi oleh pembiayaan daerah yang mengalami surplus dengan nilai nominal yang sama.

2.2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.2.1.1 Anggaran Pendapatan Daerah

Pada APBD tahun 2025, pagu anggaran pendapatan daerah Pemprov NTB ditetapkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel 2.1). Penurunan pagu anggaran terjadi pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -9,68% (yoY), sementara pos Pendapatan Transfer dianggarkan naik 7,15% (yoY). Adapun pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan target menjadi Rp182,05 miliar pada tahun 2025, setelah pada tahun sebelumnya tidak dianggarkan. Pos PAD mengalami penurunan dari Rp3.305,83 miliar pada APBD Perubahan tahun 2024 menjadi Rp2.809,27 miliar pada APBD Perubahan tahun 2025. Turunnya anggaran tersebut didorong oleh penurunan target pendapatan Pajak Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah masing-masing sebesar -15,02% (yoY), dan -80,19% (yoY). Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp1.675,04 miliar, turun dibandingkan target pada APBD Perubahan tahun 2024 yang sebesar Rp1.988,20 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh mulai berlakunya opos Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Meskipun menurut UU tersebut terdapat peluang tambahan dari opos Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), namun kontribusinya diperkirakan belum signifikan dalam jangka pendek untuk menaikkan jumlah pendapatan pajak. Adapun target Retribusi

Tabel 2.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Pemprov NTB

Uraian	Pagu APBD Provinsi NTB		% Perubahan	Realisasi APBD Provinsi NTB				Pertumbuhan Realisasi Tw III 2025 (% YOY)	
	2024	2025		Realisasi Tw-III 2024		Realisasi Tw-III 2025			
	Rp Miliar	Rp Miliar		Rp Miliar	% Pagu	Rp Miliar	% Pagu		
Pendapatan Daerah	6.737,76	6.489,79	-3,68	4.687,65	69,57	4.831,06	74,44	3,06	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.305,83	2.809,27	-15,02	2.197,61	66,48	1.984,92	70,66	-9,68	
Pajak Daerah	1.988,20	1.675,04	-15,75	1.344,88	67,64	1.206,26	72,01	-10,31	
Retribusi Daerah	795,58	956,28	20,20	472,29	59,36	619,71	64,80	31,21	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	80,90	90,58	11,97	79,90	98,77	90,58	100,00	13,37	
Lain-lain PAD Yang Sah	441,15	87,37	-80,19	300,54	68,13	68,37	78,26	-77,25	
Pendapatan Transfer	3.431,93	3.498,46	1,94	2.490,04	72,55	2.668,11	76,27	7,15	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.427,67	3.493,26	1,91	2.489,85	72,64	2.667,53	76,36	7,14	
Pendapatan Transfer Antardaerah	4,27	5,21	22,06	0,19	4,35	0,58	11,14	212,57	
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	182,05	0,00	0,00	0,00	178,03	97,79	0,00	
Pendapatan Hibah	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	1,35	25,18	0,00	
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	176,68	0,00	0,00	0,00	176,68	100,00	0,00	

Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

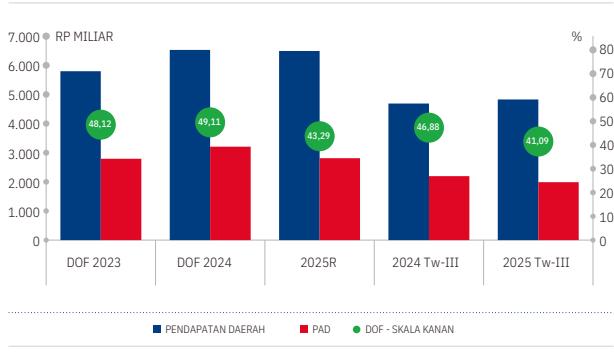
dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada APBD Provinsi tahun 2025 masing-masing naik sebesar 20,20% (yoY) dan 9,61% (yoY).'

Di sisi lain, pos Pendapatan Transfer menunjukkan proyeksi yang semakin optimis, dengan target meningkat dari Rp3.431,93 miliar pada APBD Perubahan 2024 menjadi Rp3.498,46 miliar pada APBD 2025. Kenaikan ini didukung oleh pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 1,91% (yoY) serta peningkatan signifikan pada Pendapatan Transfer Antardaerah yang ditargetkan naik 22,06% (yoY).

2.2.1.2 Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah Pemprov NTB tercatat meningkat secara nominal maupun persentase dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hingga triwulan III 2025, realisasi pendapatan daerah Pemprov NTB mencapai Rp4.831,06 miliar, atau tumbuh 3,06% (yoY).

Grafik 2.3 Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal APBD Provinsi NTB



dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4.687,65 miliar. Kinerja ini terutama didorong oleh peningkatan Pendapatan Transfer yang mencatat pertumbuhan 7,15% (yoY), dari Rp2.490,04 miliar pada triwulan III 2024 menjadi Rp2.668,11 miliar pada triwulan III 2025. Kenaikan yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar -9,68% (yoY) dari Rp2.917,61 miliar pada triwulan III 2024 menjadi Rp1.984,92 miliar pada triwulan III 2025. Di sisi lain, efektivitas pemanfaatan anggaran menunjukkan perbaikan, tercmin dari kenaikan persentase realisasi pendapatan terhadap pagu APBD dari 69,57% pada triwulan III 2024 menjadi 74,44% pada triwulan III 2025.

Lebih lanjut, Derajat Otonomi Fiskal (DOF) APBD Provinsi NTB pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 41,09%, mengalami penurunan dibandingkan triwulan III tahun sebelumnya yang sebesar 46,88% (Grafik 2.3). Hal tersebut disebabkan oleh pangsa realisasi Pendapatan Transfer terhadap realisasi Pendapatan Daerah pada triwulan III 2025 relatif mengalami peningkatan, yakni sebesar 55,23% dari sebelumnya sebesar 53,12% pada triwulan yang sama tahun 2024. Peningkatan porsi Pendapatan Transfer tersebut mencerminkan dukungan pemerintah pusat yang semakin kuat terhadap kapasitas fiskal Provinsi NTB.

2.2.2 Belanja Daerah APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.2.2.1 Anggaran Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah Pemprov NTB tahun 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel 2.2). Penurunan pagu anggaran belanja didorong oleh penurunan

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Pemprov NTB

Uraian	Pagu APBD Provinsi NTB		% Perubahan	Realisasi APBD Provinsi NTB				Pertumbuhan Realisasi Tw III 2025 (% YOY)	
	2024	2025		Realisasi Tw-III 2024		Realisasi Tw-III 2025			
	Rp Miliar	Rp Miliar		Rp Miliar	% Pagu	Rp Miliar	% Pagu		
Belanja Daerah	6.778,91	6.496,66	-4,16	4.134,45	60,99	3.696,42	56,90	-10,59	
Belanja Operasi	5.196,47	5.053,57	-2,75	3.316,77	63,83	3.004,03	59,44	-9,43	
Belanja Pegawai	2.397,76	2.484,53	3,62	1.629,62	67,96	1.686,99	67,90	3,52	
Belanja Barang dan Jasa	2.444,61	2.398,76	-1,88	1.372,74	56,15	1.176,93	49,06	-14,26	
Belanja Bunga	47,22	33,66	-28,72	34,06	72,14	30,08	89,36	-11,71	
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Belanja Hibah	299,10	131,67	-55,98	276,55	92,46	110,04	83,57	-60,21	
Belanja Bantuan Sosial	7,79	4,95	-36,45	3,80	48,83	0,00	0,00	-100,00	
Belanja Modal	601,64	587,93	-2,28	242,33	40,28	184,24	31,34	-23,97	
Belanja Modal Tanah	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	271,37	300,99	10,92	150,79	55,57	123,98	41,19	-17,78	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	232,86	127,37	-45,30	51,52	22,12	39,54	31,04	-23,25	
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	79,33	121,83	53,58	23,35	29,43	7,15	5,87	-69,35	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17,67	28,90	63,59	16,67	94,34	13,57	46,96	-18,58	
Belanja Modal Aset Lainnya	0,42	0,95	127,97	0,01	3,59	0,00	0,00	-100,00	
Belanja Tak Terduga	2,48	16,41	562,25	0,00	0,00	2,47	15,04	0,00	
Belanja Transfer	978,31	838,75	-14,27	575,34	58,81	505,68	60,29	-12,11	
Belanja Bagi Hasil	977,63	836,90	-14,39	575,03	58,82	505,37	60,39	-12,11	
Belanja Bantuan Keuangan	0,68	1,85	170,59	0,31	45,25	0,31	16,72	0,00	

Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

pada Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer yang masing-masing terkontraksi sebesar -2,75% (yoY), -2,28% (yoY), dan -14,27% (yoY). Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp5.053,57 miliar pada APBD 2025 dari sebelumnya sebesar Rp5.196,47 miliar pada APBD Perubahan 2024. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial yang masing-masing turun sebesar -1,88% (yoY), -28,72% (yoY), -55,98% (yoY), dan -36,45% (yoY). Belanja Barang dan Jasa (pangsa 49,16% terhadap Belanja Operasi) mengalami penurunan menjadi Rp2.398,76 miliar pada APBD 2025 dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.444,61 miliar. Adapun Belanja Pegawai tercatat dianggarkan naik 3,62% (yoY) dari Rp2.397,76 miliar pada APBD Perubahan 2024 menjadi Rp2.484,53 miliar pada APBD 2025.

Lebih lanjut, kenaikan anggaran belanja daerah terjadi pada pos Belanja Tak Terduga (BTT). Belanja Tak terduga tercatat mengalami peningkatan dari Rp2,48 miliar pada APBD Perubahan 2024 menjadi Rp16,41 miliar pada APBD 2025 atau naik sebesar 562,25% (yoY). Peningkatan ini guna menangani keadaan seperti bencana hidrometeorologi dan keadaan darurat lainnya, serta pengalokasian anggaran tambahan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

2.2.2.2 Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Pemprov NTB sampai dengan triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp3.696,42 miliar atau turun -10,59% (yoY) dibandingkan triwulan III tahun sebelumnya sebesar Rp4.134,45 miliar (Tabel 2.2). Penurunan terjadi pada hampir semua pos Belanja Daerah yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer. Pos Belanja Operasi tercatat mengalami kontraksi -9,43% (yoY) menjadi Rp3.004,03 miliar, menyumbang 81,27% dari total realisasi belanja APBD Provinsi. Sementara itu pos Belanja Modal dan Belanja Transfer masing-masing mengalami kontraksi -23,97% (yoY) dan -12,11% (yoY).

Realisasi Belanja Operasi triwulan III 2025 mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan dengan kontraksi realisasi seluruh komponennya kecuali pada Belanja Pegawai. Kontraksi realisasi pos Belanja Operasi terutama bersumber dari turunnya Belanja Barang dan Jasa yang menyumbang 39,18% dari total realisasi Belanja Operasi. Belanja Barang dan Jasa turun -14,26% (yoY) menjadi Rp1.176,93 miliar pada triwulan III 2025 dari Rp1.372,74 miliar pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Penurunan yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan Belanja Pegawai sebesar 3,52% (yoY) dari Rp1.629,62 miliar pada triwulan III 2024 menjadi Rp1.686,99 miliar pada triwulan III 2025.

2.3 APBD GABUNGAN 10 KABUPATEN/KOTA NUSA TENGGARA BARAT

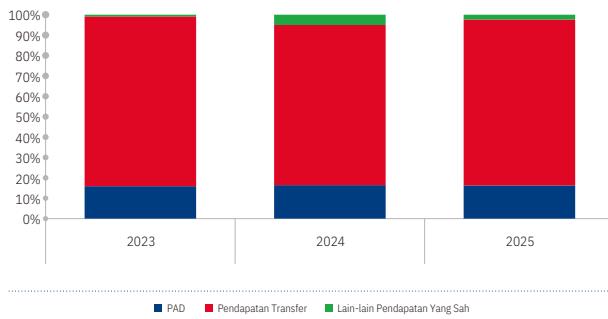
Pagu anggaran pendapatan APBD Kabupaten/Kota di NTB tahun 2025 tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, pendapatan APBD Kabupaten/Kota ditargetkan mencapai Rp19.957,85 miliar, lebih tinggi dibandingkan target tahun sebelumnya yang sebesar Rp19.859,25 miliar atau tumbuh 0,50% (yoY). Di sisi lain, target anggaran belanja APBD Kabupaten/Kota juga tumbuh dari Rp20.200,03 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp20.591,01 miliar pada tahun laporan, atau tumbuh sebesar 1,94% (yoY). Hal tersebut berdampak pada melebarnya defisit anggaran APBD Kabupaten/Kota dari yang sebelumnya sebesar Rp340,77 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp633,16 miliar pada tahun 2025. Secara spasial, kebijakan surplus anggaran tercatat pada Kab. Lombok Utara dan Kab. Lombok Tengah, sedangkan Kabupaten/Kota lainnya menargetkan adanya defisit anggaran.

2.3.1 Pendapatan Daerah APBD Gabungan Kabupaten/Kota

2.3.1.1 Anggaran Pendapatan Daerah

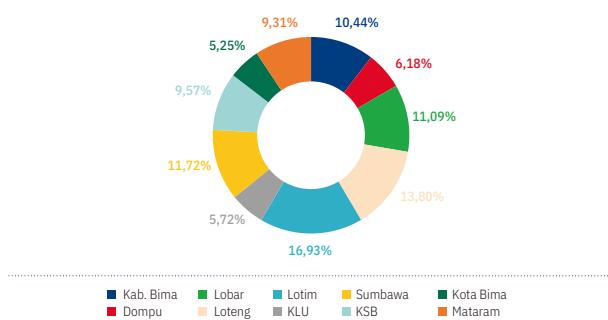
Anggaran total pendapatan daerah 10 Kabupaten/Kota di NTB pada tahun 2025 tercatat naik, seiring dengan naiknya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Anggaran total pendapatan daerah 10 Kabupaten/Kota di NTB sebesar Rp19.957,84 miliar, tumbuh

Grafik 2.4 Proporsi Komponen Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di NTB



Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.6 Proporsi Anggaran Pendapatan Daerah Spasial Kabupaten/Kota di NTB

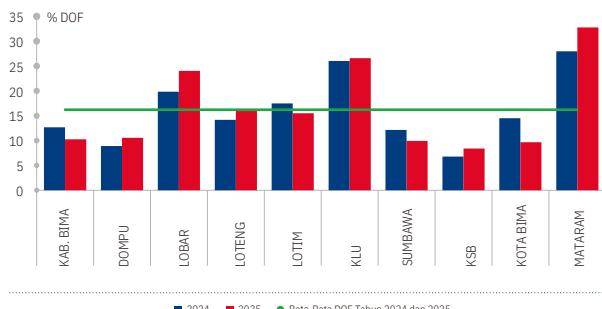


Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

0,50% (yoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp19.859,25 miliar (Tabel 2.3). Pendapatan Transfer serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing ditargetkan mengalami peningkatan 2,99% (yoY) dan 3,90% (yoY). Pendapatan Transfer tumbuh dari Rp15.776,84 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp16.247,37 miliar pada tahun laporan, sedangkan PAD meningkat menjadi Rp3.244,36 miliar pada tahun 2025 dari sebelumnya Rp3.122,51 miliar pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut, pos Lain-lain Pendapatan Yang Sah ditargetkan turun sebesar -51,44% (yoY). Penurunan pendapatan ini terutama bersumber dari turunnya target Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan masing-masing sebesar -72,99% (yoY) dan -48,62% (yoY).

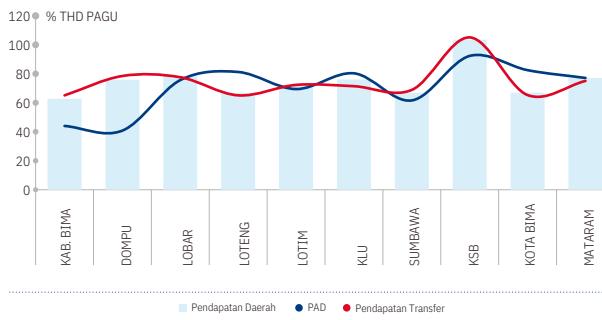
Anggaran pendapatan Kabupaten/Kota di NTB masih didominasi oleh Pendapatan Transfer (Grafik 2.4). Pada tahun 2025, pangsa Pendapatan Transfer dalam anggaran pendapatan total Kabupaten/kota di NTB tercatat sebesar 81,41%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 79,44%. Tingginya pangsa Pendapatan Transfer sejalan dengan perubahan aturan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam UU HKPD, yaitu adanya kenaikan persentase alokasi DBH yang diberikan ke daerah penghasil dan juga daerah pengolah dan daerah non-penghasil yang berbasan langsung. Sementara itu, pangsa PAD terhadap anggaran pendapatan total Kabupaten/Kota di NTB terpantau relatif meningkat dari 15,73% pada tahun 2024 menjadi 16,26% pada tahun 2025,

Grafik 2.5 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di NTB (berdasarkan anggaran)



Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.7 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di NTB sampai dengan Triwulan III 2025



Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB

Uraian	Pagu APBD Kab/kota		% Perubahan	Realisasi APBD Kabupaten/kota				Pertumbuhan Realisasi Tw III 2025 (% YOY)	
	2024	2025		Realisasi Tw-III 2024		Realisasi Tw-III 2025			
	Rp Miliar	Rp Miliar		Rp Miliar	% Pagu	Rp Miliar	% Pagu		
Pendapatan Daerah	19.859,25	19.957,85	0,50	14.016,05	70,58	14.803,14	74,17	5,62	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.122,51	3.244,36	3,90	2.159,55	69,16	2.357,89	72,68	9,18	
Pajak Daerah	1.039,24	1.424,27	37,05	735,04	70,73	1.110,24	77,95	51,04	
Retribusi Daerah	443,59	1.374,40	209,84	250,08	56,38	837,62	60,94	234,94	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	113,61	119,61	5,28	59,37	52,26	73,28	61,27	23,43	
Lain-lain PAD Yang Sah	1.526,07	326,08	-78,63	1.115,06	73,07	336,76	103,27	-69,80	
Pendapatan Transfer	15.776,84	16.247,37	2,98	11.036,12	69,95	11.979,59	73,73	8,55	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	14.779,45	15.560,70	5,29	10.474,18	70,87	11.486,91	73,82	9,67	
Pendapatan Transfer Antardaerah	997,40	686,67	-31,15	561,94	56,34	492,67	71,75	-12,33	
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	959,90	466,12	-51,44	820,38	85,46	465,66	99,90	-43,24	
Pendapatan Hibah	111,19	30,04	-72,99	15,71	14,13	2,87	9,56	-81,72	
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	26,71	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	848,71	436,08	-48,62	777,95	91,66	462,79	106,12	-40,51	

Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

sedangkan pangsa pos Lain-lain Pendapatan Yang Sah turun dari 4,83% pada tahun 2024 menjadi 2,34% pada tahun laporan. Peningkatan pangsa PAD mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah yang tercermin pada kenaikan DOF Kabupaten/Kota di NTB.

Secara rata-rata, DOF seluruh Kabupaten/Kota di NTB pada tahun 2025 tercatat mengalami peningkatan. DOF seluruh Kabupaten/Kota di NTB sebesar 16,20%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 15,72% (Grafik 2.5). Lebih lanjut, setengah dari jumlah Kabupaten/Kota memiliki DOF lebih tinggi dari rata-rata dan terkonsentrasi di Pulau Lombok, yaitu: Kota Mataram (32,76%), Kab. Lombok Utara (26,58%), Kab. Lombok Barat (24,02%), Kab. Lombok Tengah (15,93%), dan Kabupaten Lombok Timur (15,51%). Di sisi lain, Kab. Sumbawa Barat memiliki DOF terendah pada tahun 2025, yakni 8,41%. Kondisi tersebut disebabkan oleh tingkat ketergantungan terhadap dana Transfer Pemerintah Pusat yang tinggi seiring dengan perolehan Dana Bagi Hasil sektor pertambangan yang cukup signifikan.

Secara spasial, target anggaran pendapatan tertinggi dimiliki oleh Kab. Lombok Timur (Grafik 2.6). Pada tahun 2025, Kab. Lombok Timur menargetkan total anggaran pendapatan sebesar Rp3.378,43 miliar atau sebesar 16,93% dari total anggaran pendapatan Kabupaten/Kota di NTB. Kab. Lombok Timur merupakan wilayah terluas dan penduduk terbanyak di Provinsi NTB sehingga memiliki kebutuhan anggaran yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Selain itu, Kab. Lombok Timur merupakan salah satu sentra LU Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan di NTB dan juga memiliki tingkat kemandirian fiskal yang terbaik kelima di NTB (DOF: 15,51%). Di sisi lain, target pendapatan terendah pada tahun 2025

dimiliki oleh Kota Bima sebesar Rp1.047,22 miliar atau hanya sebesar 5,25% dari total anggaran pendapatan Kabupaten/Kota di NTB.

2.3.1.2 Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten/Kota di NTB sampai dengan triwulan III 2025 mengalami peningkatan secara nominal maupun persentase. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten/Kota di NTB sebesar Rp14.803,14 miliar atau 74,17% dari pagu anggaran (Tabel 2.3). Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024 yang memiliki realisasi pendapatan daerah sebesar Rp14.016,05 miliar atau 70,58% dari pagu anggaran. Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan realisasi pos PAD dan Pendapatan Transfer yang masing-masing tercatat tumbuh 9,18% (yoY) dan 8,55% (yoY). Kenaikan realisasi PAD terutama didorong oleh berlakunya opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang kini menjadi bagian dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan implementasi UU HKPD. Adapun penurunan terjadi pada pos Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang tercatat mengalami kontraksi sebesar -43,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kab. Sumbawa Barat tercatat sebagai daerah dengan persentase realisasi pendapatan daerah tertinggi. Sampai dengan triwulan III 2025, Kab. Sumbawa Barat telah merealisasikan hingga 103,55% dari anggaran pendapatan atau sebesar Rp1.977,13 miliar. Capaian tersebut didorong oleh realisasi pos Pendapatan Transfer sebesar Rp1.530,43 miliar yang memberikan kontribusi mencapai 77,41% dari total realisasi pendapatan. Di sisi lain, Kabupaten Bima mencatatkan persentase realisasi pendapatan daerah

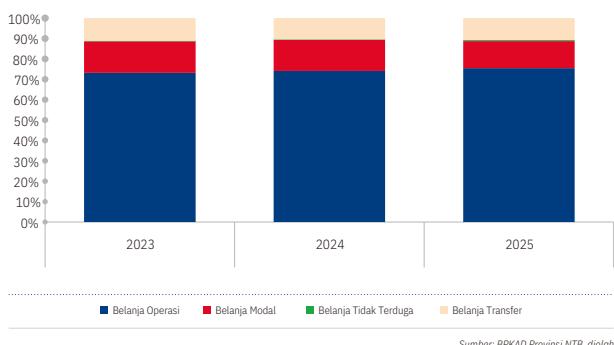
terendah pada triwulan III 2025, yakni 62,76% dari total anggaran pendapatan atau sebesar Rp1.307,72 miliar. Rendahnya realisasi pendapatan Kabupaten Bima sejalan dengan masih rendahnya pos Pendapatan Asli Daerah dan Pos Pendapatan Transfer. Pos Pendapatan Asli Daerah baru terealisasi sebesar 44,02% dari pagu, sementara pos Pendapatan Transfer baru mencatatkan realisasi sebesar 65,11% dari pagu. Selain itu, pos Lain-lain Pendapatan yang Sah juga menunjukkan capaian yang belum optimal dengan realisasi sebesar 56,59%.

2.3.2 Belanja Daerah APBD Gabungan Kabupaten/Kota

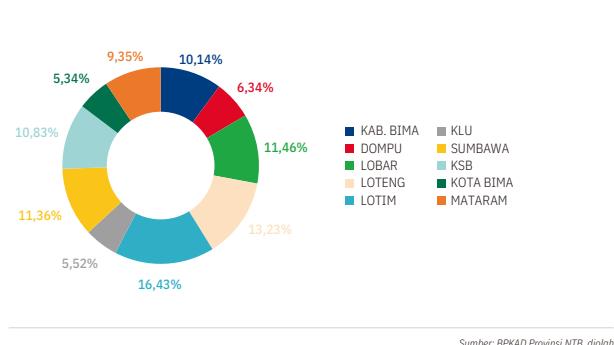
2.3.2.1 Anggaran Belanja Daerah

Anggaran total belanja daerah 10 Kabupaten/Kota di NTB pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp20.591,01 miliar atau tumbuh 1,94% (yoY) dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp20.200,03 miliar (Tabel 2.4). Kenaikan anggaran ini terutama bersumber dari kenaikan pada pos Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Masing-masing pos tersebut meningkat sebesar 3,87% (yoY), 54,82% (yoY), dan 5,80% (yoY). Pos Belanja Tak Terduga mengalami peningkatan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi bencana alam dan situasi darurat yang tidak terduga. Sementara itu, pos Belanja Modal mengalami penurunan sebesar -10,58% (yoY) dari Rp3.068,37 miliar pada APBD Perubahan tahun 2024 menjadi Rp2.735,45 miliar pada tahun laporan.

Grafik 2.8 Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota di NTB



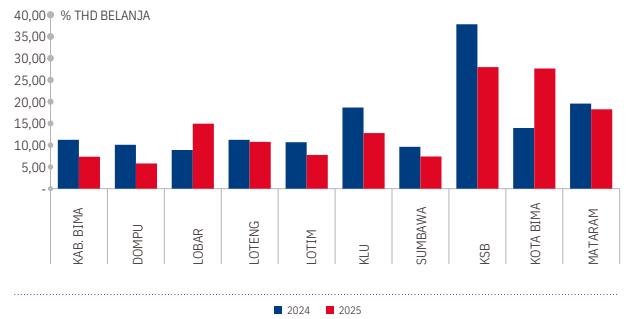
Grafik 2.10 Proporsi Anggaran Belanja Daerah Spasial Kabupaten/Kota di NTB



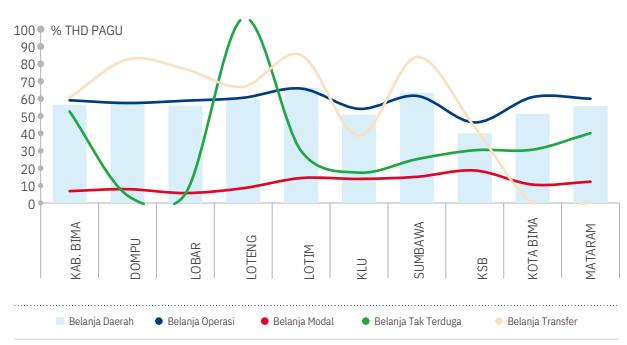
Anggaran belanja Kabupaten/Kota di NTB masih didominasi oleh Belanja Operasi (Grafik 2.8). Pada tahun 2025, pangsa Belanja Operasi dalam anggaran belanja total Kabupaten/Kota di NTB tercatat mencapai 75,44%, relatif meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,10%. Di sisi lain, pos Belanja Modal mengalami penurunan pangsa dari 15,19% pada tahun 2024 menjadi 13,28% pada tahun 2025. Penurunan pos Belanja Modal terjadi di hampir semua Kabupaten/kota di NTB kecuali di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Bima (Grafik 2.9) seiring dengan sudah terlaksananya pembelian aset di tahun sebelumnya dan tidak dianggarkan lagi pada tahun laporan. Di sisi lain, Pos Belanja Transfer juga relatif mengalami peningkatan pangsa dari 10,37% pada tahun 2024 menjadi 10,76% pada tahun laporan.

Secara spasial, target anggaran belanja tertinggi dimiliki oleh Kab. Lombok Timur (Grafik 2.10). Pada tahun 2025, Kab. Lombok Timur menargetkan total anggaran belanja sebesar Rp3.383,98 miliar atau sebesar 16,43% dari total anggaran belanja Kabupaten/Kota di NTB. Adapun anggaran belanja Kab. Lombok Timur terutama dialokasikan untuk Belanja Operasi (pangsa 78,40%). Tingginya anggaran belanja Kab. Lombok Timur tidak terlepas dari jumlah penduduk dan wilayahnya yang lebih luas dibandingkan daerah lain. Di sisi lain, target belanja terendah pada tahun 2025 adalah Kota Bima sebesar Rp1.099,70 miliar atau hanya sebesar 5,34% dari total anggaran belanja Kabupaten/Kota di NTB.

Grafik 2.9 Rasio Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di NTB



Grafik 2.11 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di NTB sampai dengan Triwulan III 2025



Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB

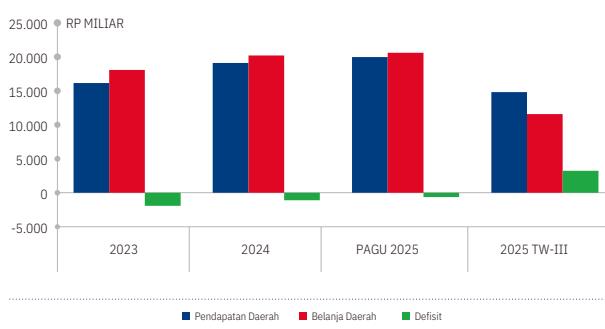
Uraian	Pagu APBD Kab/kota		% Perubahan	Realisasi APBD Kabupaten/kota				Pertumbuhan Realisasi Tw III 2025 (% YOY)	
	2024	2025		Realisasi Tw-III 2024		Realisasi Tw-III 2025			
	Rp Miliar	Rp Miliar		Rp Miliar	% Pagu	Rp Miliar	% Pagu		
Belanja Daerah	20.200,03	20.591,01	1,94	11.301,36	55,95	11.715,46	56,90	3,66	
Belanja Operasi	14.969,05	15.534,28	3,78	8.956,79	59,84	9.214,27	59,32	2,87	
Belanja Pegawai	8.049,09	8.935,87	11,02	5.294,87	65,78	5.739,18	64,23	8,39	
Belanja Barang dan Jasa	6.085,42	6.072,96	-0,20	3.119,43	51,26	3.192,77	52,57	2,35	
Belanja Bunga	19,39	9,87	-49,10	16,63	85,75	8,05	81,51	-51,61	
Belanja Subsidi	5,10	10,70	109,81	1,08	0,00	2,53	23,60	133,10	
Belanja Hibah	751,07	447,13	-40,47	494,32	65,82	250,93	56,12	-49,24	
Belanja Bantuan Sosial	58,98	57,74	-2,09	30,46	51,65	20,82	36,06	-31,65	
Belanja Modal	3.068,37	2.735,45	-10,85	939,54	30,62	900,82	32,93	-4,12	
Belanja Modal Tanah	229,84	168,75	-26,58	29,74	12,94	18,80	11,14	-36,77	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	651,23	677,06	3,97	215,96	33,16	239,32	35,35	10,82	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.031,09	1.039,64	0,83	275,29	26,70	337,61	32,47	22,64	
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.103,78	804,72	-27,09	410,21	37,16	288,92	35,90	-29,57	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	48,76	42,27	-13,31	8,09	16,59	15,70	37,13	94,10	
Belanja Modal Aset Lainnya	3,67	3,00	-18,15	0,26	6,98	0,47	15,76	84,76	
Belanja Tak Terduga	67,75	104,89	54,82	19,63	28,97	29,29	27,92	49,19	
Belanja Transfer	2.094,86	2.216,39	5,80	1.385,39	66,13	1.571,08	70,88	13,40	
Belanja Bagi Hasil	95,46	132,76	39,07	42,78	44,82	62,25	46,89	45,50	
Belanja Bantuan Keuangan	1.999,40	2.083,63	4,21	1.342,60	67,15	1.508,83	72,41	12,38	

Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

2.3.2.2 Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di NTB sampai dengan triwulan III 2025 tercatat tumbuh baik secara nominal maupun persentase (Tabel 2.4). Belanja daerah Kabupaten/Kota NTB sebesar Rp11.715,46 miliar atau meningkat 3,66% (yoY) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp11.301,36 miliar. Kinerja positif ini terutama ditopang oleh peningkatan pada pos Belanja Operasi, yang berkontribusi 78,65% terhadap total realisasi. Hingga triwulan III 2025, pos Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp9.214,27 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp8.956,79 miliar. Selain itu, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer turut mencatatkan pertumbuhan yang kuat, masing-masing sebesar 49,19% (yoY), dan 13,40% (yoY). Persentase realisasi belanja terhadap pagu APBD juga menunjukkan perbaikan, meningkat dari 55,95% pada triwulan III 2024 menjadi 56,90% pada triwulan III 2025. Sementara itu, Belanja Modal mengalami penyesuaian dari Rp939,54 miliar pada triwulan III 2024 menjadi Rp900,82 miliar pada triwulan III 2025 atau turun -4,12% (yoY).

Secara spasial, daerah dengan capaian persentase belanja tertinggi pada triwulan III 2025 adalah Kab Lombok Timur (Grafik 2.11). Hingga triwulan III 2025, realisasi belanja Kabupaten Lombok Timur tercatat sebesar Rp2.244,14 miliar atau 66,32% dari pagu. Capaian ini terutama ditopang oleh

Grafik 2.12 Perkembangan APBD Kabupaten/Kota di NTB

Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

serapan Belanja Operasi dan Belanja Transfer, masing-masing sebesar 65,81% dan 85,08% dari pagu. Sementara itu, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga mencatatkan realisasi sebesar 39,53% dan 29,95% dari pagu. Di sisi lain, Kab. Sumbawa Barat mencatatkan persentase realisasi belanja terkecil pada triwulan III 2025, yaitu 40,09% terhadap pagu atau Rp894,18 miliar. Rendahnya capaian serapan realisasi belanja di Kab. Sumbawa Barat sejalan dengan serapan semua pos belanja yang masih kecil. Pos Belanja Tidak Terduga dan Belanja Modal tercatat masing-masing baru terealisasi sebesar 30,34% dan 24,93% terhadap pagu, sedangkan pos Belanja Transfer baru terealisasi 43,64% terhadap pagu. Adapun pos Belanja Operasi

telah mencatatkan realisasi hingga 46,34% terhadap pagu yang didorong oleh realisasi komponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa masing-masing sebesar 58,85% dan 36,53% terhadap pagu.

2.4 APBN DI NUSA TENGGARA BARAT

2.4.1 Anggaran Belanja APBN

Anggaran belanja APBN di NTB pada tahun 2025 mengalami sedikit peningkatan. Anggaran belanja APBN tercatat sebesar Rp27.644,54 miliar, meningkat 1,90% (yoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp27.127,78 miliar (Tabel 2.5). Berdasarkan peruntukannya, peningkatan anggaran APBN disebabkan oleh meningkatnya anggaran Belanja Transfer ke Daerah sebesar 12,22% (yoY) atau sebesar Rp19.671,75 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp17.529,66 miliar. Peningkatan tersebut didorong oleh Dana Alokasi Umum yang mendominasi anggaran belanja Transfer ke Daerah tercatat meningkat 5,10% (yoY) dari Rp10.202,14 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp10.722,80 miliar pada tahun laporan. Selain itu, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah tercatat mengalami peningkatan masing-masing sebesar 193,37% (yoY) dan 1.760,26% (yoY). Peningkatan pos belanja tersebut guna melanjutkan pemerataan pembangunan antardaerah dan antarsektor. Adapun Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non-fisik, Dana Desa, dan Hibah ke Daerah tercatat mengalami penurunan masing-masing sebesar -60,25% (yoY), -97,02% (yoY), -4,10% (yoY), dan -78,86% (yoY).

Lebih lanjut, anggaran Belanja Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar -16,93% (yoY), dari Rp9.598,11 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp7.972,79 miliar pada tahun

laporan. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan anggaran komponen Belanja Barang dan Belanja Modal yang masing-masing turun sebesar -26,39% (yoY) dan -33,21% (yoY). Penurunan komponen Belanja Modal tersebut sejalan dengan telah selesainya Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun sebelumnya serta tidak adanya PSN yang dilaksanakan pada tahun 2025. Di sisi lain, anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial terpantau meningkat masing-masing sebesar 2,44% (yoY) dan 14,01% (yoY) dibandingkan tahun sebelumnya.

2.4.2 Realisasi Belanja APBN di Nusa Tenggara Barat

Realisasi belanja APBN di NTB sampai dengan triwulan III 2025 menunjukkan kinerja yang tetap kuat. Realisasi tercatat sebesar Rp19.606,81 miliar atau 70,92% dari pagu anggaran (Tabel 2.5). Dibandingkan triwulan III 2024, capaian tersebut lebih tinggi 0,26% (yoY) atau sebesar Rp19.606,81 miliar. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh peningkatan Realisasi Belanja Transfer ke Daerah seiring dengan meningkatnya pagu anggaran. Pada triwulan III 2025, Transfer ke Daerah tercatat sebesar Rp14.773,28 miliar, tumbuh 12,00% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp13.190,00 miliar. Kenaikan tersebut didorong oleh pertumbuhan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah yang masing-masing meningkat 204,67% (yoY), 5,75% (yoY) dan 2.231,86% (yoY). Adapun Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non-fisik, Dana Desa, serta Hibah ke Daerah tercatat mengalami penurunan -68,56% (yoY), -97,42% (yoY), -6,22% (yoY) dan -80,06% (yoY).

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di NTB

Uraian	Pagu APBN Provinsi NTB		% Perubahan	Realisasi APBN Provinsi NTB				Pertumbuhan Realisasi Tw III 2025 (% YOY)	
	2024	2025		Realisasi Tw-III 2024		Realisasi Tw-III 2025			
	Rp Miliar	Rp Miliar		Rp Miliar	% Pagu	Rp Miliar	% Pagu		
Belanja Daerah	27.127,78	27.644,54	1,90	19.556,63	72,09	19.606,81	70,92	0,26	
Belanja Pemerintah Pusat	9.598,11	7.972,79	-16,93	6.366,63	66,33	4.833,53	60,63	-24,08	
Belanja Pegawai	3.569,20	3.656,46	2,44	2.700,60	75,66	2.885,17	78,91	6,83	
Belanja Barang	4.085,70	3.007,49	-26,39	2.579,01	63,12	1.417,44	47,13	-45,04	
Belanja Modal	1.920,06	1.282,45	-33,21	1.067,15	55,58	508,76	39,67	-52,33	
Bantuan Sosial	23,16	26,40	14,01	19,86	85,78	22,17	83,97	11,60	
Transfer ke Daerah	17.529,66	19.671,75	12,22	13.190,00	75,24	14.773,28	75,10	12,00	
Dana Bagi Hasil	1.263,76	3.707,44	193,37	836,46	66,19	2.548,45	68,74	204,67	
Dana Alokasi Umum	10.202,14	10.722,80	5,10	8.173,29	80,11	8.643,54	80,61	5,75	
Dana Alokasi Khusus Fisik	1.707,33	678,63	-60,25	839,69	49,18	264,01	38,90	-68,56	
Dana Insentif Daerah	180,33	3.354,66	1.760,26	97,10	53,85	2.264,26	67,50	2.231,86	
Dana Alokasi Khusus Non-fisik	2.926,00	87,28	-97,02	2.142,03	73,21	55,19	63,23	-97,42	
Dana Desa	1.145,90	1.098,92	-4,10	1.053,89	91,97	988,36	89,94	-6,22	
Hibah ke Daerah	104,20	22,02	-78,86	47,54	45,62	9,48	43,05	-80,06	

Sumber: DJPb Provinsi NTB, diolah

Lebih lanjut, penurunan realisasi anggaran terjadi pada Belanja Pemerintah. Belanja Pemerintah tercatat yang mengalami kontraksi sebesar -24,08% (yoY), terutama akibat penurunan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal yang masing-masing mengalami kontraksi -45,04% (yoY) dan -52,33% (yoY). Penurunan ini sejalan dengan penurunan pagu dan efisiensi belanja pemerintah sebagaimana diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 yang menyebabkan pemerintah lebih selektif dalam realisasi anggaran. Selain itu, tidak adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) di NTB pada tahun 2025 turut menekan realisasi Belanja Modal. Kendati demikian, penurunan yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial yang masing-masing tumbuh sebesar 6,83% (yoY) dan 11,60% (yoY).







03

Keuangan Inflasi Daerah

➤ Gabungan kota perhitungan inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan III 2025 mengalami inflasi sebesar 2,69% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (2,51%; yoy). Inflasi tahunan utamanya bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,28% (yoy) dengan sumbangan sebesar 1,54% (yoy). Di sisi lain, kenaikan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh Kelompok Transportasi yang mengalami deflasi sebesar -0,29% (yoy) dan andil -0.03% (yoy).

Pada triwulan IV 2025, tekanan inflasi diperkirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring dengan masuknya Hari Natal dan tahun baru. serta berakhirnya masa panen sub-round II yang berpotensi meningkatkan tekanan pada kelompok pangan strategis. Lebih lanjut, untuk keseluruhan tahun 2025, inflasi diperkirakan tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran $2,5\pm1\%$.

3.1 PERKEMBANGAN INFLASI IHK GABUNGAN KOTA DI PROVINSI NTB TRIWULAN III 2025

Pada triwulan III 2025, Gabungan Kota Perhitungan Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatatkan inflasi sebesar 2,69% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (2,51%; yoy) (Grafik 3.1). Tekanan inflasi didorong oleh kenaikan tekanan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,28% (yoy) dengan sumbangan 1,54% (yoy) sejalan dengan tingginya permintaan selama HBKN Maulid Nabi yang dirayakan selama satu bulan penuh. Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama adalah daging ayam ras andil 0,18% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya turut mendorong tekanan inflasi yang lebih tinggi dengan andil sebesar 0,75% (yoy). Tekanan inflasi utamanya disumbang komoditas emas perhiasan sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian global. Disisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada Kelompok Transportasi sebesar -0,29% (yoy). Deflasi yang terjadi pada kelompok tersebut sejalan dengan normalisasi tarif angkutan udara *post peak demand* liburan sekolah.

Secara spasial, seluruh Kota/ Kabupaten yang dihitung Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami tekanan inflasi. Namun demikian, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa mengalami tekanan inflasi yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Disisi lain, tekanan inflasi Kota Mataram tercatat meningkat dari triwulan sebelumnya (Tabel 3.3). Inflasi tertinggi terjadi di Kota Mataram 3,01% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 2,14% (yoy). Tekanan inflasi di Kota Mataram utamanya disumbangkan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (andil 1,97%;yoy) dan Kelompok Perawatan

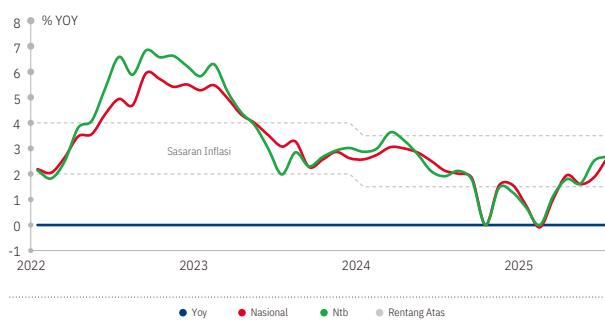
Tabel 3.3. Inflasi Tahunan Kab/Kota di Provinsi NTB

Kota IHK	2025		
	I	II	III
Kota Mataram	1,50	2,14	3,01
Kota Bima	1,13	2,44	1,78
Kabupaten Sumbawa (Kab. IHK baru)	0,68	3,02	2,59

Sumber: BPS, diolah

Pribadi dan Jasa Lainnya (andil 0,67%;yoy). Sejalan dengan Kota Mataram, inflasi di Kabupaten Sumbawa dengan inflasi 2,59% (yoy). Tekanan inflasi di Kabupaten Sumbawa utamanya didorong oleh kenaikan pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil masing-masing sebesar 1,36%(yoy) dan 0,81% (yoy). Tekanan inflasi tersebut mendorong Kabupaten Sumbawa menjadi Kota/ Kabupaten dengan tekanan inflasi tertinggi kedua di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lebih lanjut, Kota Bima juga mengalami inflasi (1,78%;yoy) meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi Kota Bima utamanya disumbangkan oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (andil 0,86%;yoy) dan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (andil 0,50%;yoy).

Grafik 3.1 Inflasi Tahunan Provinsi NTB dan Nasional



Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.1. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan

DES-24		MAR-25		JUN-25		SEP-25	
Komoditas	%Andil	Komoditas	%Andil	Komoditas	%Andil	Komoditas	%Andil
Ikan Layang	0,09	Tarif Listrik	1,35	Tomat	0,19	Daging Ayam Ras	0,19
Bawang Merah	0,06	Cabai Rawit	0,29	Ikan Layang	0,12	Emas Perhiasan	0,09
Cumi-Cumi	0,06	Ikan Teri	0,15	Cabai Rawit	0,06	Pisang	0,04
Cabai Merah	0,06	Emas Perhiasan	0,08	Cumi-Cumi	0,06	Cumi-Cumi	0,03
Daging Ayam Ras	0,04	Daging Ayam Ras	0,06	Angkutan Udara	0,04	Kol Putih/ Kubis	0,03

Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.2. Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan

DES-24		MAR-25		JUN-25		SEP-25	
Komoditas	%Andil	Komoditas	%Andil	Komoditas	%Andil	Komoditas	%Andil
Angkutan Udara	-0,05	Angkutan Udara	-0,11	Daging Ayam Ras	-0,10	Bawang Merah	-0,15
Jeruk Nipis	-0,02	Ikan Layang/ Ikan Benggol	-0,04	Bawang Putih	-0,03	Tomat	-0,07
Ayam Hidup	-0,01	Cabai Merah	-0,03	Angkutan Laut	-0,02	Ikan Layang/ Ikan Benggol	-0,06
Jagung Manis	-0,01	Tomat	-0,03	Jeruk	-0,01	Angkutan Udara	-0,04
Kol Putih/Kubis	-0,01	Bayam	-0,03	Bensin	-0,01	Cabai Rawit	-0,03

Sumber: BPS, diolah

3.1.1 Inflasi Berdasarkan Kelompok

Sumber utama tekanan inflasi pada triwulan III 2025 berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (andil 1,54%;yoY) (Tabel 3.4) yang mengalami kenaikan inflasi dari 3,36% (yoY) pada triwulan sebelumnya menjadi 4,28% (yoY). Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disumbangkan oleh subkelompok makanan dengan tekanan inflasi 1,20% (yoY), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 0,92% (yoY). Adapun komoditas yang mendorong tekanan inflasi pada subkelompok tersebut adalah daging ayam ras (andil 0,21%;yoY) sejalan dengan meningkatnya permintaan selama perayaan HBKN Maulid Nabi. Sejalan dengan hal tersebut, ikan teri, bawang merah, cabai merah Lebih lanjut, penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) beras pada Agustus 2025 mendorong kenaikan inflasi beras pada triwulan III sebesar 0,14% (yoY) dari 0,11% (yoY) pada triwulan sebelumnya.

Selanjutnya, subkelompok rokok dan tembakau mendorong tekanan inflasi yang lebih tinggi pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Subkelompok rokok dan tembakau pada triwulan III 2025 tercatat memberikan andil inflasi sebesar 0,23% (yoY). Kenaikan harga komoditas pada subkelompok tersebut sejalan dengan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 4%-22% pada tahun 2025, yang berdampak pada kenaikan harga rokok secara gradual. Pada triwulan III 2025, komoditas Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,12% (yoY), 0,05% (yoY), dan 0,03% (yoY).

Selanjutnya, tekanan inflasi pada triwulan III 2025 juga didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami inflasi tahunan sebesar 12,54% (yoY) dengan sumbangan sebesar 0,75% (yoY). Tekanan inflasi tersebut tercatat meningkat dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar 12,30% (yoY). Tekanan inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya utamanya didorong oleh komoditas emas perhiasan dengan andil 0,67% (yoY). Meningkatnya harga komoditas emas perhiasan sejalan dengan meningkatnya harga emas global sebesar 39,63% (yoY) dari USD2.476/oz menjadi USD3.458/oz, seiring dengan berlanjutnya ketidakpastian global pasca pengumuman kenaikan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang sehingga meningkatkan permintaan investor terhadap emas sebagai aset *safe haven*.

Disisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada Kelompok Transportasi -0,29% (yoY), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,09% (yoY). Deflasi pada Kelompok Transportasi utamanya disumbang angkutan udara sebesar -0,04% (yoY) seiring dengan penurunan tarif angkutan udara yang disebabkan normalisasi permintaan *post-peak demand* pada periode sebelumnya.

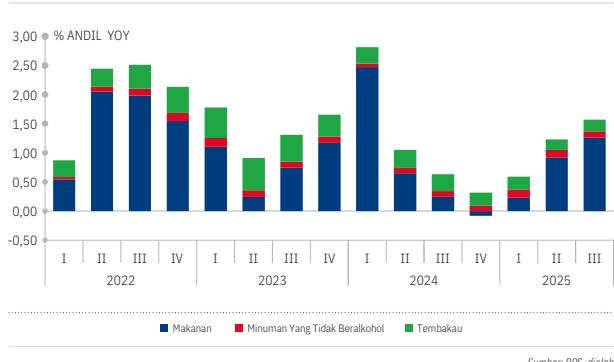
3.1.1.1 Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Pada triwulan III 2025, Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau mengalami kenaikan tekanan inflasi secara tahunan sebesar 4,28% (yoY) dengan andil 1,54% (yoY). Kondisi ini utamanya didorong oleh kenaikan tekanan inflasi pada subkelompok makanan yang menyumbangkan tekanan inflasi sebesar 1,20% (yoY) meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,92% (yoY). Selanjutnya, subkelompok yang turut mendorong tekanan inflasi lebih tinggi adalah rokok dan tembakau dengan andil sebesar 0,23% (yoY), diikuti subkelompok minuman yang tidak beralkohol dengan andil 0,12% (yoY) (Grafik 3.2). Secara khusus, kenaikan inflasi kelompok ini berdampak signifikan pada peningkatan inflasi seiring dengan pangannya yang mencapai 36,13% dari total Nilai Konsumsi

Tabel 3.4. Inflasi Tahunan Provinsi NTB Berdasarkan Kelompok

Kelompok	2024				2025		
	I	II	III	IV	I	II	III
Umum	3,63	2,12	1,77	1,28	1,15	2,51	2,69
Makanan, Minuman, & Tembakau	7,82	2,90	1,74	0,63	1,56	3,36	4,28
Pakaian & Alas Kaki	2,14	1,41	1,32	1,30	1,81	1,68	1,01
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	1,26	1,68	1,59	1,26	-3,50	0,73	0,71
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	0,70	0,40	0,17	0,67	0,62	-0,24	-0,54
Kesehatan	0,70	0,51	1,10	1,99	2,63	2,88	2,01
Transportasi	1,06	1,65	1,24	-0,08	-0,05	0,09	-0,29
Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	-0,71	-0,91	-0,97	-1,00	-0,75	-0,59	-0,45
Rekreasi, Olahraga, & Budaya	1,67	1,81	2,09	2,01	1,98	1,66	1,57
Pendidikan	1,18	1,25	3,82	3,82	3,82	4,16	2,64
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	2,20	2,60	1,91	1,83	1,76	1,58	1,58
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	2,20	4,76	6,37	7,69	10,46	12,30	12,54

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.2 Andil Inflasi Kelompok Mamin Tembakau Per Subkelompok

Sumber: BPS, diolah

(NK) Provinsi NTB berdasarkan SBH 2022. Adapun pada triwulan III 2025, komoditas yang turut memberikan andil inflasi diantaranya daging ayam ras, bawang merah, ikan teri, beras, dan minyak goreng.

Subkelompok Makanan menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau di triwulan III 2025. Inflasi didorong oleh komoditas daging ayam ras yang memberikan andil inflasi 0,21% (yo). Kenaikan harga daging ayam ras sejalan dengan meningkatnya permintaan selama perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Maulid Nabi yang dirayakan selama satu bulan penuh di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan tracking PIHPS harga daging ayam meningkat 21,14% (yo) atau dari rata-rata Rp35.190/kg menjadi Rp42.629/kg pada September 2025. Kenaikan harga daging ayam ras secara tahunan didorong oleh kenaikan harga pakan seiring dengan meningkatnya harga bahan baku pakan. Adapun, berakhirnya masa panen padi subround II serta penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 299 Tahun 2025 tanggal 22 Agustus 2025 tentang Penetapan Harga Eceran tertinggi Beras dari Rp13.500/kg menjadi Rp14.900/kg mendorong tekanan inflasi yang lebih tinggi untuk komoditas beras dengan andil 0,14% (yo), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 0,11% (yo).

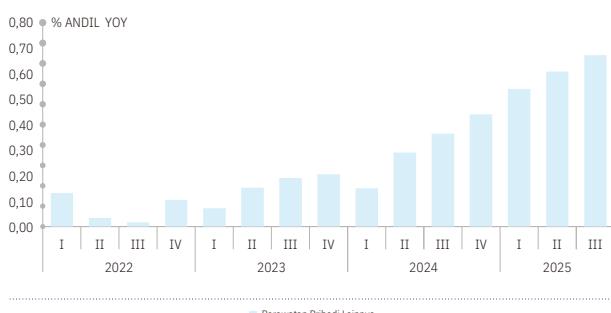
Selanjutnya, subkelompok rokok dan tembakau menjadi penyumbang inflasi tertinggi kedua pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau di triwulan III 2025. Inflasi disumbang oleh Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret

Kretek Tangan (SKT), dan Sigaret Putih Mesin (SPM) yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,12% (yo), 0,05% (yo), dan 0,03% (yo). Kenaikan harga terjadi sejalan dengan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 4%-22% pada tahun 2025 yang berdampak terhadap kenaikan harga rokok secara gradual sepanjang tahun.

Disisi lain, tekanan subkelompok minuman yang tidak beralkohol tercatat 0,11% (yo), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 0,13% (yo). Tekanan inflasi pada subkelompok minuman yang tidak beralkohol utamanya disumbang oleh komoditas kopi bubuk (andil 0,06%;yo) dan air kemasan (andil 0,03%;yo) sejalan dengan tingginya permintaan selama perayaan HBKN Maulid Nabi yang dirayakan selama satu bulan penuh di Nusa Tenggara Barat.

3.1.1.2 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya turut menyumbang tekanan inflasi pada periode laporan dengan andil 0,75% (yo). Inflasi tahunan kelompok ini tercatat sebesar 12,54% (yo), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (12,30%; yo). Komoditas utama penyumbang inflasi kelompok ini adalah emas perhiasan dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,67% (Tabel 3.6). Secara global, harga emas terpantau masih mengalami peningkatan dari USD2.476/oz menjadi USD3.458/oz sejalan dengan ketidakpastian global pasca pengumuman kenaikan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sehingga meningkatkan permintaan investor terhadap emas sebagai aset safe haven.

Grafik 3.3 Andil Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Subkelompok Perawatan Pribadi Lainnya

Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.5. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Mamin Tembakau

Komoditas	Sep-25
	% Andil (yo)
DAGING AYAM RAS	0,21
BAWANG MERAH	0,17
IKAN TERI	0,16
BERAS	0,14
SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	0,12

Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.6. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Komoditas	Sep-25
	% Andil (yo)
EMAS PERHIASAN	0,67
SABUN MANDI	0,03
PASTA GIGI	0,02
DEODORANT	0,01
PEMBALUT WANITA	0,01

Sumber: BPS, diolah

3.1.1.3 Kelompok Transportasi

Kelompok Transportasi tercatat mengalami deflasi tahunan sebesar -0,29% (yoY) pada periode laporan dengan andil -0,03% (yoY) (Tabel 3.4). Deflasi pada Kelompok Transportasi utamanya disumbangkan angkutan udara sebesar -0,04% (yoY) seiring dengan penurunan tarif angkutan udara yang disebabkan normalisasi permintaan post-peak demand pada periode sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, komoditas bensin juga turut menyumbang deflasi dengan andil -0,02% (yoY). Menurunnya harga bensin sejalan dengan trend penurunan harga minyak dunia akibat adanya sinyal kenaikan produksi minyak sebanyak 548.000 barrel per hari oleh OPEC+ yang meningkatkan risiko *oversupply*. Disisi lain, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh inflasi pada komoditas mobil dan sepeda motor dengan andil sebesar 0,03% (yoY).

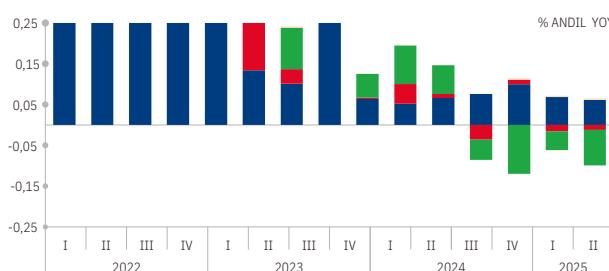
Tabel 3.7. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Pendidikan

Komoditas	Sep-25
	% Andil (yoY)
AKADEMI/PERGURUAN TINGGI	0,07
BIMBINGAN BELAJAR	0,02
SEKOLAH DASAR	0,01
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	0,01
SEKOLAH MENENGAH ATAS	0,01

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan komoditasnya, tarif angkutan udara memberikan sumbangan deflasi tertinggi dengan andil 0,09% (yoY) (Tabel 3.7). Penurunan tarif angkutan udara sejalan dengan normalisasi permintaan pasca *post-peak demand* selama liburan sekolah. Berdasarkan *tracking* Survei Pemantauan Harga (SPH), tarif angkutan udara untuk rute penerbangan LOP-CGK mengalami penurunan 6,60% (mtm). Sejalan dengan tarif angkutan udara, beberapa jenis bahan bakar mesin (BBM) juga menunjukkan penurunan, yaitu Pertamina Turbo Rp13.100/liter (dari Rp13.200/liter), Dexlite Rp13.600/liter (dari Rp13.850/liter), dan Pertamina Dex Rp13.850/liter (dari Rp14.150/liter). Penurunan harga BBM sejalan dengan meningkatnya trend penurunan harga minyak dunia akibat adanya sinyal kenaikan produksi minyak sebanyak 548.000 barrel per hari oleh OPEC+ yang meningkatkan risiko *oversupply*.

Grafik 3.4 Andil Inflasi Kelompok Transportasi Per Subkelompok



■ Pembelian Kendaraan ■ Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi ■ Jasa Angkutan Penumpang ■ Jasa Pengiriman Barang

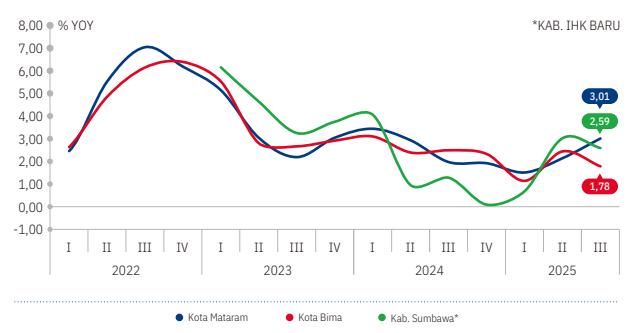
Sumber: BPS, diolah

3.2 INFLASI KOTA PANTAUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Secara spasial, seluruh Kota/ Kabupaten yang dihitung Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami tekanan inflasi. Namun demikian, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa mengalami tekanan inflasi yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Disisi lain, tekanan inflasi Kota Mataram tercatat meningkat dari triwulan sebelumnya (Grafik 3.5). Capaian inflasi tertinggi pada triwulan laporan terjadi di Kota Mataram sebesar 3,01% (yoY), diikuti dengan Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima masing-masing sebesar 2,59% (yoY) dan 1,78% (yoY) (Grafik 3.6). Keseluruhan inflasi tersebut membuat inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih tinggi dibandingkan nasional yang tercatat sebesar 2,65% (yoY).

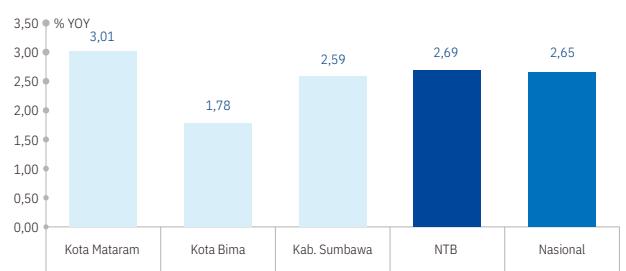
Berdasarkan kelompok, tekanan inflasi di Kota Mataram terutama terjadi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Sumber peningkatan tekanan inflasi utamanya yakni pada komoditas daging ayam ras, beras, dan bawang merah dengan andil masing-masing sebesar 0,30% (yoY), 0,29% (yoY), dan 0,21% (yoY). Lebih lanjut tekanan inflasi di Kota Mataram juga didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (andil 0,67%;yoY). Sejalan dengan Kota Mataram, tekanan inflasi di Kabupaten Sumbawa utamanya didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 1,36% (yoY). Adapun komoditas yang mendorong tekanan inflasi diantarnya ikan teri (andil 0,42%;yoY), sigaret kretek mesin (SKM) (andil 0,17%;yoY), dan bawang merah

Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Tahunan Kab/Kota Pantauan di Provinsi NTB



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.6 Inflasi Tahunan Triwulan III 2025 Kab/Kota Pantauan di Provinsi NTB



Sumber: BPS, diolah

(andil 0,15%;yoY). Di sisi lain, tekanan inflasi di Kota Bima utamanya didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil 0,86% (yoY) dengan komoditas penyumbang utama yaitu emas perhiasan (andil 0,67%;yoY).

3.2.1 Disagregasi Inflasi Kota Mataram

Sejalan dengan perkembangan di tingkat Provinsi, Kota Mataram mengalami kenaikan inflasi tahunan dari 2,14% (yoY) pada triwulan II 2025 menjadi 3,01% (yoY) di triwulan III 2025 (Tabel 3.8). Berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2022, nilai konsumsi di Kota Mataram memiliki pangsa terbesar di Provinsi NTB, yakni sebesar 50,71% terhadap total nilai konsumsi sehingga tergolong cukup dominan terhadap perkembangan kondisi inflasi dari Provinsi NTB.

Tekanan inflasi di Kota Mataram pada triwulan III 2025 utamanya dikontribusikan oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau (Inflasi tahunan; 6,17% yoY). Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau memberikan andil inflasi 1,97% (yoY) dengan komoditas utama penyumbang inflasi adalah daging ayam ras dan beras dengan andil masing-masing 0,30% (yoY) dan 0,29% (yoY). Kenaikan harga daging ayam ras sejalan dengan meningkatnya permintaan selama perayaan HBKN Maulid Nabi yang dirayakan selama satu bulan penuh di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan tracking PIHPS, rata-rata harga beras di Kota Mataram meningkat 7,43% (yoY) dari Rp12.750/kg menjadi Rp13.697/kg. Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi juga didorong oleh tekanan pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang menyumbang inflasi terbesar kedua di Kota Mataram, yakni sebesar 0,67% (yoY) dengan komoditas utama penyumbang inflasi adalah emas perhiasan. Emas perhiasan menyumbang inflasi sebesar 0,64% (yoY), diikuti komoditas sabun mandi sebesar 0,04% (yoY). Tekanan harga emas perhiasan sejalan dengan ketidakpastian global pasca pengumuman kenaikan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS)

Tabel 3.8. Inflasi Tahunan Kota Mataram Berdasarkan Kelompok

Kelompok	2024				2025		
	I	II	III	IV	I	II	III
Umum	3,44	2,93	1,97	1,92	1,50	2,14	3,01
Makanan, Minuman, & Tembakau	7,79	4,84	1,84	2,67	3,01	3,06	6,17
Pakaian & Alas Kaki	2,50	1,63	2,14	1,73	1,15	1,37	0,44
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	1,74	2,65	2,72	1,80	-2,71	0,71	0,55
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	-0,40	-0,54	0,18	0,73	0,72	-0,84	-1,58
Kesehatan	1,11	0,67	0,27	1,50	2,30	2,33	1,93
Transportasi	1,39	2,39	1,90	-0,33	0,63	0,22	-0,36
Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	-1,32	-1,60	-1,77	-1,82	-1,30	-1,09	-0,77
Rekreasi, Olahraga, & Budaya	1,84	1,59	0,75	0,60	0,74	0,15	2,40
Pendidikan	1,78	1,90	1,57	1,57	1,57	2,11	2,47
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	3,02	3,65	2,97	2,77	2,22	2,32	2,25
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	1,27	4,06	5,82	7,52	9,72	11,36	11,20

Sumber: BPS, diolah

yang sehingga meningkatkan permintaan investor terhadap emas sebagai aset safe haven. Namun demikian, tekanan yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga dan Kelompok Transportasi dengan andil deflasi masing-masing sebesar -0,06% (yoY) dan -0,05% (yoY).

3.2.2 Disagregasi Inflasi Kabupaten Sumbawa

Berbeda arah dengan Kota Matara, Kabupaten Sumbawa mengalami tekanan inflasi yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2025. Inflasi Kabupaten Sumbawa pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 3,02% (yoY), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terpantau sebesar 0,68% (yoY). Meski Kabupaten Sumbawa termasuk kab/kota baru dalam perhitungan inflasi di tahun 2024, wilayah ini memiliki pangsa nilai konsumsi (SBH 2022) sebesar 36,33% (yoY), tertinggi kedua setelah Kota Mataram sehingga memiliki andil yang juga cukup signifikan. Dibandingkan dengan 2 kab/kota lainnya di Provinsi NTB, tekanan inflasi tahunan Kabupaten Sumbawa pada periode laporan menjadi yang tertinggi dibandingkan kedua Kota/Kabupaten IHK lainnya.

Sumber tekanan inflasi di Kabupaten Sumbawa pada triwulan III 2025 berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (Tabel 3.9). Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami tekanan inflasi sebesar 3,19% (yoY) dengan andil 1,36% (yoY) yang didorong oleh subkelompok rokok dan tembakau yang memberikan andil sebesar 5,06% (yoY), diikuti subkelompok makanan 3,10% (yoY), dan minuman tidak beralkohol sebesar 0,06% (yoY). Lebih lanjut, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga turut memberikan andil tertinggi kedua di Kabupaten Sumbawa yaitu 0,81% (yoY), dengan komoditas penyumbang inflasi utama adalah emas perhiasan 0,70% (yoY). Tekanan yang lebih tinggi tertahan oleh Kelompok Transportasi yang mengalami deflasi dengan andil sebesar 0,02% (yoY).

Tabel 3.9. Inflasi Tahunan Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Kelompok

Kelompok	2024				2025		
	I	II	III	IV	I	II	III
Umum	4,06	0,95	1,27	0,09	0,68	3,02	2,59
Makanan, Minuman, & Tembakau	8,14	0,83	1,57	-1,58	0,39	4,12	3,19
Pakaian & Alas Kaki	2,42	1,40	0,46	0,95	2,91	2,51	1,89
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	0,07	-0,06	-0,25	0,47	-4,07	1,04	1,30
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	1,82	1,49	0,33	0,59	0,46	0,06	0,07
Kesehatan	0,43	0,28	0,76	1,42	1,94	2,43	2,12
Transportasi	0,59	0,06	0,39	0,14	-0,2	-0,09	-0,16
Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	0,00	-0,12	-0,15	-0,14	-0,13	-0,03	-0,04
Rekreasi, Olahraga, & Budaya	1,23	0,56	5,46	5,46	4,91	5,14	0,38
Pendidikan	0,00	0,00	0,75	0,76	0,75	0,75	1,20
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	1,83	1,80	0,89	0,88	1,29	0,94	1,05
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	3,10	5,60	7,41	8,41	11,98	14,3	14,29

Sumber: BPS, diolah

Dilihat dari komoditasnya, komoditas yang menyumbang inflasi tertinggi adalah komoditas ikan teri (andil 0,42%; yoy), sigaret kretek mesin (SKM) (andil 0,17%; yoy), dan bawang merah (andil 0,15%; yoy). Kenaikan harga ikan teri sejalan dengan pergantian musim yang menyebabkan keterbatasan pasokan. Lebih lanjut, kenaikan harga SKM utamanya disebabkan dari dampak penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) rokok. Lebih lanjut, anomali cuaca pada tahun 2024 yang menyebabkan tingginya hasil panen komoditas hortikultura sehingga berdampak pada penurunan harga komoditas, menyebabkan pada tahun 2025 harga komoditas meningkat. Oleh sebab itu, kenaikan harga komoditas bawang merah cenderung dipengaruhi kondisi *base-effect*.

3.2.3 Disagregasi Inflasi Kota Bima

Inflasi tahunan Kota Bima pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 2,44% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar 1,14% (yoy). Pangsa nilai konsumsi Kota Bima berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2022 cenderung lebih rendah dibandingkan 2 kab/kota lainnya, yakni hanya sebesar 12,96%.

Tekanan inflasi di Kota Bima pada triwulan III 2025 utamanya dikontribusikan oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, diikuti oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (Tabel 3.10). Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya memberikan andil inflasi 0,86% (yoy) dengan andil terbesar salah satunya dari komoditas emas perhiasan 0,67% (yoy). Sementara itu, andil inflasi dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,50% (yoy) yang utamanya didorong oleh kenaikan harga kopi bubuk dengan andil 0,15% (yoy). Kenaikan harga kopi bubuk sejalan dengan tingginya harga kopi global yang didorong keterbatasan pasokan akibat kondisi cuaca di negara pemasok tertinggi.

Tabel 3.10. Inflasi Tahunan Kota Bima Berdasarkan Kelompok

Kelompok	2024				2025		
	I	II	III	IV	I	II	III
Umum	3,10	2,39	2,49	2,33	1,13	2,44	1,78
Makanan, Minuman, & Tembakau	6,70	3,69	2,08	1,63	0,61	1,57	1,41
Pakaian & Alas Kaki	0,62	0,86	0,93	0,86	1,31	0,66	0,64
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	2,53	1,64	1,00	0,59	-6,73	-0,22	-0,37
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	1,40	0,58	-0,31	0,70	0,73	0,95	1,37
Kesehatan	-0,29	0,41	5,21	5,25	5,55	6,11	2,09
Transportasi	0,96	2,73	0,78	0,33	-2,23	-0,02	-0,36
Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	-0,01	-0,01	0,18	0,18	-0,02	0,03	-0,15
Rekreasi, Olahraga, & Budaya	1,91	0,89	0,50	0,50	0,82	0,51	0,99
Pendidikan	0,65	0,65	21,97	21,96	21,97	22,05	5,93
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	0,29	1,21	1,09	1,20	1,45	0,68	0,67
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	3,24	5,11	5,69	6,49	9,30	10,57	12,81

Sumber: BPS, diolah

3.3 TRACKING DAN PROYEKSI INFLASI

3.3.1 Tracking Inflasi Triwulan IV 2025

Sejalan dengan Nasional, Provinsi NTB pada bulan Oktober 2025 mengalami inflasi sebesar 0,35% (mtm), melandai dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,22% (mtm). Realisasi tersebut menyebabkan inflasi Provinsi NTB secara tahunan menjadi sebesar 2,96% (yoy) dan tetap terkendali pada rentang $2,5\pm 1\%$. Inflasi yang terjadi pada periode laporan tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata historis selama 3 tahun terakhir (2022-2024) yang sebesar 3,56% (yoy). Adapun tekanan inflasi utamanya berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring belum masuknya masa panen komoditas hortikultura cabai merah. Selain itu, peralihan musim mendorong tingginya komoditas perikanan yaitu ikan layang/ ikan benggol, ikan bandeng, dan udang basah. Sejalan dengan itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga memberikan sumbangan inflasi yang utamanya berasal dari emas perhiasan seiring dengan masih berlanjutnya ketidakpastian global. Meski demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi yang terjadi pada kelompok transportasi.

Tekanan inflasi pada triwulan IV 2025 diprakirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan tekanan ini terutama dipicu oleh meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru yang mendorong kenaikan permintaan pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Tekanan inflasi juga diprakirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan belum masuknya masa panen komoditas beras serta peralihan musim yang menyebabkan terbatasnya pasokan komoditas hortikultura bawang merah dan cabai merah.

Selanjutnya, kenaikan inflasi yang lebih tinggi juga diprakirakan terjadi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Hal ini sejalan dengan kembali meningkatnya ketidakpastian global pasca pengumuman kenaikan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) ke beberapa negara maju dan berkembang, yang berdampak pada meningkatnya permintaan emas sebagai aset safe haven. Pada triwulan berjalan, tekanan kenaikan harga emas global tercatat meningkat dari 17,38% (qtq) dari USD3.458/oz menjadi USD4.059/oz.

3.3.2 Proyeksi Inflasi Keseluruhan Tahun 2025

Prospek inflasi gabungan Provinsi NTB untuk keseluruhan tahun 2025 diprakirakan tetap terkendali. Namun, masih terdapat upward risk yang perlu terus diwaspadai terkait inflasi di tahun 2025 yakni tren volatilitas harga minyak CPO global, kenaikan harga BBM (termasuk switching BBM subsidi ke non subsidi) serta adanya potensi penyesuaian beberapa jenis tarif (PDAM dan cukai rokok). Lebih lanjut, potensi risiko penyumbang inflasi turut dipengaruhi oleh tren peningkatan aktivitas ekonomi dan pariwisata yang lebih tinggi, sehingga

turut mendorong permintaan untuk berbagai komoditas makanan jadi, barang-barang industri, sewa rumah, kontrak rumah, biaya pendidikan, bahan/material konstruksi, dsb.

Tekanan inflasi pada tahun 2025 diprakirakan masih terkendali sejalan dengan tersedianya pasokan beras yang mampu memenuhi kebutuhan sampai dengan beberapa bulan ke depan. Selanjutnya, berbagai program GNPIP yang konsisten dilaksanakan oleh Bank Indonesia bersama dengan stakeholders turut mendukung terkendalinya tekanan inflasi di tahun 2025.

3.4 Program Pengendalian Inflasi Daerah

Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi NTB secara aktif berkoordinasi dalam rangka pengendalian harga barang dan jasa melalui beberapa program kegiatan yang telah dijalankan selama triwulan laporan, antara lain:

- 1) Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) di 8 titik untuk penanaman komoditas beras dan bawang merah di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Bima.
- 2) High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi TPID Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Dompu, dan Kota Mataram.
- 3) Kolaborasi Operasi Pasar Keliling (KOPling) dan Operasi Pasar Murah (OPM) sebanyak 167 kali sampai dengan bulan September 2025.
- 4) Pelaksanaan pelatihan tatacara pengisian web SILAKNIKI untuk melihat pergerakan harga oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- 5) Melaksanakan kegiatan studi banding TPID Provinsi Nusa Tenggara Barat dan TPID 10 Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat ke TPID Jawa Tengah.
- 6) Perluasan penanaman padi varietas Gamagora 7 seluas 250 Ha di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui penyuluran bibit.
- 7) Memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) intra-wilayah komoditas bawang merah antara TPID Kota Mataram dengan Kabupaten Bima.
- 8) Melakukan komunikasi efektif melalui berbagai media dalam rangka menjaga ekspektasi masyarakat, antara lain melalui kegiatan Bincang Bareng Media (BBM), talkshow di radio/television, termasuk Iklan Layanan Masyarakat.

BOKS 2:

HBKN Maulid Nabi: Pengaruhnya Terhadap Tingkat Inflasi NTB

Gambar 1. Harga Daging Ayam Bulan Januari 2023 hingga Bulan Oktober 2025



Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, masyarakatnya yang didominasi pemeluk Islam menjaga tradisi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Maulid Nabi Muhammad SAW dengan merayakannya sepanjang satu bulan penuh, menjadikannya sebagai salah satu perayaan budaya-religius terbesar di daerah tersebut. Perayaan ini dilakukan dengan berkumpul, bersilaturahmi dengan keluarga maupun tetangga sekitar.

Dalam perayaan HBKN Maulid Nabi di Nusa Tenggara Barat, Dulang Pesaji menjadi sajian andalan yang menampilkan kuliner tradisional Sasak. Ayam plecing menjadi primadona dalam Dulang Pesaji, dimasak dengan bumbu khas sehingga tampil gurih dan pedas, sekaligus menjadi simbol keistimewaan dalam perayaan. Dulang Pesaji juga dilengkapi dengan nasi putih atau nasi kuning, sayur ares, plecing sayur, serta berbagai jajanan tradisional yang menciptakan kombinasi rasa yang gurih, segar, dan manis sekaligus, sesuai dengan semarak perayaan Maulid.

Konsumsi daging ayam yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjalankan tradisi Maulid berpengaruh terhadap harga daging ayam per kilogram.

Grafik harga daging ayam Januari 2023–Oktober 2025 memperlihatkan pola musiman yang kembali muncul setiap memasuki September, bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi di NTB. Pada tiga tahun berturut-turut—2023, 2024, dan 2025—harga selalu bergerak naik menjelang puncak perayaan, mencerminkan lonjakan permintaan yang khas saat masyarakat NTB menggelar tradisi Maulid dengan hidangan dalam jumlah besar. Pada 2023 harga sempat menyentuh sekitar Rp39.750, pada 2024 berada di kisaran Rp37.700, sementara pada 2025

lonjakan lebih tajam hingga sekitar Rp44.650. Setelah puncak kegiatan selesai, harga cenderung turun kembali. Pola ini menunjukkan bahwa HBKN Maulid Nabi menjadi faktor musiman yang nyata dalam mengerek harga daging ayam di NTB.

Dalam menghadapi kegiatan tradisi rutin tersebut, Bank Indonesia dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi terus mengoordinasikan pelaksanaan program pengendalian inflasi yang difokuskan pada 4K, yaitu:

1. Keterjangkauan harga, dengan pelaksanaan OPM (Operasi Pasar Murah);
2. Ketersediaan pasokan, dengan pemantauan neraca pasokan oleh Bapanas;
3. Kelancaran distribusi, dengan pelaksanaan *capacity building* TPID Kota Mataram sehingga memastikan kerjasama distribusi daging ayam antar TPID yang lancar dan efisien;
4. Komunikasi efektif, dengan kampanye publik serta diseminasi antar instansi dalam koordinasi data sehingga membentuk persepsi masyarakat yang baik dan pemutusan kebijakan yang tepat sasaran.



Stabilitas Keuangan Daerah



Kinerja sistem keuangan Provinsi NTB pada triwulan III 2025 masih tetap kuat, didorong pertumbuhan kredit investasi yang terakselerasi sebesar 108,52%. Perkembangan positif tersebut turut didukung oleh risiko yang terjaga, tecermin dari NPL yang masih berada pada threshold <5%, yaitu sebesar 2,52%.

Penyaluran kredit perbankan di Provinsi NTB mencapai Rp75,06 triliun pada triwulan III 2025, atau tumbuh 12,10% (yoY), tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 12,10% (yoY). Pada triwulan III 2025, kredit investasi dan konsumsi mengalami peningkatan sebesar 108,52% (yoY) dan 8,12% (yoY), namun demikian kontraksi masih terjadi pada kredit modal kerja yang tercatat mengalami terkontraksi sebesar -21,22% (yoY).

Kredit konsumsi rumah tangga menyumbang 30,44% dari total penyaluran kredit di Provinsi NTB. Adapun kredit rumah tangga pada triwulan II 2025 tercatat tumbuh melambat sebesar 7,81% (yoY), sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,06% (yoY). Masih tumbuhnya kredit rumah tangga di Provinsi NTB pada periode laporan terutama didorong oleh penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan kredit lainnya yang masih tumbuh positif masing-masing sebesar 10,53% (yoY), 10,61% (yoY), dan 3,4% (yoY).

Lebih lanjut, penyaluran kredit UMKM di Provinsi NTB pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh melambat dari 2,97% (yoY) menjadi 0,02% (yoY). Berdasarkan sektor ekonomi, mayoritas kredit UMKM disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran (pangsa 49,85%) serta sektor pertanian (pangsa 27,59%).

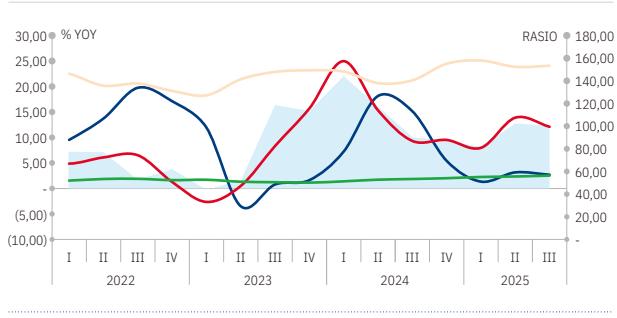
4.1 PERKEMBANGAN KINERJA PERBANKAN DI PROVINSI NTB

Berdasarkan lokasi bank, kinerja perbankan di Provinsi NTB pada triwulan III 2025 terpantau masih terjaga. Hal ini tecerminkan dari peningkatan pertumbuhan kredit yang masih tumbuh, disertai dengan rasio Non Performing Loan (NPL) yang masih dalam batas. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penyaluran kredit perbankan pada triwulan III tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024 di periode yang sama.

Penyaluran kredit perbankan di Provinsi NTB mencapai Rp75,06 triliun pada triwulan III 2025, atau tumbuh melambat sebesar 12,10% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 13,89% (yoy) (Grafik 4.1). Berdasarkan jenis penggunaan pertumbuhan kredit disebabkan kredit investasi dan konsumsi yang terakselerasi, namun demikian pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan pada kredit konsumsi yang melambat dan kontraksi pada kredit modal kerja (Grafik 4.5). Pada triwulan III 2025, kredit investasi tercatat tumbuh yakni sebesar 108,52% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 115,72% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan kredit modal kerja yang terkontraksi -21,22% (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat -13,77% (yoy). Namun demikian, kredit konsumsi tercatat tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 7,05% (yoy) pada triwulan II 2025 menjadi 8,12% (yoy). Sejalan dengan itu, apabila dilihat dari nominal penyalurannya, penyaluran kredit konsumsi tercatat meningkat dari Rp31,34 triliun pada triwulan II 2025 menjadi Rp32,63 triliun pada triwulan III 2025.

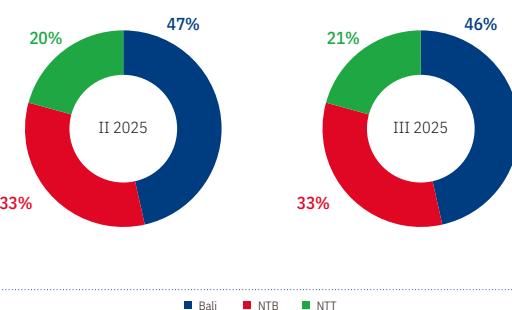
Selanjutnya pada sisi sektoral, pertumbuhan ditopang oleh kredit pertambangan dan pertanian yang berada pada tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 4.7). Kredit pertambangan meningkat sejalan dengan masuknya tahap awal fase 8 pertambangan tembaga dan mulai beroperasinya smelter. Selain itu, mulai masuknya musim panen terutama tanaman hortikultura menjadi salah satu faktor melambatnya kredit pada sektor pertanian. Namun,

Grafik 4.1 Perkembangan Indikator Perbankan Provinsi NTB



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

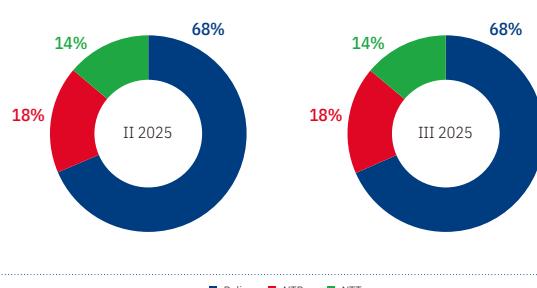
Grafik 4.2 Pangsa Penyaluran Kredit di Wilayah Balinusra



■ Bali ■ NTB ■ NTT

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.3 Pangsa Penghimpunan DPK di Wilayah Balinusra



■ Bali ■ NTB ■ NTT

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

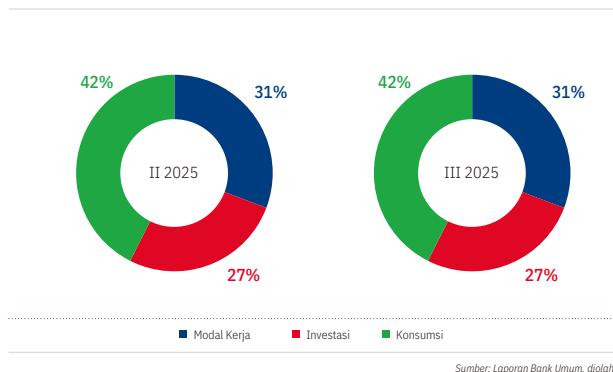
kontraksi terjadi pada pertumbuhan kredit konstruksi, perdagangan, dan akomodasi, makanan, dan minuman yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2025 kredit pertambangan tumbuh melambat menjadi 44,59% (yoy), dari triwulan sebelumnya sebesar 57,82% (yoy). Kontraksi terjadi pada LU Konstruksi yang turun dari 12,67% (yoy) menjadi -1,48% (yoy) pada triwulan III. Selain itu, pertumbuhan terjadi pada LU Akmamin meski masih mengalami kontraksi jika dibandingkan triwulan sebelumnya dari -2,65% (yoy) menjadi -0,47% (yoy). Pertumbuhan kredit LU perdagangan tertahan akibat mulai masuknya musim panen bagi tanaman hortikultura dan padi. Bergesernya event MotoGP ke triwulan IV turut menjadi penyebab pertumbuhan kredit akmamin melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dibandingkan dengan Provinsi lain di wilayah Balinusra, kredit perbankan di Provinsi NTB menyumbang 33,12% dari total kredit atau terbesar kedua setelah Provinsi Bali (46,40%) (Grafik 4.2). Sementara itu, untuk penghimpunan DPK, perbankan di Provinsi NTB menyumbang 17,63% total DPK di Balinusra, atau tertinggi kedua setelah Provinsi Bali yang menyumbang 68,5% (Grafik 4.3).

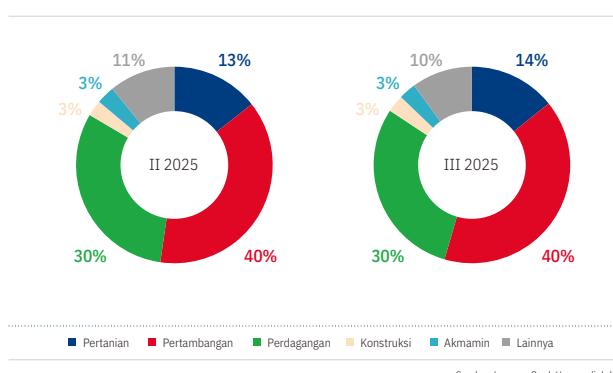
4.1.1 Perkembangan Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit perbankan di Provinsi NTB pada triwulan III 2025 terpantau tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit oleh perbankan di Provinsi NTB pada periode laporan tercatat Rp75,06 triliun atau melambat

Grafik 4.4 Pangsa Kredit Perbankan Provinsi NTB Berdasarkan Jenis Penggunaan



Grafik 4.6 Pangsa Kredit Perbankan Provinsi NTB Berdasarkan Sektor Ekonomi

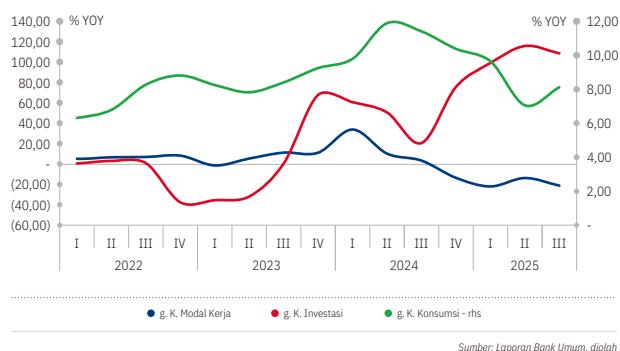


12,10% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 13,89% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, masih tumbuhnya kinerja penyaluran kredit didorong oleh kredit konsumsi yang memiliki pangsa terbesar yaitu 43,48% (Grafik 4.4). Selanjutnya, pertumbuhan juga tecerminkan dari kredit investasi (pangsa 28,81%), yang tercatat tumbuh hingga sebesar 108,52% (yoy) meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 4.5).

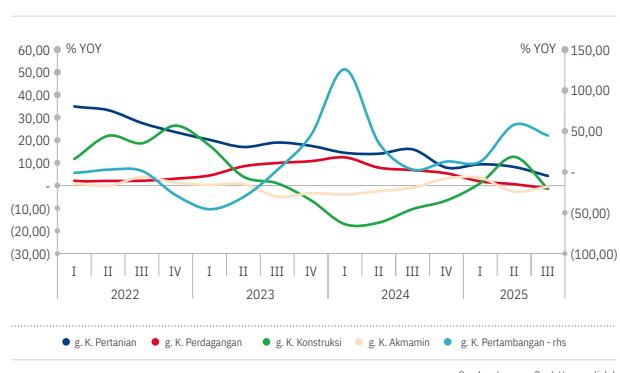
Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa penyaluran kredit perbankan di Provinsi NTB masih berfokus pada tiga sektor utama, yakni sektor pertambangan (pangsa 42,07%), perdagangan (pangsa 31,14%), dan sektor pertanian (pangsa 14,22%) (Grafik 4.6).

Perkembangan kinerja penyaluran kredit pada triwulan III 2025 bersumber dari positifnya kredit pertambangan dan pertanian. Pada triwulan III 2025 kredit tambang melambat dari 57,82% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi 44,59%. Selain itu, kredit pertanian tercatat positif meski turun melambat. Pada triwulan III, kredit pertanian tercatat melambat dari 8,19% (yoy) menjadi 4,21% (yoy). Namun, secara nominal terjadi peningkatan dari yang sebelumnya Rp6,02 triliun menjadi Rp6,23 triliun pada triwulan III. Di sisi lain, konstruksi mengalami kontraksi dari 12,67% (yoy) pada triwulan III 2025, menjadi -1,48% (yoy). LU Perdagangan turut mengalami kontraksi dari 0,59% (yoy) di triwulan II 2025 menjadi -1,31% (yoy) di triwulan III 2025.

Grafik 4.5 Pertumbuhan Kredit Perbankan Provinsi NTB Berdasarkan Jenis Penggunaan



Grafik 4.7 Pertumbuhan Kredit Perbankan Provinsi NTB Berdasarkan Sektor Ekonomi



Salah satu penyebab perlambatan tersebut diantaranya adalah mulai masuknya masa panen raya terutama hortikultura yang menyebabkan pertumbuhan kredit melambat pada triwulan III 2025. Di sisi lain, pergeseran event MotoGP ke triwulan III menjadi penyebab pertumbuhan kredit akomodasi, makanan, dan minuman yang sebelumnya -2,65% (yoy) pada triwulan sebelumnya tumbuh melambat menjadi -0,47% (yoy) pada triwulan III 2025 (Grafik 4.7).

Berdasarkan kelompok nilai, mayoritas penyaluran kredit oleh perbankan di Provinsi NTB didominasi oleh kredit dengan nominal Rp100 juta s.d. Rp500 juta, dimana pangsaanya mencapai 44,15% dari total penyaluran kredit. Sementara berdasarkan jumlah debitur, mayoritas debitur (pangsa 48,22%) memiliki kredit dengan nominal kurang dari Rp100 juta. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penyaluran

Tabel 4.1. Pengelompokan Kredit Berdasarkan Nilai Tw-III 2025

Kredit	Nominal (Rp Miliar)	% Pangsa	Jumlah Rekening	% Pangsa
0-100 juta	6.202	8,26	270.635	48,22
100-500 juta	33.138	44,15	177.646	31,66
500 juta-1 miliar	3.550	4,73	6.570	1,17
1-10 miliar	5.490	7,31	2.719	0,48
10-20 miliar	26.681	35,55	103.623	18,46
Total	75.060	100,00	561.193	100,00

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

kredit di Provinsi NTB tidak terkonsentrasi pada nominal kredit besar saja, namun merata pada nominal kecil sehingga dapat meminimalkan risiko sistemik. Meski demikian, perlu diperhatikan pangsa kredit dengan nominal di atas Rp10 miliar (pangsa 35,55% dari total kredit) yang dimiliki oleh 18,46% debitur, sehingga berpotensi menimbulkan risiko sistemik jika terjadi kegagalan bayar.

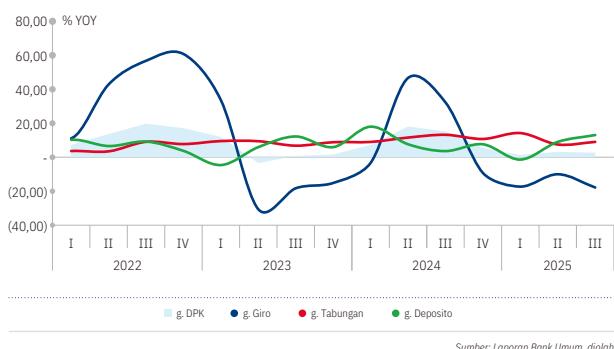
4.1.2 Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK perbankan Provinsi NTB pada triwulan III 2025 tercatat mencapai Rp48,96 triliun atau tumbuh sebesar 2,69% (yoY), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 3,16% (yoY) (Grafik 4.8). Berdasarkan golongan nasabah, meningkatnya kinerja penghimpunan dana terutama bersumber dari DPK Pemda, Pemerintah dan perseorangan yang tumbuh positif masing-masing 47,54 (yoY), 2,1% (yoY) dan 5,41% (yoY). Peningkatan terjadi pada DPK Pemda yang tumbuh dari 1,45 % (yoY) menjadi 47,54% (yoY). Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh DPK pemda yang masih tumbuh meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Perkembangan DPK pemerintah tercatat tumbuh melambat sebesar 2,1% (yoY) dari triwulan sebelumnya yang tercatat 7,2% (yoY). Namun, secara nominal DPK Pemerintah mengalami peningkatan dari Rp5,3 Triliun menjadi Rp5,5 Triliun. Pertumbuhan tahunan DPK Perseorangan tertahan pada 5,41% (yoY), lebih rendah

dibandingkan triwulan sebelumnya sebelumnya yaitu 5,73% (yoY). Sementara itu, kontraksi terjadi pada DPK swasta pada -18,96% (yoY), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat -4,45% (yoY) (Grafik 4.9). Sementara itu, berdasarkan jenis instrumennya, masih tumbuhnya DPK terutama berasal dari komponen deposito (pangsa 26,52%) yang tercatat meningkat dari 9,02% (yoY) menjadi 13,06% (yoY) pada triwulan III 2025. Lebih lanjut, DPK giro masih mengalami kontraksi menjadi -17,8% pada triwulan III 2025 dari -10,01% di periode yang sama pada tahun sebelumnya.

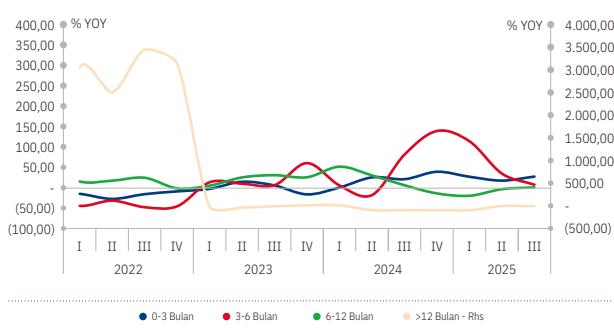
Secara lebih rinci, komponen tabungan tercatat tumbuh sebesar 9,03% (yoY) dari triwulan sebelumnya yaitu 7,49% (yoY). Berdasarkan kelompok nilai, pertumbuhan didorong dari meningkatnya kelompok nilai Rp>1-5 miliar, Rp>5-10 miliar, dan Rp>10-15 miliar. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tabungan dengan nominal Rp>10-15 miliar yang tumbuh sebesar 81,53% (yoY), terakses dari triwulan sebelumnya yang tercatat -37,79% (yoY). Sejalan dengan hal tersebut, tabungan dengan kelompok nilai Rp5-10 miliar turut terakses menjadi 40,19% (yoY) dari yang sebelumnya -7,10% (yoY) pada triwulan sebelumnya serta kelompok nilai Rp>1-5 miliar yang tumbuh dari 18,39% (yoY) menjadi 22,93% (yoY) dibandingkan triwulan II 2025. Namun demikian pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh tabungan dengan kelompok nilai >Rp0-1 miliar yang tumbuh melambat dari 7,39% (yoY) menjadi 7,21% (yoY) di triwulan III 2025. Kontraksi terjadi pada kelompok nilai tabungan

Grafik 4.8 Perkembangan DPK Perbankan Provinsi NTB Per Jenis Instrumen



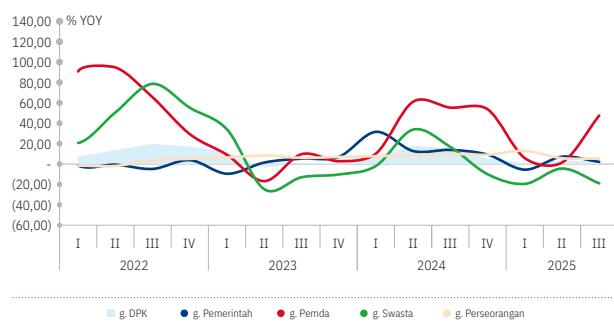
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.10 Perkembangan Deposito Perbankan Provinsi NTB Per Jangka Waktu



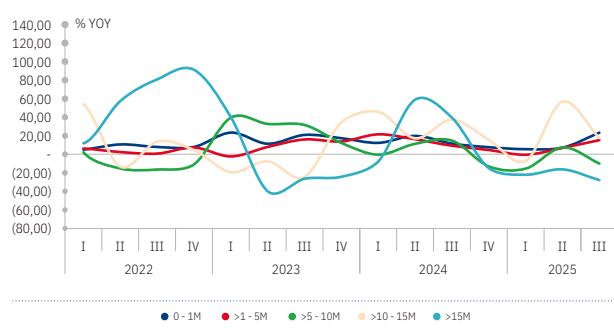
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.9 Perkembangan DPK Perbankan Provinsi NTB Per Nasabah



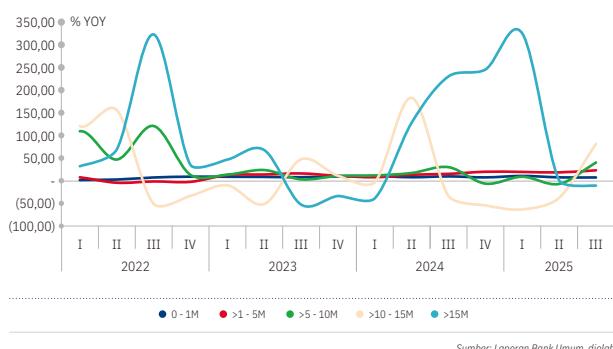
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.11 Perkembangan Giro Perbankan Provinsi NTB Per Kelompok Nilai



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.12 Perkembangan Tabungan Perbankan Provinsi NTB Per Kelompok Nilai



Rp>15 miliar, dari yang sebelumnya 0,66% (yoY) menjadi -10,87% (yoY) (Grafik 4.12). Secara khusus, komponen tabungan merupakan komponen dengan pangsa tertinggi dibandingkan dengan komponen Giro dan Deposito. Adapun pangsa komponen tabungan mencapai 51,7% dari total DPK.

Di sisi lain, komponen giro terpantau mengalami kontraksi sebesar -17,82% (yoY), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -10,01% (yoY). Pertumbuhan giro pada triwulan III 2025 untuk kelompok nilai giro >Rp0-1 miliar, Rp>1-5 miliar, dan Rp>10-15 miliar mengalami peningkatan, meskipun untuk nilai Rp>10-15 miliar tumbuh melambat. Pertumbuhan giro lebih lanjut tertahan pada kelompok nilai Rp>5-10 miliar dan Rp>15 miliar yang mengalami kontraksi. Giro dengan kelompok nilai >Rp0-1 miliar, >Rp1-5 miliar, dan >Rp10-15 miliar tercatat tumbuh masing-masing sebesar 23,28% (yoY), 15,25% (yoY), dan 17,55% (yoY). Pertumbuhan lebih tinggi tertahan untuk nilai giro untuk Rp>5-10 miliar dan Rp>15 miliar. Giro dengan kelompok nilai Rp5-10 miliar dan Rp>15 miliar tercatat mengalami kontraksi masing-masing sebesar -10% (yoY) dan -27,85% (yoY) lebih rendah dibandingkan triwulan II 2025 yang tercatat 7,39% (yoY) dan -16,26% (yoY) (Grafik 4.11).

Sementara itu, komponen deposito tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 13,06% (yoY), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 9,02% (yoY). Berdasarkan jangka waktunya, peningkatan deposito tertinggi terjadi pada deposito dengan jangka waktu 0-3 bulan (pangsa terbesar 49,35% dari keseluruhan total deposito) yang tumbuh menjadi 27,13% (yoY) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 17,3% (yoY). Sejalan dengan hal tersebut, deposito dengan jangka waktu 6-12 bulan dengan pangsa 39,01% dari keseluruhan total deposito terakselerasi menjadi 0,8% (yoY) dari -3,69% (yoY) pada triwulan II 2025. Namun demikian, peningkatan yang lebih tinggi tertahan oleh deposito dengan jangka waktu lainnya yang tumbuh melambat serta mengalami kontraksi pada triwulan II 2025. Deposito dengan jangka waktu 3-6 bulan (pangsa 11,23% dari keseluruhan total deposito) tercatat tumbuh melambat 7,16% (yoY), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat

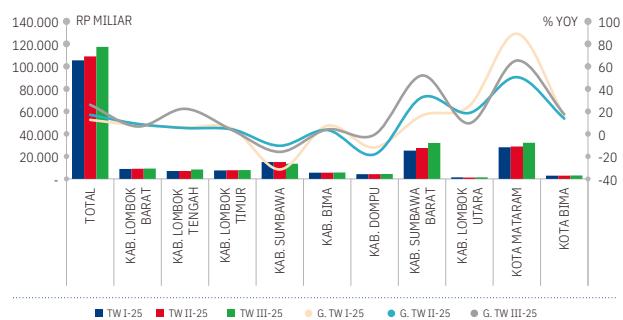
34,39% (yoY). Lebih lanjut, deposito dengan jangka waktu >12 bulan mencatatkan kontraksi yang lebih rendah sebesar -9,04% (yoY) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -5,89% (yoY) (Grafik 4.10).

4.1.3 Perkembangan Penyaluran Kredit Secara Spasial

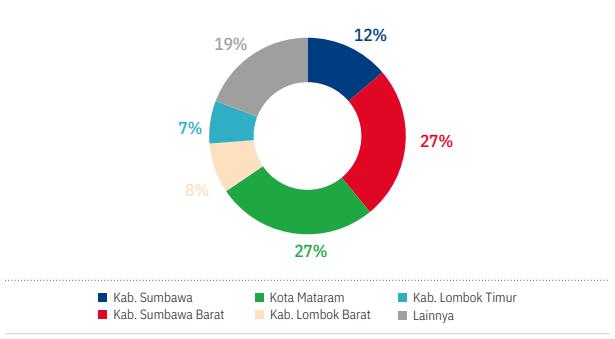
Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa masih menjadi daerah yang mendominasi penyaluran kredit di wilayah Provinsi NTB. Dari Rp117,32 triliun kredit yang tersalurkan di Provinsi NTB, sebesar 27,42% disalurkan di Kota Mataram, 27,22% disalurkan di Kabupaten Sumbawa Barat, dan 11,55% disalurkan di Kabupaten Sumbawa, sehingga secara total penyaluran kredit di tiga wilayah tersebut mencapai 67,65% dari total keseluruhan penyaluran di Provinsi NTB (Grafik 4.14). Lebih lanjut, fokus penyaluran di Kota Mataram utamanya pada sektor pertambangan dan perdagangan dengan pangsa masing-masing mencapai 38,78% dan 11,99% dari total penyaluran kredit di wilayah tersebut (kredit berdasarkan lokasi proyek). Sementara itu, sektor pertambangan masih menjadi fokus penyaluran kredit di wilayah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat dengan pangsa total keduanya yang mencapai 66,2%.

Secara spasial, penyaluran kredit di Kota Mataram yang utamanya berfokus pada sektor perdagangan tumbuh melambat (Grafik 4.13). Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan pada triwulan II 2025 yang sebesar

Grafik 4.13 Perkembangan Penyaluran Kredit Kab/Kota di Provinsi NTB



Grafik 4.14 Pangsa Penyaluran Kredit Kab/Kota di Provinsi NTB Tw-III 2025



50,43% (yo), tetapi tumbuh meski tidak lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 89,08% (yo) sejalan dengan bergesernya permintaan pada periode bulan Ramadan dan HBKN ke triwulan I 2025. Di sisi lain, penyaluran kredit di Kabupaten Sumbawa Barat masih terakselerasi sebesar 32,51% (yo) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yaitu 16,32% (yo). Adapun hal ini sejalan dengan operasional smelter yang sudah berjalan.

4.1.4 Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, penghimpunan DPK pada triwulan II 2025 masih terpusat di Kota Mataram dengan pangsa mencapai 69,52% (Grafik 4.16). Sementara penghimpunan DPK di Kab/Kota lainnya relatif tersebar merata. Tingginya pangsa penghimpunan DPK di Kota Mataram sejalan dengan tingginya aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Berdasarkan pertumbuhannya, penghimpunan DPK di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Mataram mengalami pertumbuhan DPK tertinggi, dimana masing-masing sebesar 49,22% (yo), 19,85% (yo), 6,28% (yo), 5,95% (yo), 3,4% (yo) dan 1,9% (yo) (Grafik 4.15). Di sisi lain pertumbuhan lebih tinggi relatif tertahan oleh Kabupaten Sumbawa Barat yang tercatat tumbuh melambat sebesar 16,89% (yo) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 23,5%. Kontraksi terjadi

pada beberapa Kabupaten/Kota, diantaranya adalah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Dompu penurunan sebesar -7,12% (yo) dan -5,46% (yo) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu -4,57% (yo) dan -1,53% (yo) (Grafik 4.16)

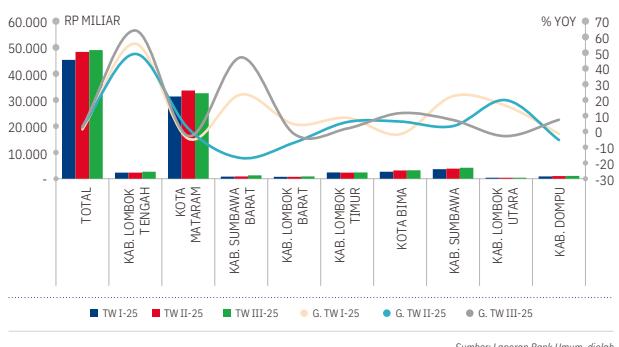
4.2 PERKEMBANGAN SEKTOR KORPORASI PROVINSI NTB

4.2.1 Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Korporasi

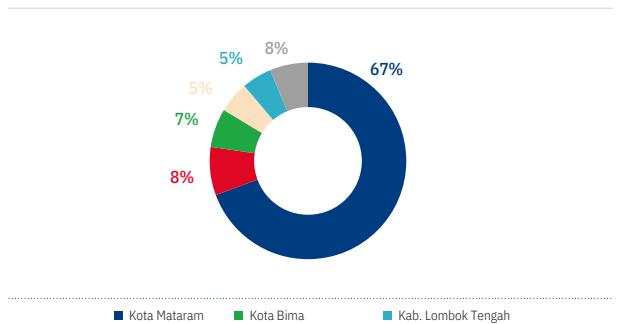
Sumber kerentanan korporasi dapat berasal dari kondisi perekonomian domestik maupun perekonomian global. Dari sisi domestik, kerentanan korporasi antara lain dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat yang dapat memengaruhi penjualan domestik, kondisi politik yang memasuki masa transisi, kondisi geopolitik dunia, tekanan inflasi yang dapat memengaruhi struktur biaya bahan baku, termasuk kebijakan Pemerintah yang dapat memengaruhi operasional perusahaan. Lebih lanjut, ekonomi NTB yang salah satunya didominasi oleh sektor pertambangan juga cukup terpengaruh dengan transisi hilirisasi ekspor dan kelancaran operasional smelter. Di sisi lain ketidakpastian pasar keuangan yang dapat mengganggu iklim bisnis, terjadi akibat kebijakan tarif US.

Kondisi geopolitik yang tidak menentu masih memengaruhi perkembangan permintaan negara mitra dagang utama ekspor Provinsi NTB. Perang dagang antara Tiongkok dan USA

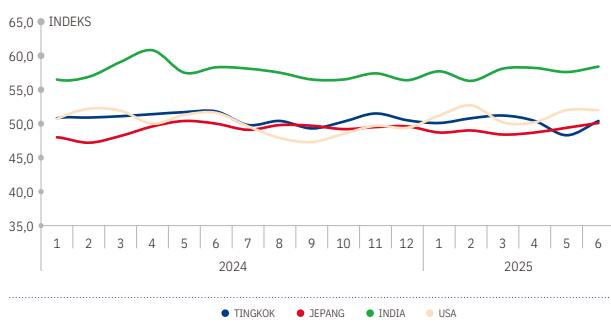
Grafik 4.15 Perkembangan Penghimpunan DPK per Kab/Kota di Provinsi NTB



Grafik 4.16 Pangsa Penghimpunan DPK Kab/Kota di Provinsi NTB Tw-III 2025

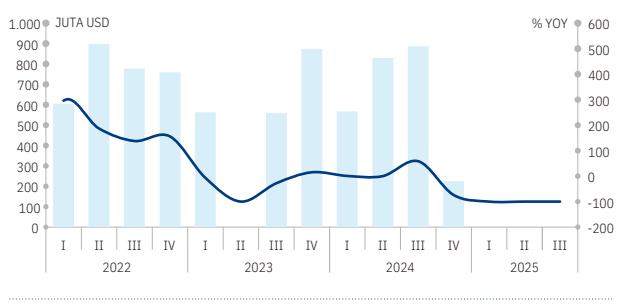


Grafik 4.17 Perkembangan PMI Negara Mitra Dagang Utama



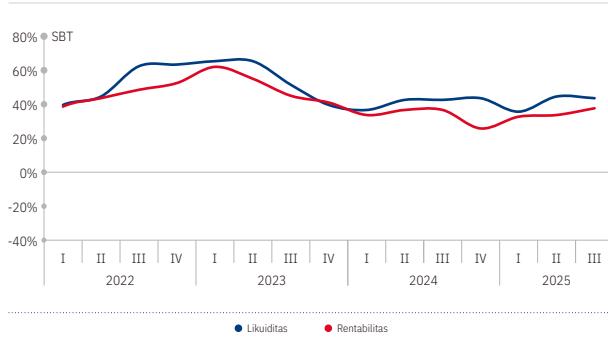
Sumber: CEIC, diolah

Grafik 4.18 Perkembangan Ekspor Tambang NTB



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 4.19 Perkembangan Likuiditas dan Rentabilitas Korporas



Sumber: Bank Indonesia (SKDU), dialah

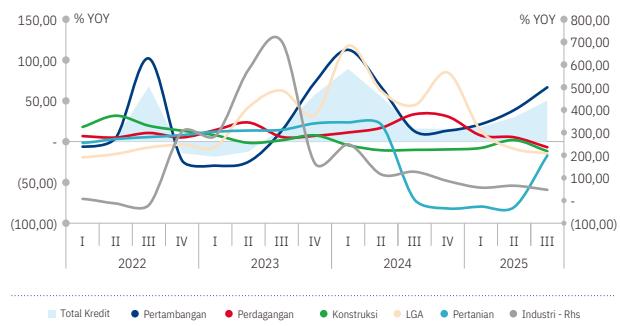
memengaruhi kondisi ekonomi Tiongkok sebagai salah satu negara tujuan ekspor konsentrat tembaga terpantau masih mengalami penurunan pada triwulan berjalan (Grafik 4.17). Di sisi lain, PMI negara India terpantau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan tertahannya sektor manufaktur dan produktivitas. Lebih lanjut sejalan dengan mulai beroperasinya smelter, ekspor tembaga pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 4.18). Sementara itu, PMI Amerika Serikat mengalami penurunan pada triwulan III 2025 sebagai dampak dari tarif dagang yang meningkatkan biaya produksi dari barang Amerika Serikat.

Meski demikian, mengacu pada beberapa indikator terkini, hingga periode laporan kinerja korporasi secara umum di Provinsi NTB tetap kuat. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Bank Indonesia mengonfirmasi bahwa likuiditas korporasi mengalami peningkatan. Sejalan dengan kondisi tersebut, rentabilitas korporasi mengalami kenaikan menunjukkan kemampuan korporasi dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasional meningkat. (Grafik 4.19).

4.2.2 Perkembangan Kredit Korporasi di Provinsi NTB

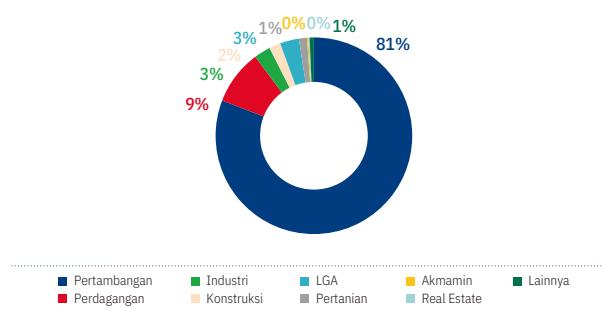
Penyaluran kredit perbankan kepada sektor korporasi tercatat tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit perbankan untuk korporasi di Provinsi NTB pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh 50,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 29,83% (yoy). Sejalan dengan itu, nilai penyaluran kredit korporasi pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh dari Rp54,8 triliun menjadi Rp61,67 triliun (Grafik 4.20). Berdasarkan jenis penggunaannya, akselerasi pertumbuhan dialami oleh kredit modal kerja sebesar 77,87% (yoy) dari 50,98% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, secara sektoral, akselerasi pertumbuhan dialami oleh sektor dengan pangsa besar, khususnya sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh tinggi 66,57% (yoy).

Grafik 4.20 Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor



Sumber: Laporan Bank Umum, dialah

Grafik 4.21 Pangsa Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor



Sumber: Laporan Bank Umum, dialah

Kredit modal kerja korporasi tercatat tumbuh sebesar 77,87% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 50,98% (yoy). Pertumbuhan terutama bersumber dari penyaluran kredit sektor pertambangan yang memiliki pangsa terbesar dari kredit investasi (pangsa 80,83%) (Grafik 4.21). Hal ini sejalan dengan berlanjutnya fase 8 dan beroperasinya smelter sampai triwulan III 2025.

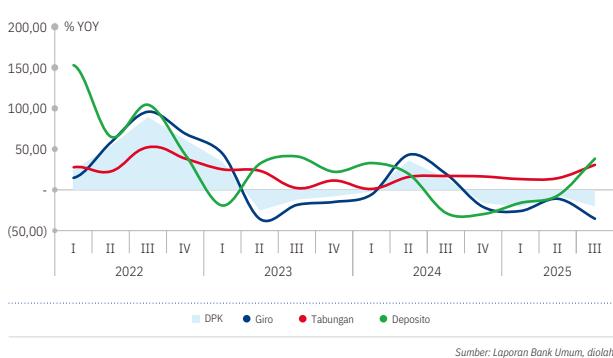
Kredit investasi tercatat tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya, dari 11,45% (yoy) menjadi 24,94% (yoy) sedangkan kredit konsumsi kerja korporasi pada triwulan III 2025 mengalami kontraksi dari -81,54% (yoy) menjadi -83,59% (yoy) pada triwulan laporan. Masa tumbuhnya kredit investasi korporasi disebabkan oleh kredit pada transportasi dan perdagangan yang tumbuh 31,57% (yoy) pada triwulan laporan, meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat 29,55% (yoy) pada triwulan lalu. Lebih lanjut, kredit investasi sektor pertambangan juga tercatat tumbuh menjadi 66,57% (yoy) dari 38,72% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

4.2.3 Perkembangan DPK Korporasi di Provinsi NTB

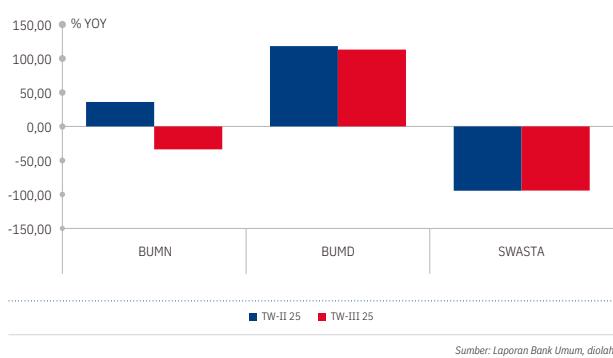
DPK korporasi masih didominasi oleh instrumen giro (pangsa 74,63%), disusul oleh komponen tabungan (pangsa 14,79%), serta deposito (pangsa 10,58%). Penghimpunan DPK korporasi pada triwulan II 2025 tercatat melambat -6,89% (yoy), tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya yang kontraksi sebesar -20,36% (yoy) (Grafik 4.22).

Berdasarkan golongannya, pertumbuhan positif DPK terjadi pada golongan BUMD dengan pangsa sebesar 12,73% dari keseluruhan penyaluran DPK korporasi (Grafik 4.23). Kontraksi terjadi pada golongan BUMN dengan nilai -33,57% (yoy) dari 35,97% di triwulan II 2025. Lebih lanjut, berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha yang dilakukan oleh Bank Indonesia, diketahui bahwa kondisi likuiditas perusahaan tercatat 43,56% SBT, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 44,55% SBT. Meskipun SBT dan DPK tumbuh melambat, namun tingkat likuiditas korporasi masih terjaga dan kegiatan usaha masih stabil (Grafik 4.24).

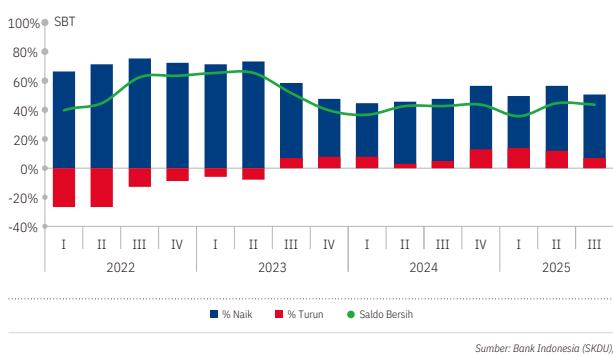
Grafik 4.22 Perkembangan DPK Korporasi Berdasarkan Instrumen



Grafik 4.23 Pertumbuhan DPK Korporasi Berdasarkan Golongan Korporasi



Grafik 4.24 Perkembangan Likuiditas Korporasi



4.3 PERKEMBANGAN SEKTOR RUMAH TANGGA PROVINSI NTB

4.3.1 Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

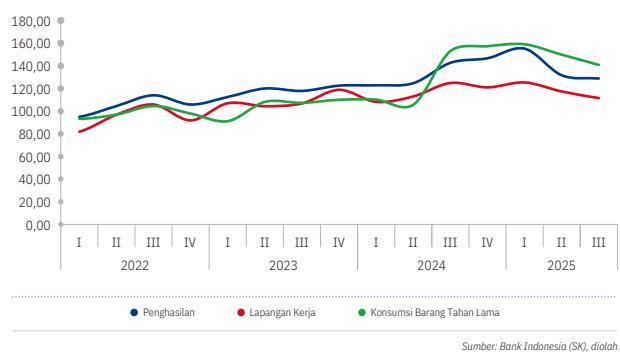
Rumah tangga memiliki peranan besar terhadap perekonomian dan sistem keuangan di Provinsi NTB. Beberapa faktor yang dapat memberikan tekanan pada kinerja sektor rumah tangga antara lain:

1. Tingkat Pendapatan dan Kinerja Konsumsi Rumah Tangga

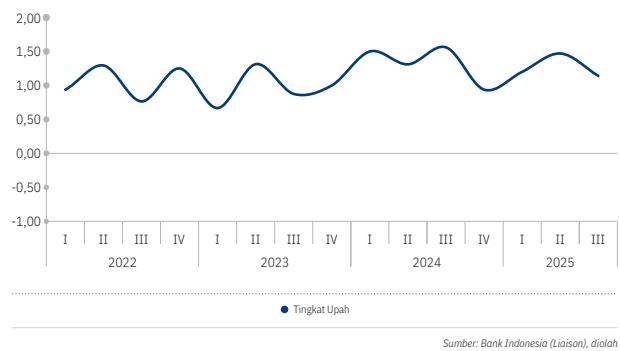
Konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 61,39% dari total PDRB di Provinsi NTB selama triwulan II 2025. Dari sektor keuangan, rumah tangga juga menjadi kontributor terbesar dari Penghimpunan DPK (pangsa 57,5% terhadap total DPK pada triwulan II 2025). Faktor utama yang dapat memberikan tekanan dan menjadi sumber kerentanan sektor rumah tangga salah satunya yakni tingkat pendapatan.

Hasil Survei Konsumen (SK) pada triwulan II 2025 mencerminkan keyakinan konsumen terhadap perekonomian masih terjaga dan terus menunjukkan peningkatan pasca penurunan yang terjadi di tahun 2020.

Grafik 4.25 Indeks Penghasilan & Ketersediaan Tenaga Kerja Saat Ini



Grafik 4.26 Likert Scale Tingkat Upah



Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat berada pada level optimis (>100), yaitu sebesar 125,2. Sejalan dengan itu, indeks penghasilan dan lapangan kerja juga berada pada level optimis, sehingga mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan rumah tangga relatif terjaga dan semakin membaik (Grafik 4.25).

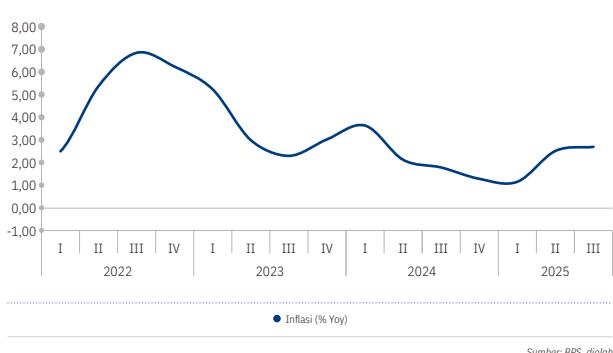
Terus membaiknya tingkat pendapatan masyarakat di Provinsi NTB pasca terjadinya pandemi juga tercermin dari hasil *Liaison*, dimana *Likert Scale (LS)* untuk tingkat upah pada triwulan II 2025 tercatat positif LS 1,47, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 1,2. Adapun hal tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik 4.26). Pertumbuhan rata-rata terjadi sejalan dengan meningkatnya UMP dan UMK di daerah.

2. Tingkat Inflasi

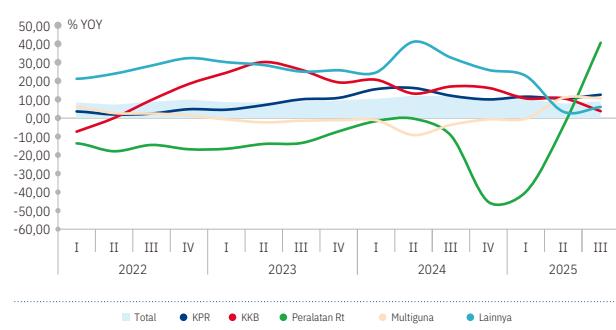
Pada September 2025, inflasi tiga kota gabungan di Provinsi NTB mencatatkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 2,69% (yoY), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,51% (yoY) (Grafik 4.27). Adapun inflasi utamanya berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring dengan meningkatnya permintaan pada masa perayaan HBKN Maulid Nabi yang dirayakan sepanjang bulan September sehingga Provinsi NTB mengalami inflasi 0,38% (mtm) dengan andil 0,15% (mtm) pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi yang terjadi pada sejumlah komoditas bawang merah, tomat, dan cabai rawit sejalan dengan berlanjutnya panen komoditas hortikultura. Adapun Realisasi tersebut menyebabkan inflasi Provinsi NTB secara tahunan menjadi sebesar 2,51% (yoY) dan tetap terkendali pada rentang $2,5 \pm 1\%$.

Berbagai program dan kegiatan pengendalian inflasi oleh berbagai mitra terkait melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus dilakukan sehingga terkendalinya inflasi di tahun 2025 diharapkan hal tersebut juga dapat menopang daya beli masyarakat.

Grafik 4.27 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi NTB

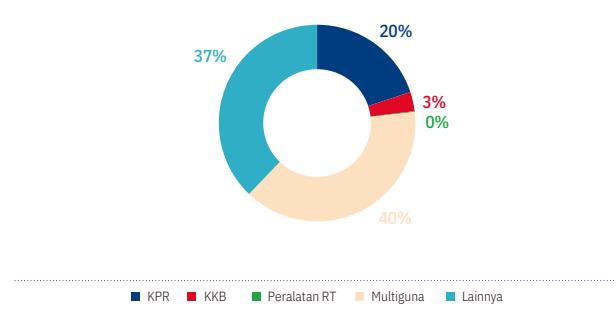


Grafik 4.28 Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Provinsi NTB



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.29 Pangsa Kredit Rumah Tangga Menurut Penggunaan

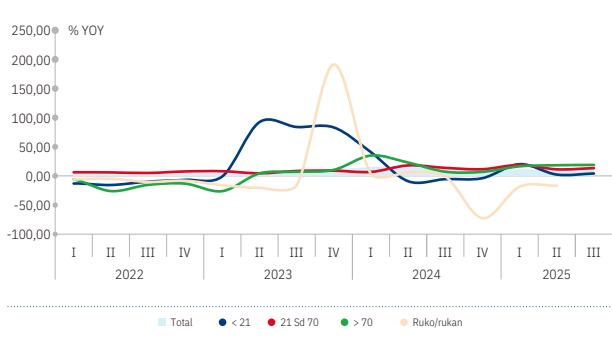
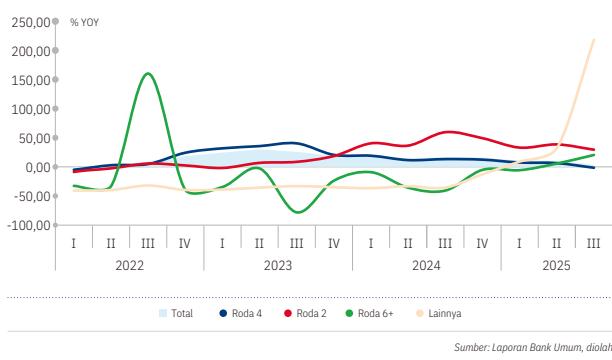


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.3.2 Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Provinsi NTB

Kredit konsumsi rumah tangga menyumbang 29,45% dari total penyaluran kredit di Provinsi NTB. Adapun kredit rumah tangga pada triwulan III 2025 tercatat meningkat sebesar 8,98% (yoY), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 7,81% (yoY) (Grafik 4.28). Meskipun tumbuhnya kredit rumah tangga di Provinsi NTB pada periode laporan terutama didorong oleh penyaluran kredit peralatan rumah tangga yang terakselerasi 40,57% (yoY), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 sebesar -4,62% (yoY). Kredit Pemilikan Rumah (KPR) meningkat dari 10,53% (yoY) menjadi 12,53% (yoY) pada triwulan III 2025. Pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan pada penyaluran kredit multiguna yang memiliki pangsa terbesar dengan 40% (Grafik 4.29) tumbuh sebesar 10,57% (yoY), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terakselerasi sebesar 10,83% (yoY). Sejalan dengan itu, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) tumbuh positif sebesar 3,65% (yoY), melambat dari triwulan II 2025 sebesar 10,61% (yoY) (Grafik 4.28).

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada triwulan III 2025 meningkat dari 10,53% (yoY) menjadi 12,53% (yoY) (Grafik 4.30). Meskipun tumbuhnya KPR didukung oleh kegiatan perbankan sebagai upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Pertumbuhan KPR terutama didorong oleh pertumbuhan KPR tipe perumahan seluruh tipe yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan terjadi pada tipe perumahan <21, 21 s.d. 70, dan >70 yang masing-masing tumbuh sebesar

Grafik 4.30 Perkembangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)**Grafik 4.31 Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)**

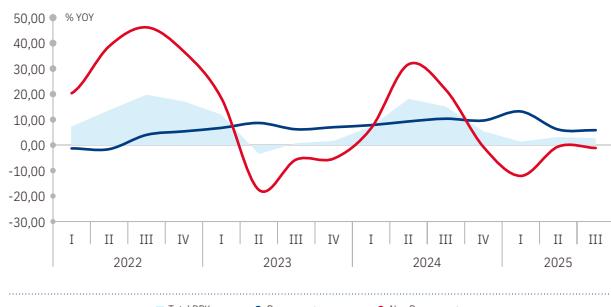
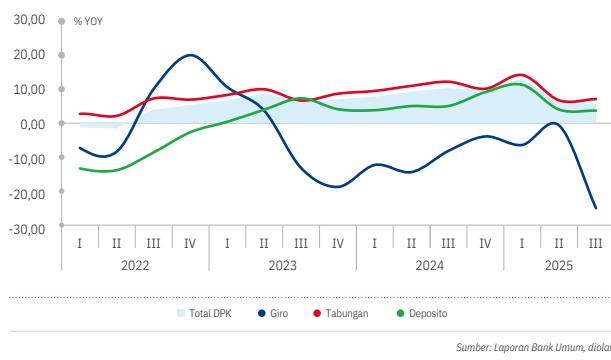
4,19% (yoy), 13,37% (yoy), dan 18,9% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh kredit ruko/ rukan yang tercatat mengalami kontraksi pada triwulan III 2025 sebesar -16,78% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -18,63% (yoy).

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) masih tumbuh positif sebesar 3,65% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 10,61% (yoy) (Grafik 4.31). Pertumbuhan KKB terutama ditopang oleh KKB lainnya yang tumbuh hingga 218,27% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 31,82% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, KKB roda 6+ meningkat dari 5,68% (yoy) menjadi 20,45% (yoy) pada triwulan III 2025. Penurunan terjadi pada kendaraan roda empat (pangsa 80,75% dari total keseluruhan KKB) yang terkontraksi sebesar -1,53% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 6,45% (yoy).

Perkembangan dari penyaluran KPR dan KKB terpantau sejalan dengan hasil Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dimana indeks untuk konsumsi barang tahan lama tumbuh sebesar 140,83 pada triwulan III 2025.

4.3.3 Perkembangan DPK Rumah Tangga di Provinsi NTB

Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga menyumbang 56,66% dari total DPK perbankan di Provinsi NTB selama triwulan III 2025. Jumlah DPK rumah tangga di perbankan Provinsi NTB tercatat sebesar Rp27,74 triliun, dengan pertumbuhan

Grafik 4.32 Perkembangan DPK Perseorangan & Non Perseorangan Provinsi NTB**Grafik 4.33 Perkembangan DPK Perseorangan Berdasarkan Instrumen**

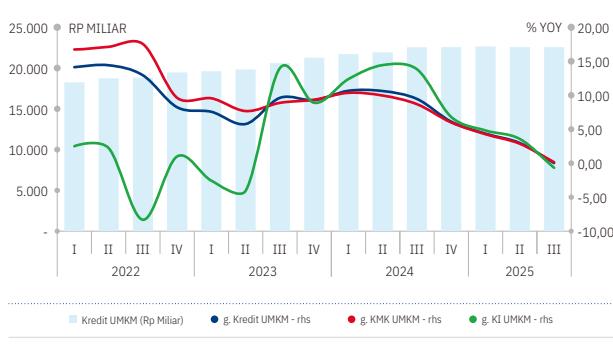
mencapai 5,85% (yoy) pada triwulan III 2025, melambat dari triwulan sebelumnya yang tercatat 6,1% (yoy) atau senilai Rp27,78 triliun (Grafik 4.32). Komposisi DPK rumah tangga pada triwulan III 2025 didominasi oleh tabungan (81,08%), deposito (17,08%), dan giro (1,84%). Pertumbuhan DPK rumah tangga pada periode laporan terutama seiring dengan penghimpunan tabungan yang tumbuh 7,11% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat 6,72% (yoy) (Grafik 4.33). Pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh penghimpunan deposito yang melambat 3,7% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya 4% (yoy). Di sisi lain, kontraksi dialami oleh Giro rumah tangga tumbuh melambat dari -0,69% (yoy) menjadi -25,02% (yoy). Berdasarkan jangka waktunya, peningkatan bersumber dari kelompok deposito <3 bulan yang meningkat 7,2% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 4,11% (yoy). Deposito 3-12 bulan yang mengalami kontraksi dari 4,24% (yoy) menjadi -3,75% (yoy) pada triwulan III 2025. Sejalan dengan itu, kelompok > 12 bulan masih mengalami kontraksi sebesar -12,69% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yaitu -10,78% (yoy).

4.4 PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN UMKM PROVINSI NTB

4.4.1 Penyaluran Kredit UMKM di Provinsi NTB

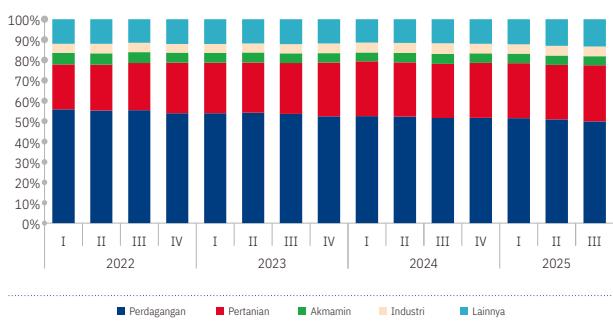
Saat ini penyaluran kredit UMKM tercatat 20,75% dari keseluruhan penyaluran kredit, sedikit melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 21,49% dan lebih rendah dari target RPIM (>30%). Selanjutnya,

Grafik 4.34 Pertumbuhan Kredit UMKM di Provinsi NTB



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

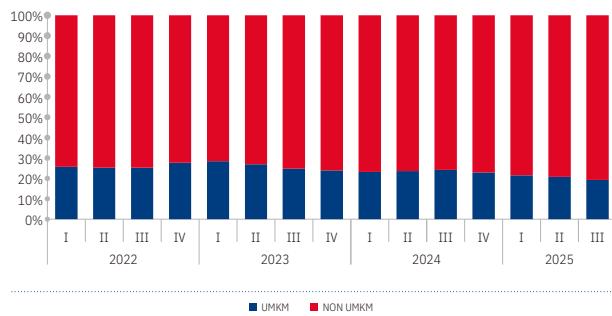
Grafik 4.36 Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Sektoral



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

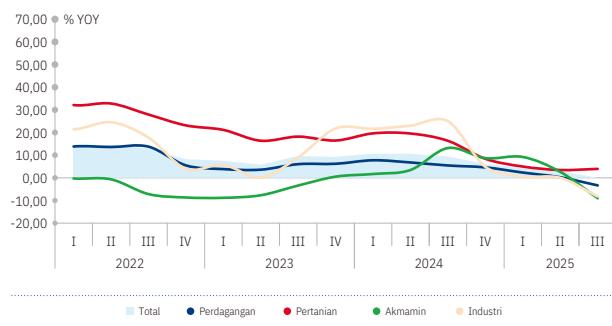
penyaluran kredit UMKM di Provinsi NTB pada triwulan II 2025 tercatat tumbuh melambat dari 4,35% (yoy) menjadi 2,97% (yoy) (Grafik 4.34). Pertumbuhan kredit UMKM yang tertahan disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya permintaan terhadap produk yang tecermin pada perlambatan kredit rumah tangga. Meskipun tumbuh melambat, masih tingginya kredit UMKM terutama didorong oleh kredit investasi yang tercatat masih tumbuh 3,57% (yoy) pada triwulan II 2025, meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, kredit modal kerja yang memiliki pangsa terbesar (pangsa 87,46%) juga tercatat tumbuh melambat dari 4,26% (yoy) menjadi 2,87% (yoy). Secara sektoral, pertumbuhan kredit UMKM didorong oleh masih positifnya seluruh sektor meskipun tumbuh melambat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Kredit UMKM sektor pertanian tercatat tumbuh sebesar 3,45% (yoy), meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya yang terakselerasi 4,97% (yoy). Pertumbuhan secara melambat turut terjadi pada sektor perdagangan, industri, dan akomodasi, makanan, dan minuman juga tercatat tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,32% (yoy), 0,58% (yoy) dan 9,2% (yoy) menjadi 0,24% (yoy), 0,00% (yoy), dan 2,62% (yoy). Dari sisi risiko, rasio NPL UMKM pada triwulan II 2025 berada di atas threshold <5%, yaitu sebesar 5,72%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan 5,28% (yoy). Hal ini dikarenakan berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit terkait pandemi COVID-19 pada Maret 2024, sehingga terjadi peningkatan NPL terutama pada segmen usaha kecil dan mikro.

Grafik 4.35 Pangsa Kredit UMKM Terhadap Total Kredit



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.37 Pertumbuhan Kredit UMKM Secara Sektoral



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Provinsi NTB relatif stabil pada triwulan II 2024 (Grafik 4.35), mencerminkan komitmen perbankan dalam mendorong perluasan akses keuangan dari UMKM. Pangsa penyaluran kredit UMKM di Provinsi NTB mencapai 20,75% pada periode laporan.

Berdasarkan kelompok UMKM, pangsa penyaluran kredit UMKM di Provinsi NTB didominasi oleh kelompok mikro dengan pangsa mencapai 55,19% dan diikuti oleh kelompok kecil dengan pangsa sebesar 33,58%. Sementara itu, berdasarkan sektor ekonomi, mayoritas kredit UMKM disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran (pangsa 50,86%) serta sektor pertanian (pangsa 26,74%) (Grafik 4.36). Namun demikian, pertumbuhan kredit UMKM pada kedua sektor tersebut pada triwulan II 2025 tercatat tumbuh melambat dari masing-masing 2,32% (yoy) dan 4,97% (yoy) menjadi 0,24% (yoy) dan 3,45% (yoy) (Grafik 4.37).

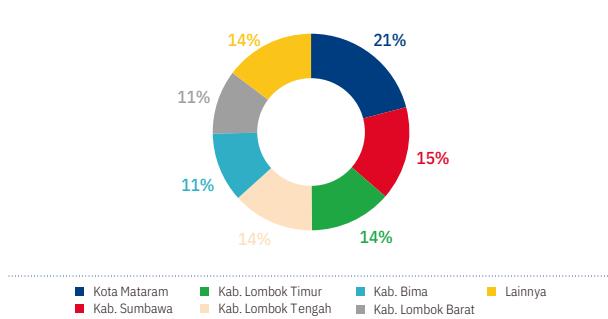
Kualitas penyaluran kredit UMKM di Provinsi NTB masih berada pada threshold berisiko tinggi (<5%) (Grafik 4.38). Rasio NPL kredit UMKM di Provinsi NTB pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 5,72%, cenderung meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,28%. Di sisi lain, tingkat suku bunga UMKM pada periode laporan tercatat sebesar 12,16%, sedikit menurun dibandingkan triwulan I 2025 (12,20%) (Grafik 4.39).

Grafik 4.38 Perkembangan NPL Kredit UMKM



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.40 Pangsa Penyaluran Kredit UMKM Per Kab/Kota di Provinsi NTB

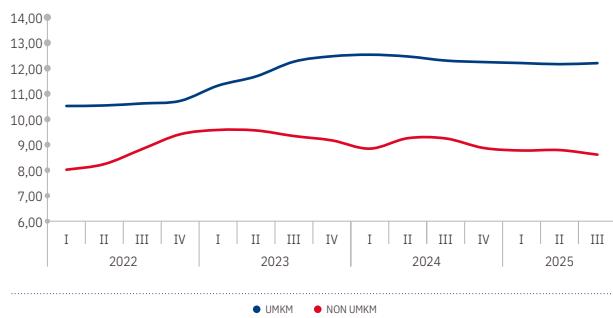


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.4.2 Penyaluran Kredit UMKM Secara Spasial

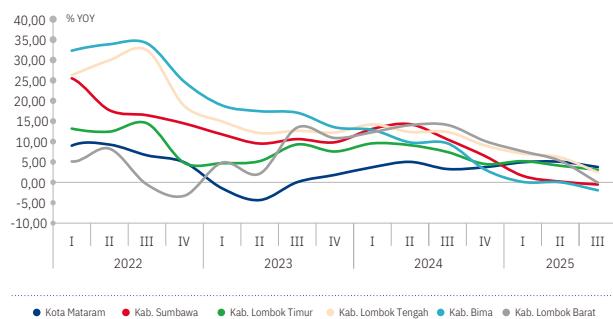
Penyaluran kredit UMKM di 10 Kab/Kota di Provinsi NTB pada triwulan II 2025 didominasi oleh Kota Mataram, Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Bima, dan Kab. Lombok Barat. Total pangsa enam Kab/Kota utama penyaluran kredit UMKM di Provinsi NTB tersebut mencapai 85,76% dari total kredit UMKM atau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 85,3%. Adapun penyaluran kredit UMKM di enam Kab/Kota tersebut relatif tersebar merata dan telah mewakili pusat aktivitas perekonomian UMKM baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Grafik 4.39 Perkembangan Suku Bunga Kredit UMKM



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.41 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM di Kab/Kota Utama



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Berdasarkan pertumbuhannya, Kota Mataram mengalami pertumbuhan kredit UMKM tertinggi, yakni mencapai 3,75% (yoY) pada triwulan III 2025 meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya yang mencapai 5,05% (yoY). Lebih lanjut, kredit UMKM di Kabupaten Lombok Timur juga tercatat tumbuh melambat dari 4,07% (yoY), menjadi 3,08% (yoY). Secara sektoral, pertumbuhan kredit UMKM di Kota Mataram disebabkan Kota Mataram merupakan pusat perekonomian serta meningkatnya mobilitas masyarakat memasuki periode libur panjang dan HBKN. Hal serupa juga tecermin dari masih tumbuhnya kredit UMKM Kabupaten Lombok Tengah sebesar 2,45% (yoY).





Penyelenggaraan Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang



Pada triwulan III 2025, aliran uang kartal di NTB mencatat net outflow sebesar Rp0,74 triliun, didorong meningkatnya kebutuhan uang tunai pada periode panen tembakau serta aktivitas ekonomi masyarakat. Bank Indonesia menjaga kualitas rupiah beredar melalui sortasi dan pemusnahan UTLE sebesar Rp1,49 triliun, serta memperkuat layanan kas melalui kas keliling dan optimalisasi kas titipan di Bima dan Sumbawa untuk memastikan ketersediaan uang layak edar hingga ke wilayah 3T.

Pada sistem pembayaran wholesale, transaksi RTGS meningkat baik frekuensi maupun nominal, mencerminkan perbaikan aktivitas korporasi, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan. Sementara itu, pada sistem pembayaran ritel, SKNBI mencatat pemulihan terbatas pada frekuensi, namun tetap stagnan dari sisi nominal; sebaliknya BI-FAST tetap dominan sebagai kanal transfer dana utama masyarakat berkat kecepatan, biaya rendah, dan kemudahan akses.

Pada instrumen pembayaran ritel, dinamika bervariasi dengan kartu debit menurun dari sisi volume, kartu kredit kembali pulih, dan uang elektronik tumbuh sangat kuat baik pada jumlah akun maupun nilai transaksi. Di sisi lain, QRIS mencatat lonjakan signifikan, dengan pertumbuhan merchant lebih dari dua kali lipat dan transaksi mencapai Rp1,26 triliun, menegaskan bahwa pembayaran digital semakin menjadi preferensi utama masyarakat NTB dan mendorong percepatan inklusi serta ekonomi digital di daerah.

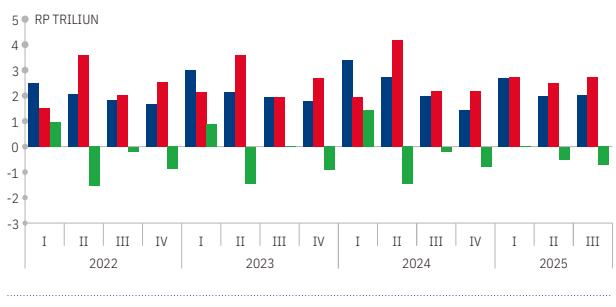
5.1 TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI

Aliran uang kartal di Provinsi NTB pada triwulan III 2025 tercatat net outflow Rp0,74 triliun (Grafik 5.1.1). Pada triwulan laporan, jumlah aliran uang kartal keluar dari Bank Indonesia melalui perbankan (*outflow*) sebesar Rp2,74 triliun meningkat 10% (qtq). Disisi lain, jumlah aliran uang kartal yang kembali ke Bank Indonesia (*inflow*) sebesar Rp2,01 triliun meningkat 1% (qtq) dari triwulan sebelumnya (Grafik 5.1.2). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor musiman seperti permintaan uang kartal pada periode panen tembakau di pulau lombok.

Sebagai upaya menjaga kualitas uang beredar di masyarakat, Bank Indonesia selalu melaksanakan sortasi atas *inflow* dengan memperhatikan parameter dan kapasitas pengolahan uang Rupiah. Dari kegiatan sortasi tersebut, diperoleh hasil pengolahan berupa Uang Layak Edar (ULE) yang diedarkan kembali ke masyarakat dan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang selanjutnya dimusnahkan menggunakan Mesin Racik uang Kertas (MRUK). Pada periode laporan, UTLE yang telah dimusnahkan sebesar Rp1,49 triliun dengan rasio 74% dari *inflow* (grafik 5.1.3). Secara *bilyet*, jumlah uang yang dimusnahkan tersebut berjumlah 27,40 juta *bilyet* atau 71% dari *inflow* (grafik 5.1.4).

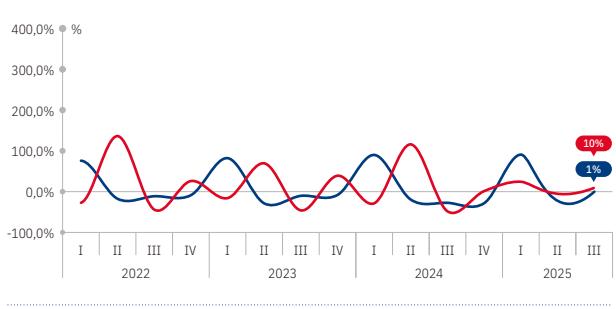
Berdasarkan pecahannya, jumlah *bilyet* UTLE yang dilakukan pemusnahan oleh Bank Indonesia didominasi oleh Uang Pecahan Besar (UPB) mencapai 78,52%, sementara untuk Pecahan Kecil (UPK) sebesar 21,48% dari total *bilyet* UTLE (Grafik 5.1.5).

Grafik 5.1 Perkembangan Nominal Inflow, Outflow, dan Net Outflow Uang Kartal



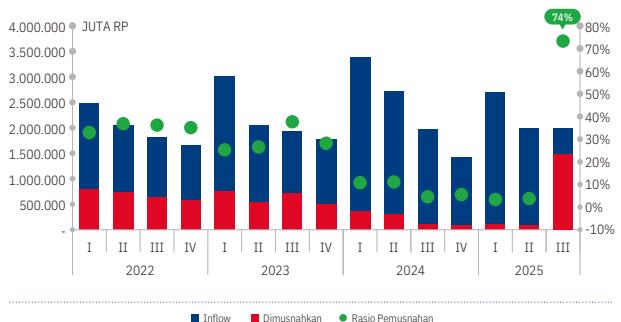
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.2 Perkembangan pertumbuhan Outflow, Inflow Uang Kartal



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.3 Perkembangan pemusnahan dan rasio terhadap *inflow* dalam nominal

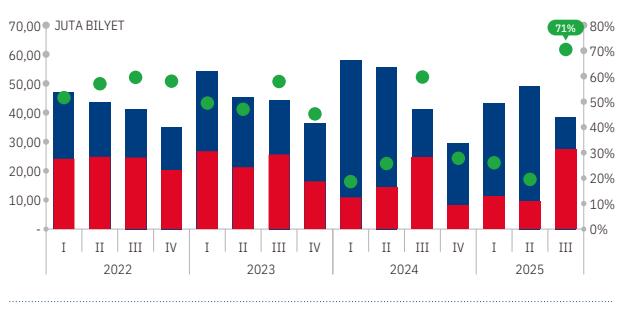


Sumber : Bank Indonesia

Kpw BI Provinsi NTB secara proaktif melaksanakan kegiatan kas keliling untuk menjaga kualitas dan ketersediaan uang kartal bagi masyarakat hingga ke wilayah Terdepan Terluar dan Terpencil (3T). Kas keliling menjadi salah satu sarana dalam mengimplementasikan clean money policy sekaligus memenuhi kebutuhan uang di masyarakat. Selama triwulan III tahun 2025, realisasi layanan kas keliling sebesar Rp14,33 miliar dengan 10 kali pelaksanaan (grafik 5.1.6) termasuk 4 kali diantaranya menyasar ke wilayah 3T yakni Kec. Sanggar (Kab.Lombok Timur), Kec. Sape (Kabupaten Bima) sebanyak 2 kali dan Parado (Kabupaten Bima).

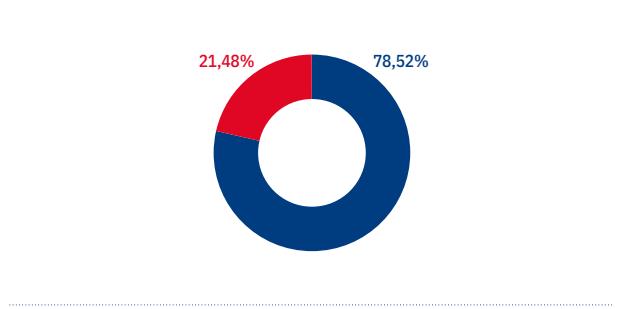
Selanjutnya, pengedaran uang di berbagai daerah juga terus dilaksanakan secara berkala melalui kas titipan, khususnya dalam rangka memastikan ketersediaan uang Rupiah yang

Grafik 5.4 Pangsa Pemusnahan UTLE, prosentase dalam *bilyet*



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.5 Prosentase rasio pemusnahan uang UPB dan UPK



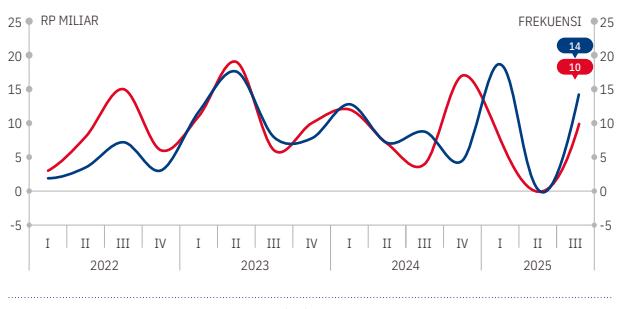
Sumber : Bank Indonesia

layak edar di seluruh pelosok wilayah NTB. Saat ini terdapat 2 (dua) titik lokasi kas titipan yang berada di Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa yang dikelola oleh **Bank NTB Syariah** dengan bank peserta meliputi **Bank NTB Syariah, BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank Mega, Bank Danamon, BSI, BCA dan Bank Sinarmas**. Sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan uang pada kedua kas titipan tersebut, selama triwulan III 2025 telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali pemenuhan tambahan kas titipan, dengan total dropping mencapai Rp365,23 miliar dan jumlah uang tidak layak edar (UTLE) yang bisa ditarik sebesar Rp35,21 miliar

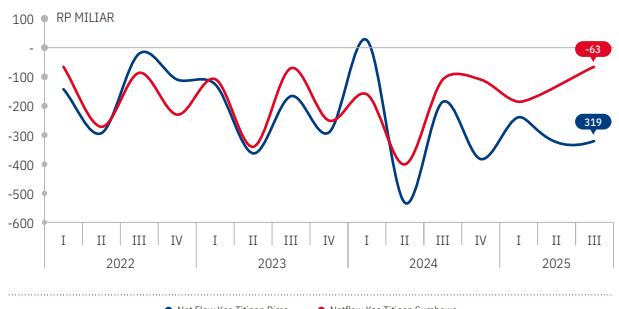
Keberadaan Kas Titipan di Bima dan Sumbawa memegang peranan penting dalam menjaga pemenuhan uang Rupiah layak edar bagi masyarakat di Pulau Sumbawa. Hal tersebut tampak dari historis netflow di kedua kas titipan tersebut. Untuk triwulan III tahun 2025 Kas Titipan Sumbawa mengalami net outflow sebesar Rp63 miliar sedangkan di Kas Titipan Bima mengalami net outflow sebesar Rp319 miliar sebagaimana tampak pada grafik 5.1.7. Dalam implementasi clean money policy, pada triwulan III 2025 keberadaan Kas Titipan di Bima berkontribusi menyerap UTLE sebesar Rp5,8 miliar, sedangkan Kas Titipan di Sumbawa telah menyerap UTLE sebesar Rp46,8 miliar pada periode laporan sebagaimana tampak pada grafik 5.8.

Secara pangsa outflow Kas Titipan Bank Indonesia di Bima yang melayani kebutuhan uang Rupiah untuk Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu berkontribusi dalam

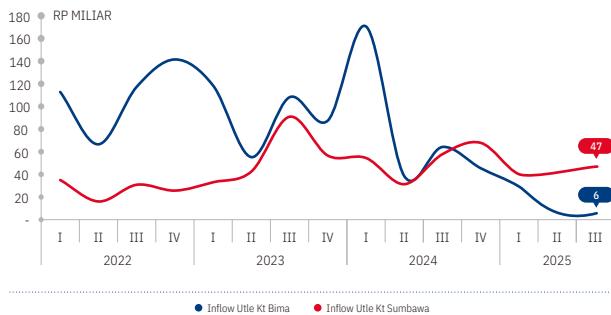
Grafik 5.6 Kegiatan kas keliling



Grafik 5.7 Perkembangan net flow di wilayah Kas Titipan Bima dan Sumbawa (minus menunjukkan outflow)



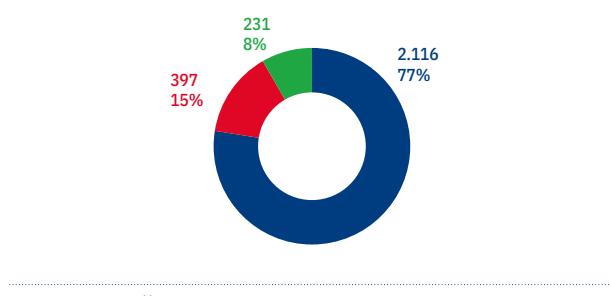
Grafik 5.8 Data Perkembangan penyerapan UTLE di wilayah kerja Kas Titipan



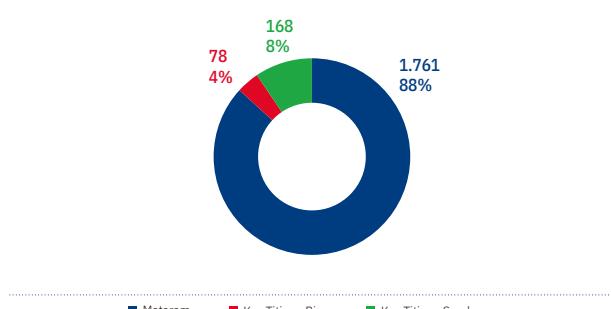
pemenuhan kebutuhan masyarakat sebesar 15% dari outflow Provinsi NTB. Sedangkan Kas Titipan Bank Indonesia di Sumbawa melayani kebutuhan uang Rupiah untuk Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebesar 8% dari outflow Provinsi NTB (grafik 5.1.9). Selain itu, keberadaan kedua kas titipan tersebut juga berkontribusi sebesar 12% terhadap upaya perbankan dalam menjaga efektifitas dan efisiensi kecukupan likuiditasnya dengan pangsa inflow pada Kas Titipan Bank Indonesia di Bima tercatat 4% dan di Sumbawa sebesar 8% (grafik 5.1.10).

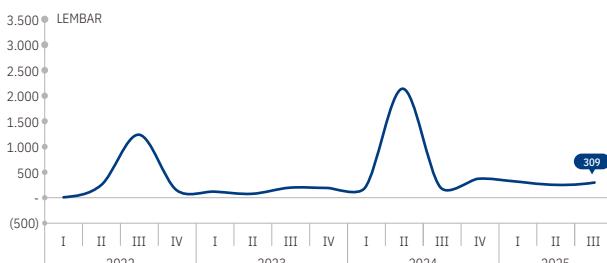
Jumlah *counterfeit banknotes* atau fisik uang Rupiah yang diragukan keasliannya berdasarkan laporan perbankan ataupun masyarakat triwulan III 2025 tercatat sebanyak

Grafik 5.9 Pangsa outflow berdasarkan wilayah layanan kas

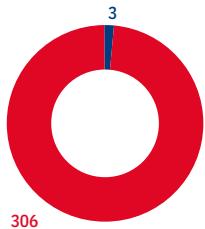


Grafik 5.10 Pangsa inflow berdasarkan wilayah layanan kas



Grafik 5.11 Temuan uang palsu

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.12 Sumber laporan uang palsu

Sumber : Bank Indonesia

309 lembar (grafik 5.1.11) yang hampir seluruhnya merupakan permintaan klarifikasi uang yang diragukan keasliannya dari perbankan sebanyak 306 lembar dan permintaan klarifikasi uang yang diragukan keasliannya dari masyarakat sebanyak 3 lembar (grafik 5.1.12).

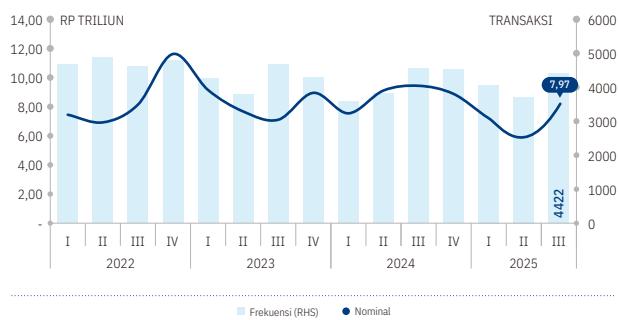
5.2 TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI

5.2.1 Transaksi *Real Time Gross Settlement (RTGS)*

Perkembangan transaksi *Real Time Gross Settlement (RTGS)* di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan III 2025 menunjukkan arah yang positif, seiring dengan meningkatnya aktivitas penyelesaian transaksi wholesale di daerah. RTGS terus menjadi tulang punggung sistem pembayaran bernali besar yang memastikan kelancaran transaksi korporasi, pemerintah daerah, lembaga keuangan, hingga berbagai aktivitas ekonomi strategis di NTB.

Pada periode laporan, frekuensi transaksi RTGS mencapai 4.422 ribu kali, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan menguatnya aktivitas ekonomi wholesale sejalan dengan perbaikan proses produksi dan distribusi, serta semakin aktifnya transaksi antar pelaku usaha dan lembaga keuangan. Kenaikan ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan transaksi bernali besar tetap terjaga dan mulai kembali normal setelah perlambatan pada awal tahun.

Dari sisi nominal, transaksi RTGS tercatat sebesar Rp7,97 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025. Pertumbuhan nominal ini sejalan dengan meningkatnya

Grafik 5.13 Perkembangan Transaksi RTGS

Sumber : Bank Indonesia

pembayaran proyek pemerintah daerah, realisasi belanja modal, serta aktivitas transaksi korporasi, khususnya pada sektor konstruksi, perdagangan besar, dan jasa keuangan, umumnya mulai meningkat menjelang akhir tahun. Meski belum kembali mencapai level puncak historis, peningkatan nilai transaksi ini menandakan adanya pemulihan likuiditas dan optimisme pelaku ekonomi terhadap prospek usaha di NTB.

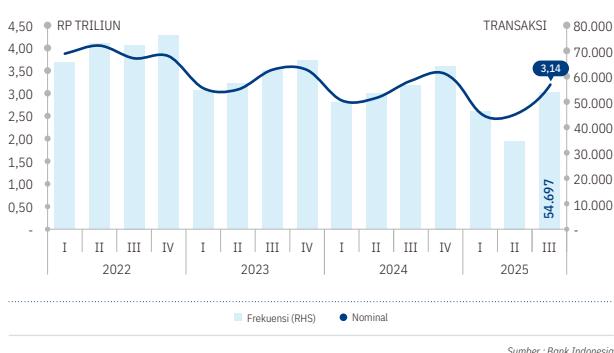
Secara keseluruhan, kinerja RTGS pada triwulan III 2025 menegaskan bahwa stabilitas dan kapasitas sistem pembayaran wholesale di NTB tetap terjaga, sekaligus memberikan dasar yang kuat bagi perbaikan aktivitas ekonomi pada periode berikutnya. Dengan realisasi anggaran pemerintah yang diperkirakan semakin meningkat, perbaikan kinerja sektor konstruksi, serta solidnya intermediasi keuangan, transaksi RTGS berpotensi melanjutkan tren positif dan mendukung momentum pemulihan ekonomi NTB secara berkelanjutan.

5.2.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) & BI-FAST

Perkembangan sistem pembayaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Triwulan III 2025 menunjukkan perbedaan arah antara kinerja SKNBI dan BI-FAST. Dari sisi kliring ritel, SKNBI mencatat perbaikan frekuensi setelah perlambatan yang terjadi pada triwulan sebelumnya. Frekuensi transaksi meningkat hingga mencapai 54,697 juta transaksi, pulih dari titik terendah sepanjang periode 2022–2025. Kendati demikian, nilai transaksi SKNBI hanya mencapai Rp3,14 triliun, sehingga peningkatan frekuensi tersebut mengindikasikan transaksi yang bersifat kecil (low value) dan belum mampu mengubah tren jangka panjang SKNBI yang relatif stagnan.

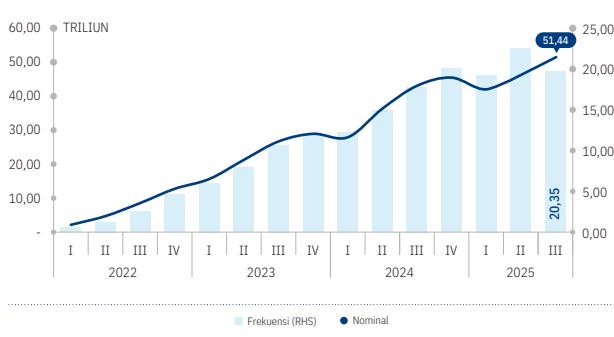
Berbeda dengan SKNBI, BI-FAST tetap menunjukkan kinerja yang solid pada triwulan laporan. Meskipun pola grafik mengindikasikan sedikit moderasi baik pada frekuensi maupun nilai dibandingkan Triwulan II 2025, volume transaksi masih tercatat tinggi, yakni 20,35 juta transaksi dengan nilai Rp51,44 triliun. Secara historis, capaian ini tetap berada pada level atas meskipun terjadi penyesuaian siklikal. Sejak implementasinya

Grafik 5.14 Perkembangan Transaksi SKNBI



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.15 Perkembangan Transaksi BI-FAST



Sumber : Bank Indonesia

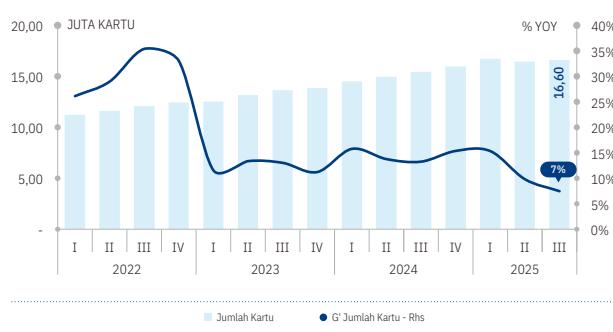
pada 2022, BI-FAST konsisten menjadi kanal utama transfer dana bagi masyarakat NTB, didorong oleh keunggulan kecepatan, biaya rendah, serta kenyamanan layanan.

Secara keseluruhan, pola perbandingan kedua instrumen pada Triwulan III 2025 memperlihatkan pergeseran preferensi masyarakat ke arah pembayaran digital *real-time*. Sementara SKNBI hanya mencatat pemulihan teknis pada sisi frekuensi, dominasi BI-FAST tetap kuat baik dari sisi nilai maupun efisiensi operasional. Temuan ini menunjukkan bahwa NTB terus berada pada lintasan percepatan digitalisasi sistem pembayaran, sejalan dengan berkembangnya aktivitas ekonomi digital dan meningkatnya adopsi masyarakat terhadap kanal pembayaran modern.

5.2.3 Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

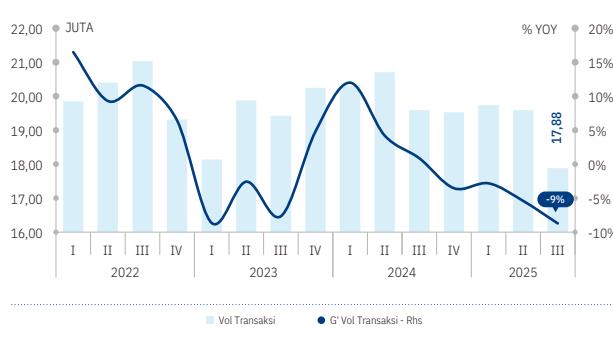
Pada Triwulan III 2025, perkembangan kartu debit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan dinamika yang bervariasi di antara indikator utama. Dari sisi jumlah kepemilikan, kartu debit yang beredar mencapai 16,60 juta kartu, meningkat 7% (yoY). Meskipun pertumbuhannya melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, ekspansi ini tetap mencerminkan meluasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Pertumbuhan jumlah kartu didorong oleh upaya industri perbankan dalam memperluas basis nasabah melalui pembukaan rekening baru serta bundling kartu debit pada produk tabungan, termasuk pada segmen pelajar, mahasiswa, dan masyarakat di wilayah suburban.

Grafik 5.16 Jumlah Kartu Kredit



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.17 Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit



Sumber : Bank Indonesia

Dari sisi volume transaksi, penggunaan kartu debit tercatat sebesar 17,88 juta kali, terkontraksi -9% (yoY). Koreksi ini mengindikasikan semakin kuatnya pergeseran preferensi kanal pembayaran masyarakat ke instrumen digital seperti QRIS dan dompet elektronik yang dinilai lebih praktis untuk transaksi harian bernilai kecil. Pertumbuhan ekosistem merchant QRIS di NTB, termasuk pasar tradisional, UMKM kuliner, retail modern, hingga transportasi, turut mempercepat relokasi transaksi dari kartu debit ke kanal digital.

Namun demikian, dari sisi nominal transaksi, kartu debit tetap menunjukkan kinerja positif. Nilai transaksi tercatat sebesar Rp26,49 triliun, tumbuh 27% (yoY). Pertumbuhan nominal yang jauh lebih tinggi dibandingkan volume transaksi menandakan peningkatan rata-rata nilai per transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa kartu debit masih menjadi pilihan utama untuk transaksi ritel bernilai relatif besar, seperti pembayaran kebutuhan rumah tangga, tagihan utilitas, pengeluaran periodik, serta transaksi melalui kanal ATM dan EDC untuk pembayaran tertentu yang memerlukan nominal lebih besar.

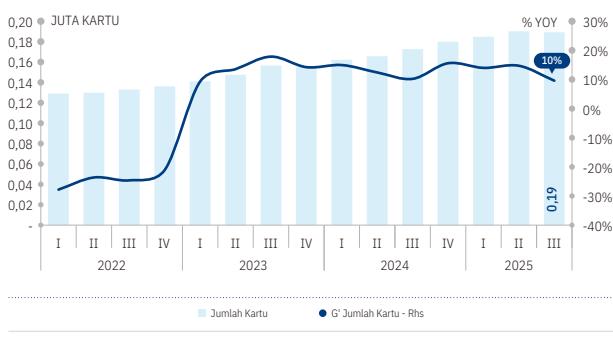
Secara keseluruhan, perkembangan kartu debit pada Triwulan III 2025 menegaskan perannya sebagai instrumen pembayaran yang tetap signifikan dalam ekosistem transaksi masyarakat NTB, khususnya untuk transaksi bernilai tinggi. Namun, tren penurunan volume juga mencerminkan akselerasi digitalisasi pembayaran, di mana instrumen berbasis QRIS dan dompet elektronik semakin dominan dalam transaksi harian bernilai kecil dan menengah.

Grafik 5.18 Perkembangan Nominal Transaksi Menggunakan Kartu Kredit



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.19 Jumlah Kartu kredit



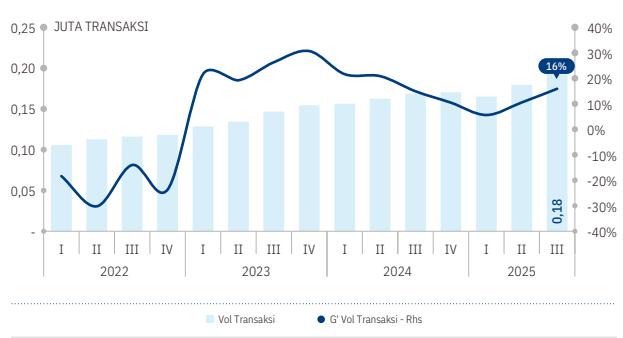
Sumber : Bank Indonesia

Pada triwulan III 2025, perkembangan kartu kredit di Provinsi NTB menunjukkan kinerja yang kembali menguat, terutama dari sisi transaksi, sementara pertumbuhan kepemilikan kartu cenderung stabil. Dari sisi jumlah kartu, kartu kredit yang beredar tercatat 0,19 juta kartu, tumbuh 10% (yoY). Pertumbuhan yang sedikit lebih moderat dibanding triwulan sebelumnya ini tetap mencerminkan eksplansi basis pengguna yang berkelanjutan, ditopang oleh strategi akuisisi perbankan serta perluasan segmen masyarakat kelas menengah di Mataram, Bima, dan Sumbawa Besar.

Berbeda dengan kepemilikan kartu yang tumbuh stabil, aktivitas transaksi menunjukkan pemulihannya. Volume transaksi kartu kredit mencapai 0,20 juta kali, tumbuh 16% (yoY). Kenaikan ini menandai rebound setelah perlambatan pada triwulan sebelumnya, didorong oleh meningkatnya aktivitas belanja masyarakat seiring momen pergantian kuartal, kebutuhan konsumsi pendidikan, perjalanan, dan gaya hidup. Meskipun kanal pembayaran alternatif seperti QRIS dan dompet elektronik terus berkembang, kartu kredit tetap menjadi pilihan utama untuk transaksi dengan nilai yang lebih besar dan kebutuhan yang lebih fleksibel.

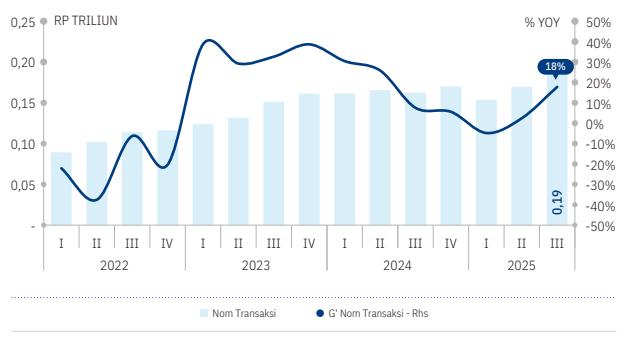
Dari sisi nominal transaksi, kartu kredit mencatatkan nilai sekitar Rp 0,19 triliun, dengan pertumbuhan 18% (yoY)—menjadi indikator penguatan konsumsi rumah tangga menengah atas di NTB. Pertumbuhan nominal yang lebih tinggi dibandingkan volume mengindikasikan bahwa nilai transaksi per kartu meningkat, terutama untuk pembelian elektronik,

Grafik 5.20 Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.21 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit



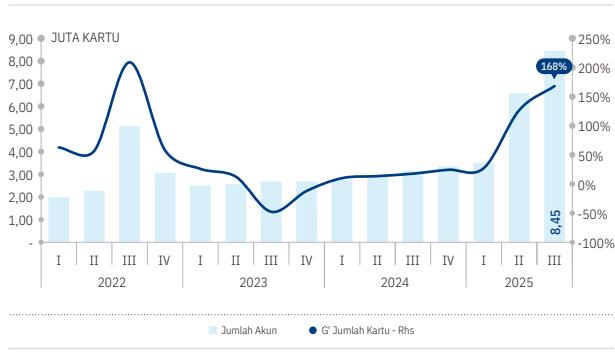
Sumber : Bank Indonesia

perjalanan, layanan kesehatan, serta pengeluaran kebutuhan pendidikan di awal tahun ajaran. Selain itu, pemanfaatan fitur cicilan dan promosi diskon bank turut mendorong pembelian bernilai besar.

Secara keseluruhan, perkembangan kartu kredit di NTB pada triwulan III 2025 menunjukkan momentum pemulihan setelah perlambatan pada triwulan sebelumnya. Basis kepemilikan tetap tumbuh stabil, sementara volume dan nominal transaksi kembali meningkat signifikan. Meski instrumen digital seperti QRIS dan e-wallet semakin mendominasi transaksi harian, kartu kredit tetap memegang peranan penting sebagai instrumen pembayaran untuk konsumsi bernilai tinggi dan kebutuhan finansial yang lebih fleksibel dalam ekosistem sistem pembayaran NTB.

Pada triwulan III 2025, perkembangan uang elektronik (UE) di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan akselerasi yang sangat kuat di seluruh indikator, baik kepemilikan akun, volume, maupun nominal transaksinya. Jumlah akun UE meningkat signifikan mencapai 8,45 juta akun, atau tumbuh 168% (yoY). Lonjakan ini menegaskan bahwa UE semakin menjadi instrumen pembayaran pilihan masyarakat NTB, ditopang oleh masifnya integrasi kanal pembayaran digital pada layanan publik, transportasi, e-commerce, hingga merchant UMKM. Selain itu, bank dan fintech terus memperluas onboarding pengguna melalui promosi, cashback, serta kemudahan registrasi akun.

Grafik 5.22 Jumlah Akun UE

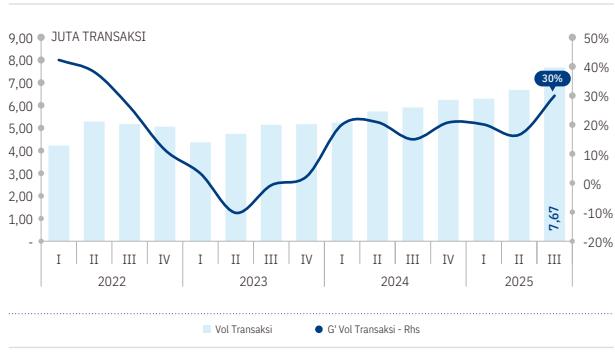


Dari sisi volume transaksi, penggunaan UE juga mencatatkan penguatan dengan capaian 7,67 juta kali, tumbuh 30% (yo). Peningkatan ini menggambarkan bahwa UE semakin melekat pada aktivitas transaksi harian masyarakat—mulai dari pembayaran belanja ritel, top-up aplikasi transportasi, hingga transaksi digital berbasis aplikasi. Perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang semakin mengarah ke pembayaran nontunai terus memperkuat posisi UE sebagai instrumen ritel dominan di NTB.

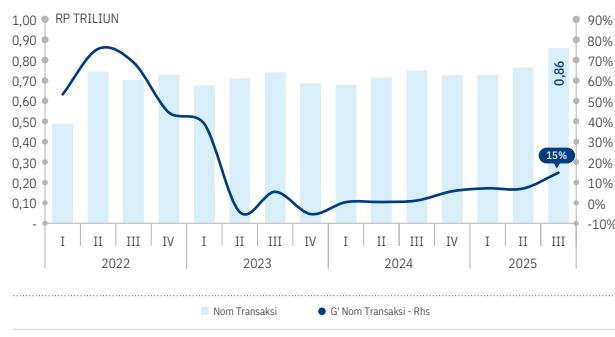
Sementara itu, dari sisi nominal transaksi, uang elektronik membukukan nilai sebesar Rp0,86 triliun, tumbuh 15% (yo). Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa UE tidak hanya digunakan untuk transaksi kecil (micro payment), tetapi juga mulai digunakan untuk transaksi bernilai lebih besar seperti pembayaran tagihan, layanan publik, hingga kebutuhan rumah tangga. Meningkatnya nilai transaksi mencerminkan kepercayaan masyarakat pada keamanan dan kecepatan UE sebagai kanal pembayaran yang efisien.

Secara keseluruhan, tren positif pada triwulan III 2025 menegaskan semakin kuatnya digitalisasi sistem pembayaran di NTB. Peningkatan tajam jumlah akun dan transaksi menunjukkan bahwa masyarakat dan pelaku usaha semakin terhubung dengan ekosistem pembayaran digital yang modern dan inklusif. Dengan demikian, uang elektronik terus memainkan peran strategis dalam mendukung percepatan inklusi keuangan, memperluas akses layanan formal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital daerah.

Grafik 5.23 Perkembangan Volume UE



Grafik 5.24 Perkembangan Nominal Transaksi UE

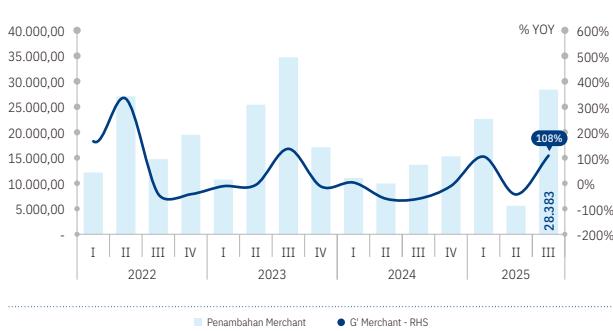


5.2.4 Perkembangan Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif

Implementasi elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan salah satu upaya strategis untuk mendukung penguatan tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat secara aktif berkolaborasi dengan seluruh Pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, melalui wadah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). TP2DD berperan sebagai satuan tugas yang bertanggung jawab dalam mendorong percepatan dan perluasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Indeks ETPD menjadi alat pemantauan penting untuk menilai sejauh mana digitalisasi telah diterapkan dalam proses transaksi keuangan daerah.

Hingga semester I 2025, tercatat sebanyak 10 (sepuluh) Pemerintah Daerah di Provinsi NTB telah terindeks digital, jumlah yang meningkat dibandingkan semester II tahun 2024. Ke-10 Pemda tersebut terdiri dari Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Kota Bima, serta tujuh pemerintah kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Bima, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, dan Sumbawa Barat. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat dari para Pemda dalam menjalankan agenda digitalisasi, sekaligus menunjukkan kesiapan infrastruktur dan dukungan kelembagaan yang terus diperkuat.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB terus mendorong optimalisasi pemanfaatan instrumen pembayaran nontunai dalam berbagai transaksi keuangan Pemda, khususnya untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi. Upaya ini sejalan dengan tujuan utama ETPD, yaitu menciptakan sistem pembayaran yang lebih modern, transparan, serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, perluasan pemanfaatan kanal pembayaran digital berbasis Person to Government (P2G) diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

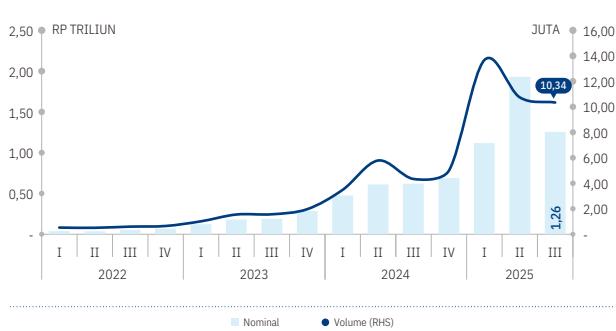
Grafik 5.25 Perkembangan Jumlah Merchant QRIS

Sumber : Bank Indonesia

Sebagai bagian dari perluasan elektronifikasi, salah satu instrumen yang turut didorong dalam ekosistem pembayaran daerah adalah Kartu Kredit Indonesia (KKI). KKI merupakan bentuk dukungan terhadap Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) serta program afirmatif Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Tujuan utama dari implementasi KKI adalah mendorong kemandirian nasional dalam sistem pembayaran, menjamin kedaulatan data transaksi pemerintah, serta meningkatkan efisiensi biaya dan akseptasi di kalangan pelaku usaha, terutama UMKM. Di Provinsi NTB, KKI fisik telah diterbitkan oleh PT BPD NTB Syariah melalui skema co-branding dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan saat ini telah diimplementasikan oleh tiga Pemda, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kota Mataram.

Di samping itu, tiga Pemda lainnya yakni, Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Barat telah menjalin kerja sama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT BPD NTB Syariah sebagai bentuk komitmen terhadap adopsi KKI. Sampai dengan triwulan-III 2025, transaksi menggunakan KKI fisik tercatat sebesar Rp445,7 juta, menunjukkan arah yang positif dalam digitalisasi belanja pemerintah. Ke depan, pengembangan fitur KKI melalui kanal QRIS dan online payment diharapkan dapat memperluas jangkauan dan efektivitas penggunaannya. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat elektronifikasi belanja pemerintah, tetapi juga menjadi penggerak transaksi yang akuntabel.

Salah satu success story implementasi digitalisasi transaksi pemerintah di Provinsi NTB adalah Elektronifikasi Parkir Tepi Jalan di Kota Mataram. Atas inisiasi Bank Indonesia, Dinas Perhubungan Kota Mataram meluncurkan aplikasi SIJUKIR sebagai inovasi dalam proses penerimaan retribusi parkir melalui penggunaan QRIS. Melalui aplikasi ini, Dinas Perhubungan selaku SKPD pengampu dapat melakukan pemantauan penerimaan retribusi dari setiap Juru Parkir dan Titik Parkir secara real time. Lebih lanjut, aplikasi tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja dari setiap Juru Parkir yang tercermin dari realisasi setoran, serta kolom pengaduan per lokasi parkir yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Grafik 5.26 Perkembangan Transaksi QRIS di Provinsi NTB

Sumber : Bank Indonesia

Perkembangan QRIS di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan III 2025 menunjukkan akselerasi yang sangat kuat, baik dari sisi merchant maupun dari sisi transaksi. Jumlah merchant QRIS bertambah sebanyak 28.383 merchant, dengan pertumbuhan 108% (yoY). Pertumbuhan pesat ini tidak hanya menandai berlanjutnya ekspansi QRIS, tetapi juga menunjukkan keberhasilan berbagai upaya penertiban merchant dormant pada triwulan sebelumnya, sehingga merchant yang tersisa saat ini merupakan merchant yang lebih aktif dan produktif. Dengan basis merchant yang semakin berkualitas dan tersebar di berbagai sektor, QRIS tetap menjadi instrumen utama dalam mendukung digitalisasi UMKM dan perdagangan ritel di NTB.

Dari sisi transaksi, kinerja QRIS pada triwulan III 2025 melonjak signifikan dan mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nominal transaksi menembus Rp1,26 triliun, didorong oleh volume transaksi yang mencapai 10,34 juta kali. Pertumbuhan kuat ini mencerminkan tingginya preferensi masyarakat NTB dalam beralih ke pembayaran digital berbasis QRIS yang lebih cepat, aman, efisien, dan minim risiko uang palsu. Peningkatan literasi digital, kampanye nasional QRIS, serta sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, perbankan, dan ekosistem UMKM turut memperluas penggunaan QRIS pada berbagai sektor seperti pasar tradisional, transportasi, restoran, pariwisata, hingga layanan publik.

Kombinasi antara pertumbuhan merchant yang tinggi dan lonjakan volume transaksi mengindikasikan bahwa QRIS telah memasuki fase pemanfaatan yang matang di NTB. QRIS bukan lagi sekadar alternatif pembayaran, tetapi telah menjadi sarana utama untuk mendorong inklusi keuangan digital, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperkuat ekosistem ekonomi digital daerah. Tingginya pertumbuhan volume juga menunjukkan peningkatan frekuensi penggunaan QRIS oleh pengguna eksisting, yang menandakan perubahan perilaku masyarakat ke kebiasaan transaksi nontunai.

Secara spasial, distribusi merchant QRIS masih menunjukkan konsentrasi utama di wilayah-wilayah ekonomi besar. Kota Mataram menjadi kontributor terbesar dengan 107.921 merchant atau 28,6%, menjadikannya pusat dominan

ekosistem QRIS di NTB. Kabupaten di Pulau Lombok lainnya juga menjadi pendorong signifikan: Lombok Timur (55.653 merchant / 14,8%), Lombok Barat (49.115 / 13,0%), dan Lombok Tengah (44.251 / 11,7%). Keempat wilayah ini secara total menyumbang lebih dari 68% merchant QRIS NTB, menunjukkan bahwa Pulau Lombok masih menjadi episentrum adopsi pembayaran digital.

Sementara itu, Pulau Sumbawa memiliki kontribusi yang cukup besar melalui Kota Bima dengan 43.906 merchant (11,6%) dan Kabupaten Sumbawa dengan 34.878 merchant (9,3%). Meski demikian, beberapa daerah masih relatif tertinggal seperti Kabupaten Dompu (16.236 merchant / 4,3%) dan Kabupaten Sumbawa Barat (9.433 merchant / 2,5%). Ketimpangan spasial ini menunjukkan perlunya strategi akselerasi di daerah-daerah dengan penetrasi rendah.

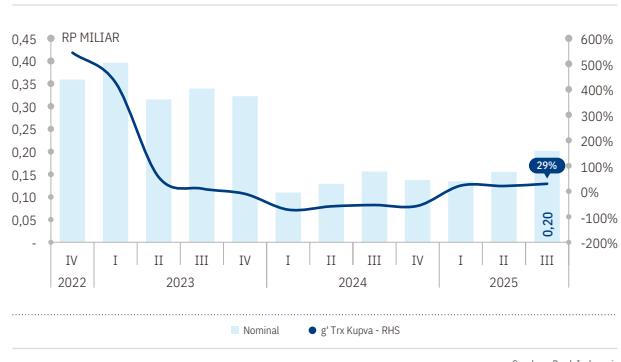
Untuk mendorong perluasan QRIS secara lebih merata, KPw BI NTB terus melaksanakan berbagai kegiatan kampanye dan edukasi selama triwulan III 2025. Edukasi dan pengalaman langsung penggunaan QRIS diberikan melalui Operasi Pasar, kegiatan Jumat Berkah Bersama QRIS, dan partisipasi rutin dalam Car Free Day di berbagai kota. Selain itu, kerja sama dengan asosiasi UMKM serta penyedia layanan publik terus diperkuat untuk mendorong digitalisasi pembayaran di berbagai lini. Rangkaian inisiatif ini mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat budaya transaksi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan di seluruh wilayah NTB.

5.3 TRANSAKSI KUPVA BB DAN PJP LR

Dalam rangka menciptakan ekosistem transaksi valuta asing yang aman dan terpercaya, Bank Indonesia menetapkan ketentuan yang mengatur perizinan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB). Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 dan Surat Edaran No. 18/42/DKSP, yang mengatur secara komprehensif mulai dari tata cara perizinan hingga pelaporan dan prinsip kehati-hatian dalam operasional. Melalui regulasi ini, Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mencegah praktik ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pengawasan terhadap KUPVA BB penting dilakukan di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan aktivitas usaha lintas negara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Merespons dinamika tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB terus memperkuat pengawasan terhadap KUPVA BB untuk memastikan seluruh kegiatan penukaran valuta asing berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan melalui inspeksi lapangan, pemantauan transaksi, serta koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait. Tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, langkah ini juga mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan berintegritas.

Grafik 5.27 Perkembangan Transaksi KUPVA BB



Sumber : Bank Indonesia

Sebagai pelengkap dari fungsi pengawasan, Bank Indonesia juga secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya menggunakan layanan penukaran valuta asing yang legal dan berizin. Edukasi ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran kolektif serta memperkuat literasi keuangan masyarakat, sehingga mereka dapat melakukan transaksi valuta asing secara aman dan sesuai ketentuan. Melalui sinergi antara pengawasan yang ketat dan edukasi yang berkelanjutan, kegiatan penukaran valuta asing di Provinsi NTB diharapkan tidak hanya tumbuh secara sehat, tetapi juga mampu menjadi penopang yang andal bagi sektor pariwisata dan perdagangan internasional yang terus berkembang di wilayah ini.

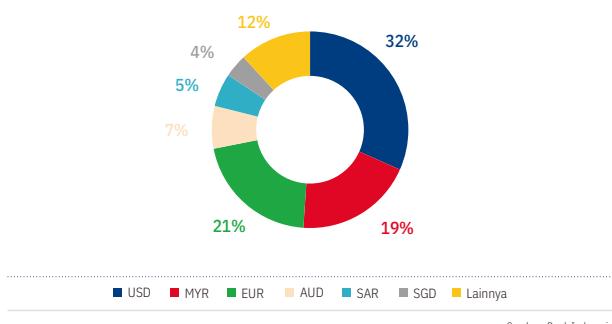
Pada triwulan III 2025, transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat nilai sebesar **Rp0,20 miliar**, atau tumbuh **29% (yoy)**. Kinerja ini menunjukkan kelanjutan tren perbaikan setelah periode pelemahan yang cukup panjang sepanjang 2023 hingga awal 2024, ketika transaksi KUPVA BB mengalami penurunan tajam akibat terbatasnya mobilitas wisatawan internasional dan rendahnya aktivitas perdagangan lintas wilayah.

Peningkatan transaksi pada triwulan laporan menjadi indikasi semakin pulihnya permintaan terhadap layanan penukaran valuta asing di NTB. Faktor pendorongnya antara lain mulai normalnya aktivitas perjalanan internasional, meningkatnya arus wisatawan mancanegara ke Lombok—terutama pada momentum event pariwisata dan olahraga—serta penguatan aktivitas perdagangan lokal yang membutuhkan layanan valas.

Meskipun demikian, level transaksi saat ini masih berada di bawah capaian sebelum masa pelemahan 2023, sehingga pemulihannya KUPVA BB dapat dikatakan bersifat bertahap. Pelaku usaha KUPVA BB cenderung masih berhati-hati dalam memperluas layanan mengingat volatilitas permintaan dan persaingan dengan kanal digital perbankan yang menyediakan layanan valas secara lebih praktis.

Secara keseluruhan, pertumbuhan pada triwulan III 2025 memberikan sinyal positif bahwa aktivitas KUPVA BB di NTB mulai kembali stabil, seiring pulihnya sektor-sektor ekonomi

Grafik 5.28 Pangsa Transaksi Beli KUPVA BB



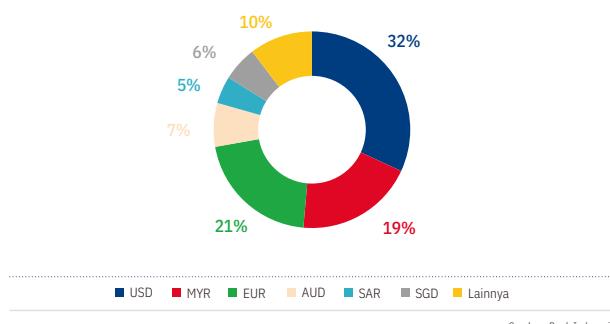
yang menjadi motor utama kebutuhan valuta asing. Apabila tren penguatan mobilitas wisatawan dan perdagangan internasional berlanjut, potensi pertumbuhan transaksi KUPVA BB diperkirakan akan semakin meningkat pada periode mendatang.

Pada sisi transaksi beli KUPVA BB, mata uang USD mendominasi dengan pangsa sebesar 32%, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap dolar AS sebagai alat transaksi internasional, baik untuk perdagangan maupun keperluan wisata. Posisi berikutnya diambil oleh EUR dengan pangsa 21%, yang mencerminkan meningkatnya transaksi terkait aktivitas pendidikan, perjalanan, maupun perdagangan dengan negara-negara Eropa. Sementara itu, MYR (Ringgit Malaysia) tercatat sebesar 19%, sejalan dengan kuatnya hubungan mobilitas pekerja migran asal NTB ke Malaysia. Mata uang lain seperti SAR sebesar 12%, AUD sebesar 7%, serta SGD sebesar 5% juga cukup signifikan, menggambarkan diversifikasi kebutuhan masyarakat NTB terhadap berbagai mata uang asing sesuai dengan tujuan kegiatan ekonomi lintas negara.

Sementara pada sisi transaksi jual KUPVA BB, pola yang terbentuk relatif serupa dengan transaksi beli, dengan USD kembali menjadi mata uang dominan sebesar 32%, diikuti oleh MYR dengan pangsa 19% dan EUR sebesar 21%. Kehadiran Ringgit Malaysia dalam proporsi besar di sisi jual memperlihatkan tingginya arus remitansi dari pekerja migran asal NTB yang bekerja di Malaysia, di mana dana yang diterima kemudian dikonversi kembali ke rupiah. Selain itu, AUD tercatat sebesar 7% dan SGD sebesar 6%, yang juga mencerminkan adanya hubungan ekonomi dan sosial dengan Australia serta Singapura, baik dalam sektor pendidikan, wisata, maupun perdagangan jasa. Pola ini menegaskan bahwa transaksi jual KUPVA BB di NTB tidak hanya mencerminkan kebutuhan wisatawan, tetapi juga erat kaitannya dengan dinamika remitansi dan aktivitas ekonomi masyarakat daerah.

Seperti halnya pengawasan terhadap KUPVA BB, Bank Indonesia juga secara aktif menjalankan fungsi perizinan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Jasa Pembayaran untuk Layanan Remitansi (PJP LR). PJP LR merupakan entitas yang berwenang melakukan pengiriman dana atas perintah

Grafik 5.29 Pangsa Transaksi Jual KUPVA BB

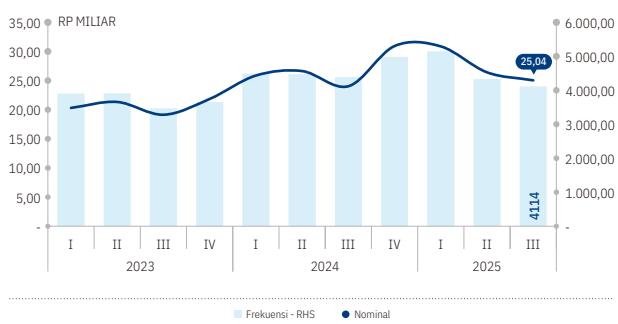


nasabah, termasuk dalam bentuk remitansi dari luar negeri. Kegiatan ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/23/PBI/2021 tentang Transfer Dana, serta diperkuat oleh Surat Edaran Bank Indonesia No.15/23/DASP dan No.16/1/DKSP, yang mengatur penyelenggaraan serta pelaporan kegiatan transfer dana oleh badan usaha berbadan hukum Indonesia yang bukan bank. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, hingga saat ini terdapat satu perusahaan PJPLR berizin.

Pada triwulan III 2025, frekuensi transaksi Penyelenggara Jasa Pengiriman Uang Langsung (PJP LR) di Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali mengalami penurunan menjadi 4.114 kali, melanjutkan tren penyesuaian yang telah terjadi sejak paruh pertama tahun. Penurunan ini juga diikuti oleh nominal remitansi yang tercatat sebesar Rp25,04 miliar, atau berada pada level yang lebih rendah dibandingkan puncak transaksi pada tahun 2024.

Perkembangan ini mengindikasikan adanya perubahan dalam pola remitansi yang diterima masyarakat NTB, baik dari sisi jumlah pengirim maupun nilai pengiriman per transaksi. Beberapa faktor eksternal turut memengaruhi dinamika remitansi, termasuk kondisi ekonomi global di negara tujuan pekerja migran, perlambatan sektor-sektor tertentu yang menyerap tenaga kerja Indonesia, serta volatilitas nilai tukar yang memengaruhi besaran remitansi yang dikirimkan. Di sisi lain, faktor domestik seperti kebutuhan konsumsi rumah tangga dan pola pengeluaran musiman pekerja migran juga memainkan peran penting.

Grafik 5.30 Perkembangan Transaksi PJP LR



Meski terjadi penurunan, remitansi tetap menjadi sumber ketahanan ekonomi rumah tangga penerima, khususnya di daerah kantong pekerja migran seperti Lombok Timur, Lombok Tengah, Bima, dan Sumbawa. Remitansi terus berkontribusi dalam menjaga daya beli, pembiayaan pendidikan, kebutuhan kesehatan, serta perputaran ekonomi lokal melalui konsumsi dan usaha mikro.

Secara keseluruhan, dinamika triwulan III menunjukkan bahwa remitansi di NTB berada pada fase penyesuaian setelah periode ekspansi yang kuat pada 2024. Ke depan, arah perbaikan diperkirakan sangat dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi di negara tujuan pekerja migran, stabilitas nilai tukar, serta efektivitas layanan PJP LR dalam memberikan layanan remitansi yang cepat, aman, dan terjangkau.



Ketenagakerjaan & Kesejahteraan

Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTB mengalami peningkatan 0,38% (oy) dan tercatat sebanyak 0,32 juta orang pada Agustus 2025. Meski demikian, peningkatan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga meningkat dari 2,73% pada Agustus 2024 menjadi 3,06% pada Agustus 2025 yang dikontribusikan oleh peningkatan TPT Perkotaan sebesar 0,46% (ptp).

Tingkat kemiskinan di Provinsi NTB mengalami penurunan yang dikontribusi oleh penurunan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan. Tingkat kemiskinan di Provinsi NTB mengalami penurunan dari 12,91% pada Maret 2024 menjadi 11,78% pada Maret 2025.

Nilai Tukar Petani pada September 2025 meningkat 1,39% (ptp) dibandingkan Juni 2025, didorong oleh peningkatan indeks yang diterima petani dan indeks yang dibayar petani. Secara sektoral, peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan sektor tanaman bahan pangan dan perikanan masing-masing sebesar 7,13% (ptp) dan 2,45% (ptp).

Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB meningkat sebesar 0,87% (ptp) dari 72,25 pada tahun 2024 menjadi 73,97 pada tahun 2025. Peningkatan IPM tersebut ditopang oleh peningkatan semua komponennya yakni umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran ril per kapita. Meski demikian, IPM Provinsi NTB tercatat masih di bawah Nasional yang sebesar 75,90.

6.1 KETENAGAKERJAAN

6.1.1 Perkembangan Ketenagakerjaan

Ketersediaan tenaga kerja di NTB pada Agustus 2025 meningkat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk usia kerja di NTB pada Agustus 2025 sebesar 4,21 juta orang atau meningkat 1,86% (yoy). Kondisi ini mencerminkan ketersediaan tenaga kerja usia produktif di NTB yang meningkat. Jumlah penduduk usia produktif yang menjadi angkatan kerja juga mengalami peningkatan dari 31,93 juta orang pada Agustus 2024 menjadi 32,05 juta pada Agustus 2025 atau tumbuh sebesar 0,38% (yoy). Adapun jumlah angkatan kerja di NTB memiliki porsi 2,08% dari total angkatan kerja nasional.

Lebih lanjut, angkatan kerja tumbuh 0,38% (yoy), tetapi diiringi peningkatan bukan angkatan kerja yang lebih tinggi yakni 6,87% (yoy) pada Agustus 2025. Kondisi tersebut mengindikasikan penurunan partisipasi dan utilisasi tenaga kerja yang tecerminkan dari penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja, dari 77,23% pada Februari 2025 menjadi 76,50% pada Agustus 2025 (Tabel 6.1). Sejalan dengan itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami peningkatan yang didorong oleh peningkatan TPT di wilayah perkotaan sebesar 0,33% (ptp) menjadi 3,37% pada Agustus 2025. Lebih lanjut, TPT perdesaan juga mengalami peningkatan 0,13% (ptp) dan menjadi 2,66% pada Agustus 2025.

Struktur tenaga kerja pada lapangan usaha di NTB tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sektor Pertanian masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di NTB. Pada Agustus 2025, Sektor Pertanian menyerap 1,09 juta orang tenaga kerja atau 35,39% dari total penduduk bekerja (Tabel 1.2). Angka ini menurun dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 1,12 juta orang. Penurunan tenaga kerja di sektor pertanian diakibatkan oleh gagal panen di beberapa wilayah akibat faktor cuaca. Pada periode tersebut, data Kerangka Sampel Area BPS yang menunjukkan pertumbuhan hasil produksi jagung mengalami kontraksi mencapai mencapai -28,69% (yoy) pada triwulan III 2025.

Sektor perdagangan menempati posisi kedua dengan menyerap 0,59 juta orang atau 19,05% dari penduduk bekerja NTB. Jumlah pekerja di sektor perdagangan mengalami peningkatan sebesar 0,89% (yoy) pada Agustus 2025. Sejalan dengan itu, sektor industri pengolahan menempati posisi ketiga dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,32 juta orang atau 10,25% dari penduduk bekerja. Pangsa tersebut mengalami peningkatan 0,08% (ptp) atau tumbuh 0,84% (yoy) dibandingkan Februari tahun sebelumnya seiring peningkatan kinerja sub-sektor industri pengolahan logam dasar seiring dimulainya komersialisasi mesin precious metals refinery (PMR) berupa emas granula.

Berdasarkan status pekerjaan utama, pada Agustus 2025 tenaga kerja dominan di NTB masih bergerak di sektor informal. Tercatat pekerja informal di NTB yaitu 68,42% dari jumlah penduduk bekerja atau sebanyak 2,13 juta orang (Tabel 6.3). Lebih lanjut, jumlah pekerja sektor informal mengalami penurunan -2,92% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan jumlah tenaga kerja pada sektor informal terutama didorong oleh penurunan pekerja bebas nonpertanian yang mencapai -27,14% (yoy). Sementara itu, jumlah tenaga kerja di sektor formal pada Agustus 2025 meningkat 7,11% (yoy). Jumlah pekerja formal meningkat dari 0,92 juta pekerja pada Agustus 2024 menjadi 0,98 juta pada Agustus 2025. Peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai masing-masing sebesar 13,56% (yoy) dan 6,55% (yoy).

Namun demikian, produktivitas tenaga kerja yang tecerminkan dari jumlah jam kerja ≥ 35 jam per minggu (pekerja penuh) mengalami penurunan. Jumlah kelompok pekerja waktu penuh sebanyak 1,69 juta orang atau menurun -5,30% (yoy) pada Februari 2025 (Tabel 6.4). Meski demikian, kelompok pekerja tidak penuh masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di NTB yaitu sebesar 54,90% terhadap total pekerja. Penurunan

Tabel 6.1. Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi NTB (ribu orang)

Kegiatan	2023		2024		2025	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
Penduduk Usia Kerja	4028,85	4059,60	4097,07	4133,78	4170,86	4210,58
Angkatan Kerja	2867,12	2976,23	3030,47	3192,56	3190,74	3204,66
Bekerja	2760,32	2892,98	2930,31	3105,55	3088,11	3106,73
Pengangguran	106,80	83,24	100,15	87,01	102,63	97,93
Bukan Angkatan Kerja	1161,73	1083,38	1066,60	941,22	980,12	1005,92
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	71,16	73,31	73,97	77,23	76,50	76,11
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	3,73	2,80	3,30	2,73	3,22	3,06
Perkotaan	4,71	3,27	4,56	2,91	4,10	3,37
Perdesaan	2,82	2,32	1,95	2,53	2,21	2,66

Sumber: Sakernas, diolah

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (ribu orang)

Sektor Ekonomi	2023		2024		2025	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
Pertanian	938,31	970,34	960,07	1122,82	1003,73	1098,81
Perdagangan	500,63	529,88	602,18	586,65	678,11	591,92
Industri Pengolahan	261,67	358	269,86	315,84	263,99	318,5
Akomodasi dan Makan Minum	193,15	162,04	215,58	177,58	223,33	178,57
Pendidikan	215,42	202,17	156,4	177,01	202,54	197,15
Lainnya	651,14	670,55	726,22	725,65	716,41	721,78
Total	2760,32	2892,98	2930,31	3105,55	3088,11	3106,73

Sumber: Sakernas, diolah

Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (ribu orang)

Status Pekerjaan Utama	2023		2024		2025	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
Sektor Formal	707,83	801,31	782,59	915,86	870,88	980,95
Berusaha dibantu buruh tetap	45,44	68,27	46,16	72,49	47,45	82,32
Buruh/karyawan/pegawai	662,39	733,04	736,43	843,37	823,43	898,63
Sektor Informal	2052,50	2091,66	2147,74	2189,69	2217,24	2125,78
Berusaha sendiri	562,86	616,07	569,63	605,42	631,84	678,19
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	655,16	611,80	671,97	614,29	729,17	532,23
Pekerja bebas di pertanian	94,26	177,70	152,90	219,74	88,69	262,59
Pekerja bebas di nonpertanian	214,72	232,40	202,56	204,05	174,21	148,68
Pekerja keluarga/tidak dibayar	525,50	453,69	550,68	546,19	593,33	504,09
Total	2760,33	2892,97	2930,33	3105,55	3088,12	3106,73

Sumber: Sakernas, diolah

pekerja penuh waktu disebabkan oleh penurunan pekerja di sektor industri seiring penurunan kinerja subsektor pengolahan tembakau paska El Nino yang mendorong produksi pada tahun 2024. Selain itu, berakhirnya pembangunan smelter dan realokasi anggaran yang menyebabkan penurunan proyek fisik pemerintah menyebabkan tenaga kerja di sektor konstruksi mengalami penurunan 24,09% (yoY) pada tahun 2025.

Di sisi lain, jumlah pekerja tidak penuh (1-34 jam per minggu) mengalami peningkatan dari 1,14 juta orang pada Februari 2024 menjadi 1,39 juta orang atau tumbuh 22,15% (yoY) pada periode laporan (Tabel 6.4). Peningkatan utamanya didorong oleh kelompok pekerja setengah penganggur yang tumbuh mencapai 34,29% (yoY) pada Februari 2025. Kelompok pekerja ini adalah mereka yang memiliki pekerjaan tetap tetapi belum optimal sehingga produktivitas dan pendapatan mereka cenderung rendah. Adapun pekerja paruh waktu turut mengalami peningkatan dari 0,69 juta orang pada Februari 2024 menjadi 0,79 juta orang pada periode laporan. Peningkatan kelompok pekerja tidak penuh tersebut mengindikasikan pergeseran tenaga kerja waktu penuh menjadi tenaga kerja paruh waktu akibat utilitas tenaga kerja yang tidak optimal dan dapat mendorong tekanan terhadap pendapatan rumah tangga.

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk bekerja di NTB masih didominasi oleh pekerja sekolah dasar ke bawah sebesar 38,20% pada Februari 2025 (Tabel 6.5). Meski demikian, pangsa tersebut mengalami penurunan dibandingkan Februari 2024 yang mencapai 45,45% terhadap total pekerja di NTB. Sejalan dengan hal tersebut, terjadi peningkatan tenaga kerja terampil dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) khususnya kejuruan yang meningkat 16,07% (yoY) dibandingkan Februari 2024. Selain itu, pekerja dengan pendidikan diploma dan universitas juga tumbuh teraksesasi mencapai 25,90% (yoY). Hal tersebut mengindikasikan perbaikan kualitas tenaga kerja NTB seiring meningkatnya kontribusi tenaga kerja berpendidikan menengah dan tinggi yang berpotensi mendorong produktivitas tenaga kerja ke depan, serta mendukung transformasi struktural perekonomian daerah.

]Perkembangan indikator ketenagakerjaan hingga triwulan II 2025 tetap optimis, meskipun mengalami tren penurunan. Indeks ketersediaan lapangan kerja terus berada pada level optimis (di atas 100) sejak tahun 2022. Indeks ketersediaan lapangan kerja pada triwulan II 2025 berada pada level 111,50, relatif menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 112,00 (Gambar 6.1). Sejalan dengan hal tersebut, indeks penghasilan juga relatif mengalami

Tabel 6.4. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (ribu orang)

Penduduk Yang Bekerja	2023		2024		2025	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
Pekerja Penuh (≥ 35 jam)	1584,80	1794,90	1790,12	1846,67	1695,32	1846,38
Pekerja Tidak Penuh (1-34 jam)	1175,53	1098,08	1140,19	1258,87	1392,79	1260,35
Setengah Penganggur	424,05	371,16	451,54	472,91	606,36	433,09
Pekerja Paruh Waktu	751,48	726,92	688,65	785,96	786,43	827,26
Total	2760,33	2892,98	2930,31	3105,54	3088,11	3106,73

Sumber: Sakernas, diolah

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (ribu orang)

Penduduk Yang Bekerja	2023		2024		2025	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
SD ke bawah	1136,11	1217,43	1331,76	1288,61	1179,52	1190,57
Sekolah Menengah Pertama	417,99	467,63	422,18	490,34	495,87	518,34
Sekolah Menengah Atas	620,63	637,83	639,18	700,18	755,14	743,98
Sekolah Menengah Kejuruan	200,28	178,32	190,68	209,29	221,33	232,69
Diploma I/II/III & Universitas	385,33	391,78	346,51	417,13	436,25	421,15
Total	2760,34	2892,99	2930,31	3105,55	3088,11	3106,73

Sumber: Sakernas, diolah

penurunan dari 118,00 pada triwulan I 2025 menjadi 116,50 pada triwulan II 2025 (Gambar 6.1). Penurunan tersebut diperkirakan terus berlanjut hingga akhir tahun 2025. Meskipun indeks perkiraan tenaga kerja dan penghasilan 6 bulan mendatang mengalami penurunan, nilainya masih berada pada level optimis (Gambar 6.2).

6.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

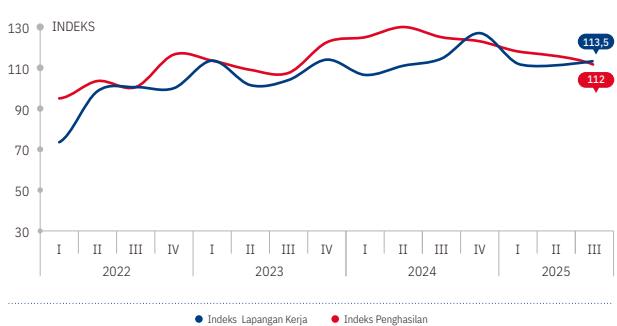
Jumlah pengangguran di NTB mengalami peningkatan pada Agustus 2025. Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau pengangguran pada Agustus 2025 sebanyak 0,09 juta orang, atau meningkat 0,01 juta dibandingkan Agustus 2024 (Tabel 6.1). Kenaikan jumlah pengangguran didorong oleh kenaikan jumlah angkatan kerja yang tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut, tingkat pengangguran terbuka (TPT) NTB mengalami peningkatan, dari 2,73% pada Agustus 2024 menjadi 3,06% pada Agustus 2025. Angka tersebut lebih baik dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 4,85%. Berdasarkan

lokasi tempat tinggal, TPT NTB pada Agustus 2025 untuk wilayah perkotaan (3,37%) lebih tinggi dibandingkan TPT wilayah perdesaan (2,66%).

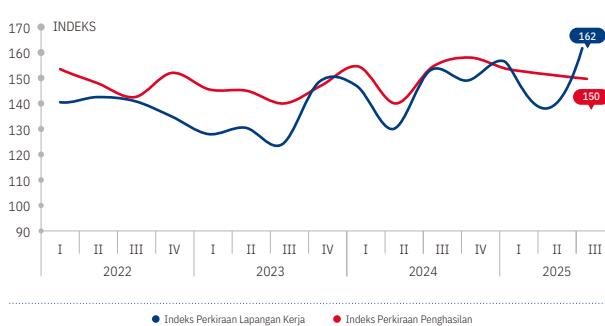
6.2 KESEJAHTERAAN

6.2.1 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan NTB mengalami penurunan, baik dari jumlah maupun rasio penduduk miskin. Angka kemiskinan NTB pada Maret 2025 sebesar 654,57 ribu jiwa, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 709,01 ribu jiwa (Grafik 6.3). Dengan perkembangan tersebut, rasio penduduk miskin di NTB menjadi sebesar 11,78% dari total penduduk NTB, lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang tercatat sebesar 12,91%. Meski demikian, tingkat kemiskinan NTB masih lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan Nasional yang sebesar 8,47% pada Maret 2025.

Grafik 6.1 Indeks Kondisi Ekonomi

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.2 Indeks Ekspektasi Ekonomi

Sumber: Bank Indonesia, diolah

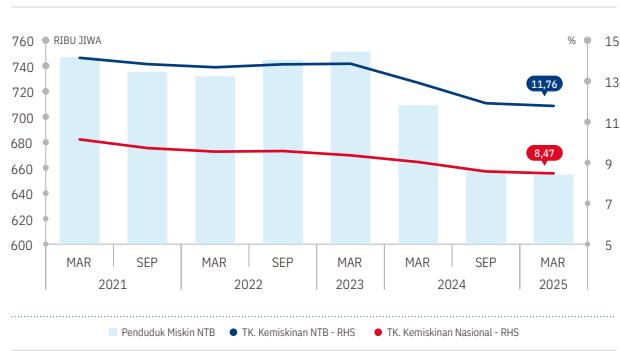
Penurunan tingkat kemiskinan utamanya didorong oleh wilayah perdesaan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan menurun dari 340,47 ribu jiwa pada Maret 2024 menjadi 300,89 ribu jiwa pada periode laporan. Hal tersebut berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin di perdesaan dari 12,95% pada Maret 2024 menjadi 11,51% pada Maret 2025. Penurunan kemiskinan tersebut didorong oleh berlangsungnya masa panen raya komoditas padi di wilayah perdesaan yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan mengalami peningkatan dari 11,64% pada Maret 2024 menjadi 12,02% pada periode laporan.

Garis kemiskinan NTB terus mengalami peningkatan sebesar 4,14% (yoY) atau Rp556.846 per kapita/bulan pada Maret 2025. Peningkatan garis kemiskinan di NTB terutama didorong oleh peningkatan garis kemiskinan di wilayah perkotaan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan di wilayah perkotaan sebesar Rp556.846 per kapita/bulan atau meningkat 4,87% (yoY) dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Sejalan dengan itu, garis kemiskinan wilayah perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 3,15% (yoY) dan tercatat sebesar Rp537.105 per kapita/bulan pada Maret 2025 (Tabel 6.6).

Lebih lanjut, peningkatan garis kemiskinan NTB tersebut baik untuk daerah perkotaan dan perdesaan, terhitung lebih tinggi dibandingkan laju inflasi umum NTB (1,28% yoY). Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan laju inflasi komoditas-komoditas utama pembentuk garis kemiskinan, khususnya kebutuhan primer bahan makanan. Peningkatan laju kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan laju inflasi umum menunjukkan bahwa nilai barang-barang konsumsi masyarakat prasejahtera meningkat lebih tinggi dibandingkan nilai barang-barang konsumsi masyarakat menengah-sejahtera, disebabkan oleh tingginya laju inflasi kelompok kebutuhan primer, khususnya pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat kenaikan garis kemiskinan berpotensi dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin.

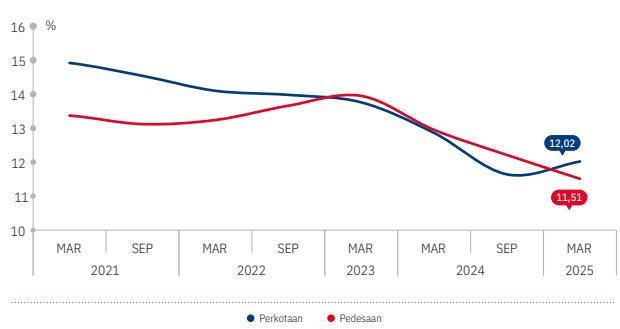
Untuk menahan laju tingkat kemiskinan ke depan, berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah pusat, yakni berlanjutnya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan NonTunai (BNPT). Sementara itu, kebijakan pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk jaringan pengaman sosial berupa bantuan sosial tunai dan

Grafik 6.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin NTB



Sumber: BPS

Grafik 6.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota dan Desa NTB



Sumber: BPS NTB

bantuan sosial beras kepada keluarga penerima manfaat menggunakan anggaran APDB Provinsi maupun Kabupaten/Kota di NTB.

6.2.2 Pemerataan Kesejahteraan Penduduk

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk NTB pada 2025 yang diukur dengan koefisien gini meningkat. Pada Maret 2025, koefisien gini NTB sebesar 0,369; lebih tinggi dibandingkan Maret 2024 (0,361) dan lebih rendah dari Nasional (0,375). Dengan demikian, tingkat pemerataan pendapatan di NTB lebih merata dibandingkan nasional (Grafik 6.5).

Berdasarkan wilayah, tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan kawasan perdesaan. Pada Maret 2025, koefisien gini perkotaan NTB sebesar 0,397; lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang sebesar 0,323. Meskipun ketimpangan di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan perdesaan, distribusi pengeluaran menurut kelompok

Tabel 6.6. Garis Kemiskinan NTB

Garis Kemiskinan	2023		2024		2025
	MAR	MAR	SEP	MAR	
Kota	511.463	547.412	554.327	574.051	
Desa	485.682	520.679	525.027	537.105	
Kota dan Desa	498.996	534.703	540.339	556.846	

Sumber: BPS

penduduk 40% terbawah di perkotaan sebesar 17,55%, lebih rendah dibandingkan di perdesaan sebesar 20,86%. Persentase pengeluaran di atas 17% masih dikategorikan ketimpangan rendah berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia.

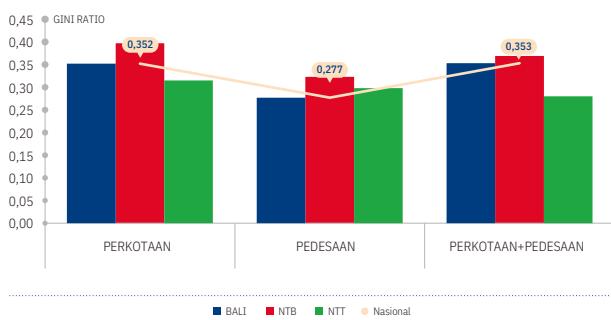
6.2.3 Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan

Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2025 meningkat. Berdasarkan data BPS, NTP Provinsi NTB mengalami peningkatan 1,39% (ptp) dari 124,13 pada Juni 2025 menjadi 125,52 pada September 2025 (Tabel 6.7). Peningkatan NTP tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan Indeks yang Diterima Petani (It) sebesar 2,32% (ptp) sedangkan Indeks yang Dibayar Petani (Ib) meningkat tipis 0,49% (ptp). Peningkatan indeks yang diterima petani didorong oleh masuknya panen padi subround-II yang mendorong.

Peningkatan NTP terjadi disemua sektor kecuali hortikultura dan perkebunan rakyat. Tanaman pangan menjadi sektor dengan peningkatan paling tinggi yakni 9,09% (ptp) seiring masuknya panen padi subround-II. Selanjutnya, sektor perikanan mengalami peningkatan 3,49% (ptp) seiring masuknya masa panen tambak garam pada periode Juni hingga Oktober. Di sisi lain, sektor hortikultura mengalami penurunan mencapai -28,82% (ptp) akibat bencana banjir di sentra bawang merah yang menyebabkan penurunan produksi mencapai -5,10% (oy) pada triwulan III 2025.

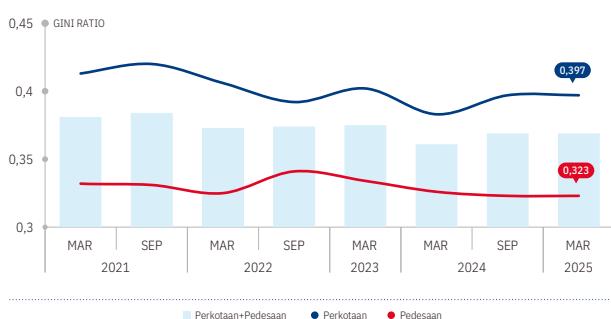
Dari sisi Indeks yang Dibayar (Ib) Petani, peningkatan terjadi semua sektor kecuali hortikultura. Peningkatan Ib tertinggi terjadi pada sektor perikanan seiring peningkatan biaya vaksin yang dikeluarkan petani menjelang musim hujan yang membuat hewan ternak rentan terhadap penyakit. Lebih lanjut, gagal panen pada komoditas tembakau akibat curah hujan yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan pengeluaran

Grafik 6.5 Perkembangan Koefisien Gini NTB dan Nasional



Sumber: BPS

Grafik 6.6 Perbandingan Ketimpangan NTB dan Nasional Berdasarkan Daerah



Sumber: BPS NTB

petani. Di sisi lain, masuknya masa panen anek cabai mendorong penurunan biaya yang dikeluarkan petani pada triwulan III 2025.

6.2.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB meningkat pada tahun 2025. Peningkatan IPM Provinsi NTB tercatat sebesar 0,87% (ptp) dari 72,25 pada tahun 2024 menjadi 73,97 pada tahun 2025 (Grafik 6.7). Peningkatan IPM tersebut

Tabel 6.7. Nilai Tukar Petani NTB dan Komponen Penyusunnya

Nilai Tukar Petani	2024				2025		
	MAR	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	SEP
Indeks yang Diterima Petani (It)	144,46	145,33	142,01	148,32	152,81	151,94	154,26
Indeks yang Dibayarkan Petani (Ib)	119,51	119,77	118,97	120,39	122,26	122,41	122,9
Nilai Tukar Petani	120,88	121,34	119,36	123,31	124,99	124,13	125,52

Sumber: BPS

Tabel 6.8. Nilai Tukar Petani NTB per Subsektor

Nilai Tukar Petani	2024				2025		
	MAR	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	SEP
Total	120,88	121,34	119,36	123,31	124,99	124,13	125,52
Tanaman Pangan	122,77	118,05	122,14	120,98	117,40	116,62	123,75
Hortikultura	157,56	173,09	135,68	180,47	219,24	204,41	182,01
Perkebunan Rakyat	103,05	109,91	106,70	108,41	108,32	109,49	100,11
Peternakan	105,41	112,40	110,18	109,30	108,39	113,38	113,49
Perikanan	104,08	101,13	101,99	105,59	104,96	106,33	108,78

Sumber: BPS

Tabel 6.9. Indeks yang Diterima Petani berdasarkan Subsektor

Nilai Tukar Petani	2024				2025		
	MAR	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	SEP
Total	144,46	145,33	142,01	148,32	152,81	151,94	154,26
Tanaman Pangan	146,25	140,80	144,58	144,85	142,93	141,92	151,01
Hortikultura	191,61	212,41	165,11	221,54	275,73	258,67	229,85
Perkebunan Rakyat	125,75	133,21	128,57	132,16	134,28	135,41	124,44
Peternakan	125,65	134,78	131,58	132,04	132,33	139,32	140,98
Perikanan	122,14	118,23	118,83	124,00	125,19	126,00	129,49

Sumber: BPS

Tabel 6.10. Indeks yang Dibayar Petani berdasarkan Subsektor

Nilai Tukar Petani	2024				2025		
	MAR	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	SEP
Total	119,51	119,77	118,97	120,29	122,26	122,41	122,90
Tanaman Pangan	119,13	119,27	118,38	119,73	121,74	121,70	122,03
Hortikultura	121,61	122,72	121,69	122,76	125,76	126,54	126,28
Perkebunan Rakyat	122,04	121,20	120,5	121,90	123,97	123,67	124,30
Peternakan	119,19	119,91	119,42	120,81	122,09	122,89	124,23
Perikanan	117,35	116,91	116,51	117,43	119,28	118,49	119,04

Sumber: BPS

Tabel 6.11. Perkembangan Komponen IPM berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

Kabupaten/Kota	UHH SP2020-LF		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Lombok Barat	72,64	73,03	13,99	14,17	6,88	7,15	Rp12.431	Rp12.544
Lombok Tengah	71,59	71,89	13,89	13,90	6,73	7,08	Rp11.531	Rp11.870
Lombok Timur	71,95	72,29	14,07	14,08	7,36	7,71	Rp10.571	Rp10.851
Sumbawa	72,67	73,07	13,34	13,35	8,59	8,88	Rp10.349	Rp10.716
Dompu	71,76	72,09	13,84	14,01	9,04	9,38	Rp9.971	Rp10.230
Bima	71,88	72,22	13,66	13,67	8,30	8,61	Rp9.418	Rp9.821
Sumbawa Barat	72,97	73,44	13,68	13,84	8,99	9,35	Rp12.841	Rp12.983
Lombok Utara	71,52	71,88	13,02	13,16	6,40	6,75	Rp10.272	Rp10.502
Kota Mataram	74,83	75,12	15,68	15,69	9,58	9,89	Rp16.514	Rp16.851
Kota Bima	73,15	73,45	15,08	15,21	10,96	10,97	Rp12.362	Rp12.623
Nusa Tenggara Barat	72,25	72,60	13,98	13,99	7,87	8,21	Rp11.606	Rp11.922

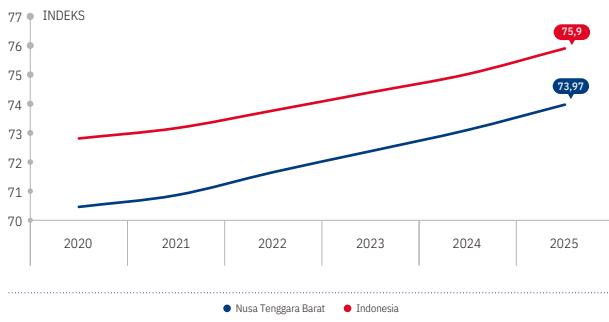
Sumber: BPS NTB

ditopang oleh peningkatan semua komponennya yakni umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita. Meski demikian, IPM Provinsi NTB tercatat masih di bawah Nasional yang sebesar 75,90 (Grafik 6.7). Secara spasial, terdapat 3 wilayah di NTB yang memiliki IPM di atas Nasional, yakni Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, dan Kota Bima (Grafik 6.8).

Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi NTB pada tahun 2025 tercatat sebesar 72,60 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 72,25 tahun (Tabel 6.11). Sejalan

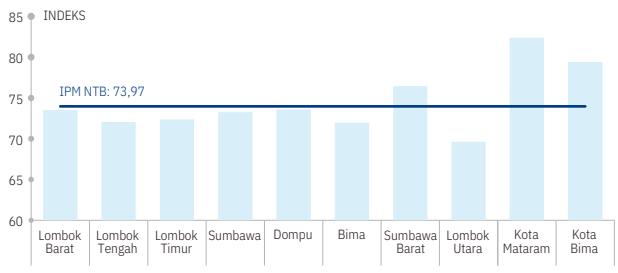
dengan UHH, rata-rata lama sekolah (HLS) di provinsi NTB tercatat naik 0,34 tahun dan tercatat sebesar 8,21 tahun atau setara kelas III SMP. Lebih lanjut, pengeluaran riil per kapita juga turut tumbuh 2,72% (yoY) pada tahun 2025. Pengeluaran riil per kapita di Provinsi NTB tercatat sebesar Rp11.922 ribu/orang/tahun atau sekitar Rp993,50 ribu per bulan. Di sisi lain, harapan lama sekolah (HLS) meningkat tipis 0,01 tahun menjadi 13,99 tahun pada 2025. Dari seluruh komponen IPM di NTB, hanya indikator HLS yang tercatat lebih tinggi dibandingkan capaian nasional (13,30 tahun).

Grafik 6.7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB dan Indonesia

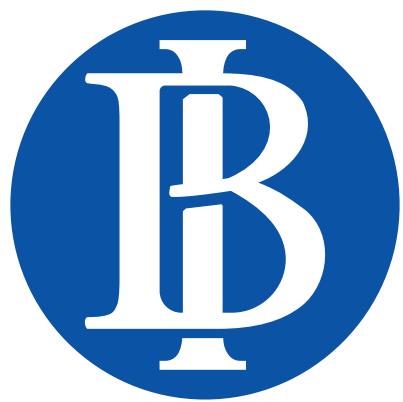


Sumber: BPS

Grafik 6.8 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi NTB pada Tahun 2025



Sumber: BPS





Prospek Perekonomian Daerah



Ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh positif pada rentang 2,34% - 3,14% (yoY). Lebih lanjut, ekonomi tanpa tambang diperkirakan tumbuh 6,44% - 7,24%. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB didorong oleh mulai beroperasinya smelter yang mendorong industri pengolahan di Provinsi NTB. Sejalan dengan hal tersebut, masih tetap tumbuhnya konsumsi RT turut mendorong kinerja perekonomian provinsi NTB sejalan dengan kenaikan tingkat upah, aktivitas perekonomian yang terus membaik serta tingkat inflasi yang terkendali.

Lebih lanjut, tekanan inflasi Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, namun tetap terkendali. Meningkatnya tekanan inflasi terutama didorong oleh penyesuaian harga komoditas dibandingkan tahun sebelumnya (cth. Gabah, jagung, & harga jual eceran rokok) serta potensi peningkatan permintaan pangan utama. Volatilitas harga komoditas global turut mendorong tingkat inflasi lebih tinggi di tahun 2025. Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan sinergi dan koordinasi intensif, serta mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi NTB.

7.1 KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL & DOMESTIK

Perkembangan ekonomi global sepanjang tahun 2025 menunjukkan dinamika yang semakin dipengaruhi oleh perubahan arah kebijakan di negara maju, khususnya Amerika Serikat, yang telah menerapkan kenaikan tarif impor dalam skala besar sejak awal tahun. Kebijakan tersebut mendorong peningkatan ketidakpastian perdagangan internasional dan menandai bergesernya lanskap ekonomi global menuju pola yang lebih terfragmentasi. Meskipun sejumlah negara kemudian menegosiasikan kesepakatan bilateral untuk menurunkan sebagian tarif tersebut, ketidakpastian mengenai arah kebijakan perdagangan ke depan tetap tinggi dan menahan pemulihan arus investasi global. Pada saat yang sama, pengetatan kebijakan migrasi di beberapa negara maju serta penurunan bantuan pembangunan internasional semakin menekan prospek pertumbuhan, terutama bagi negara berkembang yang bergantung pada aliran modal dan dukungan eksternal.

Ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat di tengah terjadinya temporary government shutdown dan arah suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang tertahan. Pertumbuhan ekonomi AS masih melambat akibat berlanjutnya dampak tarif dagang AS dan sempat berhentinya aktivitas Pemerintah yang terlama sepanjang sejarah yang berdampak pada tetap lemahnya kondisi ketenagakerjaan AS. Perlambatan ekonomi juga terjadi di Jepang, Tiongkok, dan India akibat permintaan domestik yang belum kuat. Sementara itu, ekonomi Eropa tumbuh lebih tinggi dari prakiraan akibat realisasi pertumbuhan di triwulan III 2025 yang ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi seiring pelonggaran kebijakan moneter. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 diprakirakan tetap sekitar 3,1%. Dari pasar keuangan, ketidakpastian kembali meningkat dipengaruhi oleh penurunan suku bunga kebijakan bank sentral AS yang dinilai pasar lebih berhati-hati (less dovish). Kebijakan tarif yang menahan penurunan inflasi AS serta kondisi pasar tenaga kerja yang belum kuat akibat kebijakan imigrasi dan berhentinya aktivitas Pemerintah di AS diprakirakan mendorong The Fed menahan penurunan Fed Funds Rate (FFR) di sisa tahun 2025. Meskipun kinerja ekonomi global pada awal 2025 tampak tangguh, hal tersebut terutama disebabkan oleh faktor-faktor sementara seperti percepatan impor, penyesuaian persediaan, serta tertundanya transmisi kenaikan tarif ke harga konsumen.

Pada tahun 2026 ketidakpastian kebijakan perdagangan yang berkepanjangan berpotensi menahan investasi dan mengganggu arus perdagangan internasional. Eskalasi proteksionisme, termasuk melalui hambatan non-tarif, dipandang dapat memperdalam fragmentasi ekonomi global dan menahan pertumbuhan produktivitas. Selain itu, pengetatan kebijakan migrasi di negara maju berpotensi menurunkan pasokan tenaga kerja dan memperburuk

Tabel 7.1. Pertumbuhan PDB Dunia

	2023	2024	2025*
Dunia	3,3	3,3	3,1
Negara Maju	1,7	1,8	1,6
Amerika Serikat	2,9	2,8	2,0
Kawasan Eropa	0,4	0,9	1,0
Jepang	1,5	0,1	1,0
Negara Berkembang	4,4	4,3	4,1
Tiongkok	5,2	5,0	4,8
India	7,7	6,5	6,6
ASEAN-5	4,0	4,6	4,4
Amerika Latin	2,4	2,4	1,9

Sumber: IMF WEO, *Proyeksi Bank Indonesia

tantangan struktural dari penuaan penduduk, sehingga menekan pertumbuhan potensial. Kerentanan fiskal di negara maju, risiko koreksi tajam pada pasar aset berbasis teknologi/AI, serta meningkatnya tekanan politik terhadap independensi bank sentral turut menjadi sumber ketidakpastian yang perlu diwaspadai.

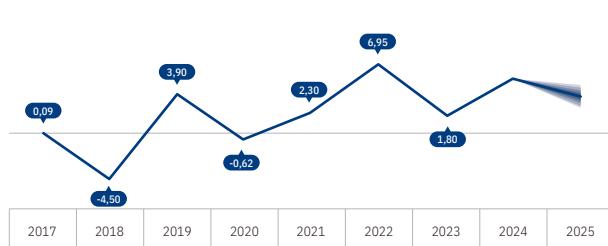
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan perlu terus ditingkatkan agar sesuai dengan kapasitas perekonomian. Ekonomi Indonesia pada triwulan III 2025 tumbuh 5,04% (yoy), ditopang oleh kinerja ekspor yang tetap baik serta konsumsi Pemerintah yang meningkat seiring percepatan belanja Pemerintah. Sementara itu, konsumsi rumah tangga dan investasi perlu terus didorong sehingga dapat memperkuat permintaan domestik. Secara sektoral, sebagian besar Lapangan Usaha (LU) utama menunjukkan kinerja positif, termasuk LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Informasi dan Komunikasi. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercatat di wilayah Jawa dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat didukung stimulus fiskal melalui implementasi proyek prioritas dan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah 2025 serta bauran kebijakan Bank Indonesia yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Konsumsi rumah tangga diprakirakan tumbuh lebih tinggi didorong kenaikan ekspektasi penghasilan, khususnya pada kelompok menengah ke bawah, sejalan tambahan bantuan sosial Pemerintah serta kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Investasi, khususnya nonbangunan, diprakirakan lebih tinggi tecermin dari indeks Prompt Manufacturing Index (PMI) yang tetap pada level ekspansif. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diprakirakan berada dalam kisaran 4,7-5,5%, dan akan meningkat pada 2026.

Inflasi secara umum diperkirakan tetap terjaga dalam **kisaran sasaran**. Inflasi IHK pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,36% (yoy), dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas serta didukung konsistensi suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya dan imported inflation yang tetap terkendali. Inflasi kelompok administered prices (AP) terjaga rendah sebesar 1,45% (yoy) seiring dengan penurunan harga bensin dan tarif berbagai jenis angkutan. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food (VF) meningkat menjadi 6,59% (yoy) disumbang antara lain oleh komoditas cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras dipengaruhi oleh gangguan pasokan akibat perubahan cuaca terkait curah hujan yang lebih besar.

7.2 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI NTB TAHUN 2025

Mencermati perkembangan terkini, secara keseluruhan tahun ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan positif dan namun melambat dengan **kisaran sebesar 1,96%-2,76% (yoy)** (Grafik 7.1). Dari sisi pengeluaran, perlambatan PDRB Provinsi NTB dipengaruhi oleh kinerja Ekspor Luar Negeri yang terkontraksi seiring dengan Produksi tembaga (pangsa ekspor utama NTB) yang lebih rendah di tahun 2025 seiring fase penambangan batuan penutup. Selain itu, konsumsi rumah tangga turut mengalami perlambatan meskipun diprakirakan masih mencatatkan kinerja positif pada tahun 2025. Sejalan dengan sisi pengeluaran, sisi lapangan usaha juga dipengaruhi oleh kinerja sektor pertambangan dan perdagangan yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tanpa tambang diperkirakan tumbuh 6,80% - 7,60% (yoy).

Grafik 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTB

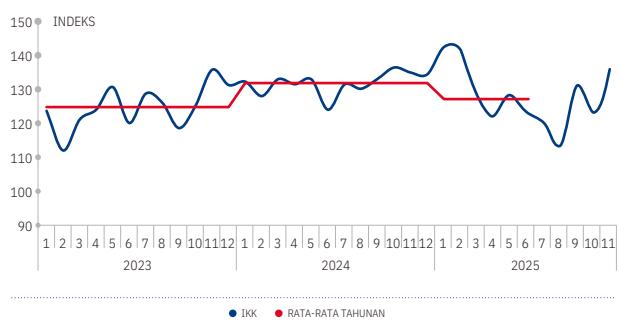


Sumber: Proyeksi Bank Indonesia (Angka Sementara)

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Sisi Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi Provinsi NTB tahun 2025 melambat terutama didorong oleh kinerja ekspor luar negeri yang diprakirakan terkontraksi setelah tahun

Grafik 7.2 Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Bank Indonesia

sebelumnya tumbuh terakselerasi (tabel 7.2). Di sisi lain, konsumsi rumah tangga masih tumbuh kuat meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya.

Kinerja konsumsi RT pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun sedikit melambat. Perlambatan konsumsi RT terutama didorong oleh kenaikan PPn Barang Mewah dan Kendaraan menjadi 12%. Hal ini mendorong masyarakat cenderung menahan pengeluaran untuk kebutuhan sekunder serta potensi peningkatan inflasi. Di sisi lain, perlambatan lebih dalam tertahan oleh kenaikan UMP NTB di tahun 2025. Berdasarkan hasil Survei Konsumen yang dilakukan, optimisme konsumen di Provinsi NTB masih terjaga tecermin dari masih tingginya indeks keyakinan konsumen yang tercatat sebesar 116,54 pada triwulan III 2025, sedikit melandai dibandingkan sebelumnya yang tercatat 125,19 pada triwulan II 2025.

Potensi lebih baiknya kinerja konsumsi RT pada tahun 2025 sejalan dengan adanya kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% (yoy), dari Rp2,44 juta menjadi Rp2,60 jt. Sejalan dengan hal tersebut, target kunjungan wisatawan Pemerintah Provinsi NTB di tahun 2025 (> 3 juta wisatawan) yang lebih tinggi dari target tahun 2024 (2,5 juta wisatawan) diperkirakan akan turut menopang kinerja konsumsi. Lebih lanjut, pertumbuhan juga diprakirakan didorong oleh beberapa kegiatan daerah diantaranya Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VIII dan dihadiri oleh 18.500 peserta dan pelaksanaan MotoGP di Sirkuit Mandalika direncanakan berlangsung selama 6 hari pada awal bulan Oktober. Meski demikian, masih relatif tingginya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian global, memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah sehingga tetap perlu untuk diwaspadai potensi imported inflation dari impor barang-barang konsumsi.

Kinerja sektor investasi pada tahun 2025 diperkirakan akan sedikit melandai dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja positif investasi diprakirakan tetap berlanjut didorong oleh kebijakan tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) oleh Pemerintah guna meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Hal ini tecermin dari penurunan realisasi pengadaan semen (Grafik 7.3) sebagai salah satu indikator pendukung pembangunan

Tabel 7.2. Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan

Pengeluaran	2024					2025*
	I	II	III	IV	Total	
Konsumsi RT	5,14	5,05	4,41	3,25	4,45	▼
Konsumsi LNPRT	18,79	13,69	12,84	1,03	11,26	▼
Konsumsi Pemerintah	13,21	2,94	1,08	4,43	5,17	▼
PMTB	7,79	2,32	-0,11	2,78	3,11	▼
Ekspor Luar Negeri	1,14	92,20	14,26	-41,43	5,77	▼
Impor Luar Negeri	8,03	24,43	15,54	-23,55	3,87	▼
PDRB	4,75	11,06	6,22	-0,50	5,30	▼

Sumber: BPS, P (Proyeksi Bank Indonesia), *Angka Sementara

proyek. Lebih lanjut, hingga Agustus 2025 realisasi investasi di KEK Mandalika tercatat sebesar Rp24,05 miliar dengan serapan tenaga kerja mencapai 1.814 orang. Secara akumulatif, total investasi sejak awal pengembangan mencapai Rp5,74 triliun, terdiri dari Rp5,01 triliun dari Badan Usaha Pengelola dan Rp0,72 triliun dari pelaku usaha. Namun demikian, ketergantungan terhadap satu event internasional masih menjadi tantangan struktural. Dampak ekonomi MotoGP Mandalika 2025 diproyeksikan mencapai Rp539 miliar (menurun dibandingkan Rp544 miliar pada 2024) dengan alokasi tiket sebanyak 66.042 lembar dan tingkat free ticket hingga 60%. Kenaikan biaya transportasi dan akomodasi selama musim balap turut menekan minat kunjungan, di mana tarif hotel bintang empat hingga lima meningkat hingga 450% dan biaya sewa kendaraan naik sekitar 200%.

Sementara itu dari sisi eksternal, kinerja eksport Luar Negeri diperkirakan akan terkontraksi. Secara umum, kinerja eksport luar negeri Provinsi NTB mayoritas berasal dari eksport konsentrat tembaga yang pangannya mencapai +98%. Namun demikian, kinerja eksport Luar Negeri Provinsi NTB diproyeksikan mengalami kontraksi pada tahun 2025 dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 yang tumbuh tinggi sejalan dengan optimalisasi ijin eksport pada tahun tersebut. Namun demikian, kontraksi yang lebih dalam tertahan dengan diperolehnya relaksasi izin eksport konsentrat tembaga dari Kementerian Perdagangan pada 5 November 2025 dengan volume 527 ribu WMT atau setara 480 ribu DMT hingga April 2026, setelah sebelumnya disetujui oleh Kementerian ESDM. Pada termin

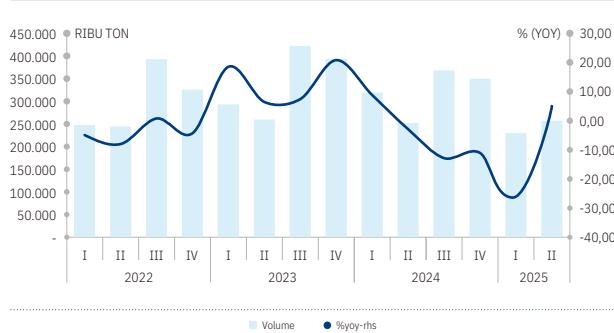
pertama, eksport dijadwalkan hingga Desember 2025 sebesar 240 ribu ton, dengan pengapalan hingga akhir November 2025 diprakirakan mencapai 88 ribu WMT.

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Sisi Lapangan Usaha

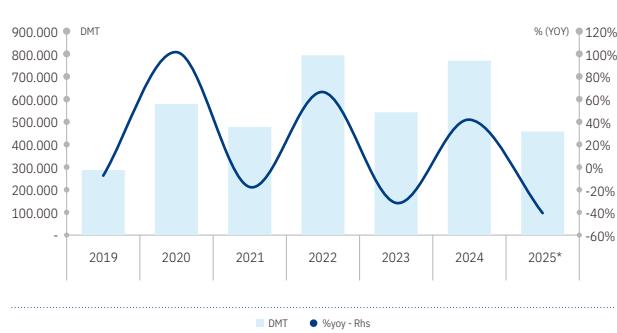
Dari sisi lapangan usaha, perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB pada tahun 2025 berasal dari sektor pertambangan dan perdagangan yang mengalami penurunan kinerja dibandingkan dengan tahun 2024 (Tabel 7.3). Meski demikian perlambatan lebih lanjut cenderung tertahan oleh sektor pertanian yang tumbuh meningkat serta sektor industri pengolahan tumbuh terakselerasi sejalan dengan operasional smelter di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kinerja sektor pertambangan diproyeksikan akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini seiring dengan berlangsungnya tambang batuan penutup pada Fase 8 sehingga kualitas batuan bijih dan produksi tembaga lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik 7.4). Selain itu, smelter yang masih menghadapi kendala teknis yakni kerusakan pada mesin acid cooler, menurunkan kapasitas operasional menjadi sekitar 35%, dari sebelumnya 48–50% pada Juli 2025.

Sejalan dengan sektor pertambangan, kinerja sektor perdagangan diproyeksikan turut melambat dibandingkan dengan kondisi di tahun 2024. Hal ini seiring dengan pemberlakuan PPn untuk Barang Mewah & Kendaraan

Grafik 7.3 Realisasi Pengadaan Semen

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia

Grafik 7.4 Produksi Konsentrat Tembaga

Sumber: PT AMNT & Earning Report PT AMMAN, diolah

Tabel 7.3. Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Pengeluaran	2024					2025*
	I	II	III	IV	Total	
Pertanian	-4,13	5,17	2,28	2,75	1,54	▲
Pertambangan	12,48	46,00	18,05	-16,84	11,66	▼
Perdagangan	9,46	0,12	8,53	6,31	5,87	▼
Konstruksi	3,79	4,83	-0,35	2,96	2,93	▲
Transportasi	4,63	4,40	4,57	3,25	4,21	▲
PDRB	4,75	11,06	6,22	-0,50	5,30	▼

Sumber: BPS, P (Proyeksi Bank Indonesia), "Angka Sementara

menjadi 12% yang berdampak pada permintaan Masyarakat terkait dengan barang sekunder dan berpotensi menekan volume perdagangan. Selain itu, kondisi ekonomi global yang masih fluktuatif turut memengaruhi pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi sehingga menjadi lebih konservatif.

Di sisi lain, kinerja sektor pertanian diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada tahun 2025. Kondisi tersebut seiring dengan kondisi cuaca yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya serta peningkatan alokasi pupuk bersubsidi yang meningkat sebesar 31,32% (yoY) untuk UREA dan 40,01% (yoY) untuk NPK dibandingkan dengan realisasi penyaluran pupuk pada tahun 2024. Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) dari Badan Pusat Statistik, produksi GKG triwulan III 2025 diperkirakan tumbuh 29,18% (yoY). Selain itu, adanya kebijakan Program Swasembada Pangan melalui tanam serentak 1 juta hektar lahan jagung nasional dengan target produksi mencapai 4 juta ton pada tahun 2025 di Provinsi NTB.

Kinerja sektor konstruksi diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi pada tahun 2025. Adapun kondisi tersebut sejalan dengan pembangunan PLTNG Lombok 2 dan PLTNG Sumbawa 3 yang masing-masing berkapasitas 50 MW serta berlanjutnya pembangunan dan revitalisasi proyek fisik pemerintah seiring pembukaan blokir anggaran secara bertahap. Selain itu, adanya kebijakan tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat menggerakkan sektor konstruksi yang menjadi salah satu komponen pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB. Di sisi lain, peningkatan pada sektor konstruksi yang lebih tinggi cenderung tertahan oleh berakhirnya proyek smelter yang bernilai signifikan (Rp21,6 triliun) dalam rangka mendukung percepatan hilirisasi tembaga sebagaimana Keputusan Menteri ESDM No. 89 Tahun 2023.

Lebih lanjut, kinerja sektor transportasi diperkirakan tumbuh akselerasi pada tahun 2025. Pertumbuhan positif sektor transportasi antara lain ditopang oleh periode cuti bersama yang lebih panjang di tahun 2025, sehingga akan berdampak pada kunjungan wisatawan nusantara yang lebih tinggi. Dari subsektor angkutan laut, terdapat kedatangan kapal pesiar di Pelabuhan Lembar pada tahun 2025 (28 kapal) diperkirakan lebih banyak dibandingkan realisasi tahun 2024 (19 kapal).

Meski demikian, pertumbuhan lebih tinggi relatif tertahan oleh faktor base effect di tahun sebelumnya yang telah tumbuh tinggi pasca berakhirnya pandemi, tidak adanya perhelatan World Superbike (WSBK) 2024 di Sirkuit Mandalika, serta penambahan jumlah penerbangan yang masih relatif terbatas bila dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi.

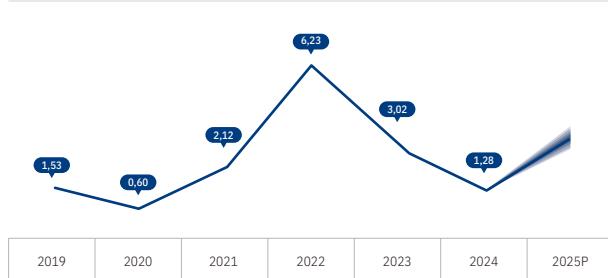
7.3 PROSPEK INFLASI PROVINSI NTB TAHUN 2025

Inflasi gabungan Provinsi NTB diperkirakan akan lebih tinggi namun tetap terkendali pada tahun 2025 (Grafik 7.5). Secara umum, tekanan inflasi Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan meningkat sejalan dengan perkembangan inflasi baik di tingkat global maupun domestik. Inflasi Amerika Serikat (AS) tercatat tinggi yang disebabkan oleh berlanjutnya negosiasi tarif dengan negara maju dan negara berkembang. Sementara itu, pada tingkat domestik, inflasi Nasional hingga Juli 2025 terpantau dalam tren meningkat namun masih berada dalam rentang sasaran.

Inflasi di Provinsi NTB tahun 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tekanan inflasi utamanya didorong oleh komoditas sigaret yang mengalami kenaikan sebesar 4-6% sesuai dengan jenisnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 97 tahun 2024 yang berlaku mulai dari 1 Januari 2025. Lebih lanjut, periode cuti bersama yang lebih banyak di tahun 2025 turut berpotensi meningkatkan tekanan inflasi pada komoditas tarif angkutan udara. Meski demikian, tingginya pasokan minyak dunia sejalan dengan rencana kenaikan produksi OPEC+ diperkirakan menahan tekanan inflasi yang lebih tinggi. Adapun, pemberian diskon tarif angkutan udara yang diberikan pada momentum HBKN dan liburan berpotensi juga untuk menahan kenaikan yang lebih lanjut.

Sejalan dengan itu, tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan juga diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Adanya penyesuaian HPP Gabah dari Rp6.000/kg menjadi Rp6.500/kg, penyesuaian harga jagung pakan dari Rp5.000/kg menjadi Rp6.400/kg sejalan dengan Keputusan Kepala Bapanas No.216 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung, potensi peningkatan permintaan terhadap komoditas pangan utama juga sejalan

Grafik 7.5 Proyeksi Inflasi Provinsi NTB



Sumber: Proyeksi Bank Indonesia (Angka Sementara)

dengan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi mendorong kenaikan tekanan harga pada kelompok bahan makanan. Meski demikian, inflasi lebih tinggi cenderung tertahan oleh kondisi cuaca di tahun 2025 yang relatif lebih stabil pasca El Nino yang dapat berdampak positif pada produksi padi.

Lebih lanjut, masih relatif tingginya ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik mendorong para investor untuk membeli emas yang kemudian memberikan tekanan pada harga emas global sebagai aset *safe-haven* (Grafik 7.6). Lebih lanjut fenomena El Nino juga mempengaruhi budidaya kelapa sawit di Indonesia dan dorongan menggunakan lebih banyak minyak sawit untuk produksi biodiesel berpotensi mendorong tekanan harga minyak goreng.

Grafik 7.6 Harga Emas Global



Sumber: Bloomberg

Berdasarkan berbagai faktor di atas, inflasi gabungan di Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan lebih tinggi namun masih terkendali. Sesuai mandat, Bank Indonesia akan terus berusaha menjaga capaian target inflasi tersebut melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui implementasi strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif). Untuk itu, koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi juga perlu terus diperkuat terutama dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat.

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Pejanggik No.2 Mataram Nusa Tenggara Barat

Telp. : (0370) 623600

Fax : (0370) 631793

Email : KPwNTB-FPKP@bi.go.id

www.bi.go.id